

chek 2

by Bahri Samsir

Submission date: 04-Jan-2022 12:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1737322255

File name: SAMSIR_chek_lagi.pdf (952.55K)

Word count: 31150

Character count: 200132

BAB I INKLUSI KEUANGAN; PROLOG, DEFINISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR

A. Prolog

Inklusi keuangan¹ diperuntukkan bagi masyarakat guna memanfaatkan berbagai layanan akses jasa dan produk keuangan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat terutama mereka yang *unbankable*.² Bahkan oleh Bank Dunia, inklusi keuangan memicu perhatian pembuat kebijakan, kalangan akademisi, praktisi, dan pihak berkepentingan lainnya mengingat implikasinya terhadap pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bersama.

Fair Finance Guide International (FFGI) mempromosikan praktik perbankan berkelanjutan. FFGI mengusulkan sejumlah topik utama yang harus diadopsi sebagai praktik bisnis perbankan. Inklusi keuangan menjadi salah satu temanya. Bank harus menghasilkan produk sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keadilan sosial. Agunan bank bisa membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis dan perannya juga memungkinkan inovasi produk dapat dikembangkan termasuk cara mengatasi masalah sosial dan persoalan lingkungan yang dihadapi. Pemberian pinjaman bank dapat merangsang investasi yang produktif dalam tiap aktivitas bisnis yang dijalankan.³

Menurut Umar⁴, di Indonesia, tidak semua kelompok masyarakat sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, sebagai sumber pembiayaan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang dapat meningkatkan keandalan inklusi keuangan.

40

¹ International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, *Global Financial Development Report 2014; Financial Inclusion* (Washington, DC, 2013), internet: www.worldbank.org.

² Ahmed Tahiri Jouti, "Islamic finance: financial inclusion or migration?," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2018): 277–288.

³ Rotua Nuraini Tampubolon, "Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di Indonesia," *Case Study* (2017): 1–83.

⁴ Azwar Iskandar Umar, "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 20, no. 1 (2017): 99–126.

Menurut indeks inklusi keuangan global Bank Dunia, kurang dari setengah penduduk Indonesia (40%) mempunyai akses ke lembaga keuangan resmi, dibandingkan dengan lebih 80 persen di Thailand dan Malaysia. Sebelumnya studi OJK terkait inklusi keuangan dari 2013 silam, tercatat 52 persen¹³⁹ tntangga di Indonesia tak mempunyai tabungan. Ini berarti inklusi keuangan di Indonesia terbilang rendah.⁵ Namun hal ini¹⁰⁵ gembira di tahun 2020, dimana Menurut Survei Keuangan Inklusif Nasional yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada tahun 2020, 81,4 persen masyarakat telah n⁸ manfaatkan barang atau jasa lembaga keuangan formal. Jika dibandingkan dengan hasil tahun lalu sebesar 78,8%, angka ini meningkat. Sementara itu, 61,7 persen orang memiliki akun. Jika dibandingkan dengan hasil tahun lalu sebesar 55,7 persen, angka ini meningkat.

Catatan OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 adalah 76,19 persen. Naik dari tahun sebelumnya. Sumbangsih ini bera⁴² dari sektor bank 73,88 persen, diikuti Lembaga Keuangan/Pembiayaan 14,56 persen, Perasuransian 13,15 persen, Pergadaian 12,38 persen, Dana Pensiun 6,18 persen, dan Pasar Modal 1,55 persen. Sedangkan sektor usaha LKM) berkontribusi terkecil 0,72 persen. Artinya ada hambatan LKM yang menjadi basis ekonomi masyarakat kurang berkontribus. Begitupun literasi keuangan LKM hanya mampu menyumbang 0,85 persen.⁶

Menurut jajak pendapat, kepemilikan akun lebih luas di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Daerah pedesaan, di sisi lain, melihat pertumbuhan yang lebih besar dalam kepemilikan akun daripada daerah metropolitan. Agen bank dan BUMDes juga menyebabkan pertumbuhan kepemilikan rekening yang cukup besar di daerah pedesaan. Jajak pendapat tersebut mencakup 7.574 orang dari 34 provinsi, serta perkiraan populasi nasional untuk tahun 2020 yang

⁵ Tampubolon, "Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di Indonesia." ¹⁰

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019," *Otoritas Jasa Keuangan* (2020).

mempertimbangkan stratifikasi perkotaan/pedesaan dan gender.⁷

Selanjutnya, program bantuan pemerintah membantu dalam perluasan kepemilikan rekening. Tujuh dari sepuluh orang yang menerima bantuan pemerintah sudah memiliki rekening bank. Pada 2020, jumlah penerima bantuan pemerintah tumbuh menjadi 40,8 persen, naik dari 17,2 persen pada 2018.⁸

Pada tahun 2020, masyarakat Indonesia akan memiliki lebih banyak akses ke barang dan jasa perbankan syariah. Penggunaan dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah tumbuh 1 persen, dan 0,7 persen untuk deposito dan tabungan, 0,3 persen untuk transferan bank, dan 0,6 persen bagi masyarakat yang mengakses barang dan jasa dari bank syariah.⁹

Selain itu, usulan program kerja keuangan inklusif 2021-2024 meliputi peningkatan akses layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, perluasan jangkauan layanan keuangan, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha bagi usaha mikro dan kecil, peningkatan digital produk dan layanan keuangan, serta memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan inklusif.

Saat ini kegiatan keuangan mikro telah menyebar dan membantu jutaan masyarakat di dunia. Menurut Bhanot, Bapat dan Bera dalam Nogueira, et.al¹⁰ mengaku keuangan mikro sudah membantu puluhan juta rumahtangga miskin dan tak mengakses layanan keuangan konvensional dan menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang kurang beruntung dengan total pinjaman yang diperkirakan mencapai US \$ 114 miliar, sektor keuangan mikro telah menjangkau sekitar 139 juta klien berpenghasilan rendah dan kurang terlayani.

⁷ kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Republik Indonesia, *Sistem Keuangan Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat*, *Siaran Pers HM.4.6/165/SET.M.EKON.3/06/2021*, 2021, www.ekon.go.id.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Serafim Nogueira, Fábio Duarte, dan Ana Paula Gama, "Microfinance: Where are We and Where are We Going?," *Development in Practice* 30, no. 7 (2020): 874–889.

Pada konteks inklusi keuangan, posisi LKM adalah alat yang efektif untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat saat ini. Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat yang kurang beruntung atau rumah tangga berpenghasilan rendah, serta usaha mikro mereka, seperti kredit, deposito, asuransi, dan transfer uang. Konsep ini menekankan perluasan layanan keuangan yang terkait secara historis, seperti kredit mikro, dan layanan yang ditargetkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Keuangan mikro kata Qadariyah dan Permata¹¹ memiliki dua karakteristik utama yang membedakannya dari layanan keuangan tradisional: Tidak ada aset sebagai jaminan untuk pinjaman atau simpanan sederhana. Lembaga keuangan mikro, khususnya lembaga yang misi utamanya menyediakan layanan keuangan mikro, lembaga keuangan formal dengan unit layanan keuangan mikro, dan lembaga keuangan terdesentralisasi, semuanya dapat memberikan layanan keuangan mikro.

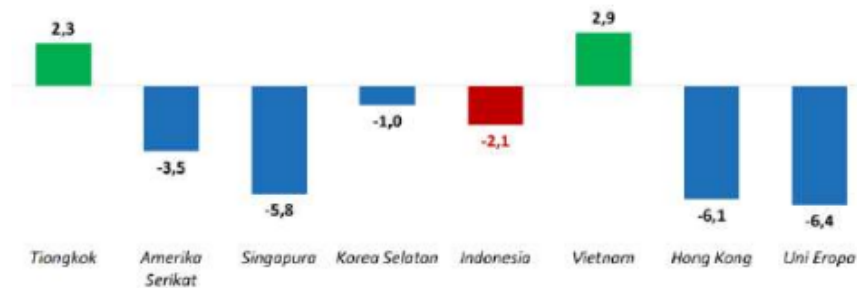
Olehnya itu, Babalola, et.al., menyatakan penting adanya peningkatan kontribusi LKM karena menawarkan pembiayaan berskala kecil. Disisi lain, keuangan mikro menyediakan layanan pinjaman, deposito, transfer uang, asuransi, dan pembayaran kepada pelaku usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah dan rumah tangga miskin.¹²

Inklusi keuangan Indonesia memacu naiknya pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir yang mencapai 5,02 persen pada tahun 2016, di tahun 2017 menjadi 5,07. Sementara tahun 2018 naik menjadi 5,17 persen dan tetap stabil di tahun 2019. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia akan meningkat sebesar 2,07% (year-on-year) lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Berikut grafik 1.1, tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beberapa negara yang dijadikan sebagai mitra dagang.

¹¹ Lailatul Qadariyah dan Arif Rachman Eka Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik," *Dinar: Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 80 (2017): 10.

¹² Ayodele Victor Ahmed dan Kehinde Babalola, "An Enquiry Into the Contributions of Microfinance Institutions Towards the Development of Small Scale Business in Nigeria," no. January (2016).

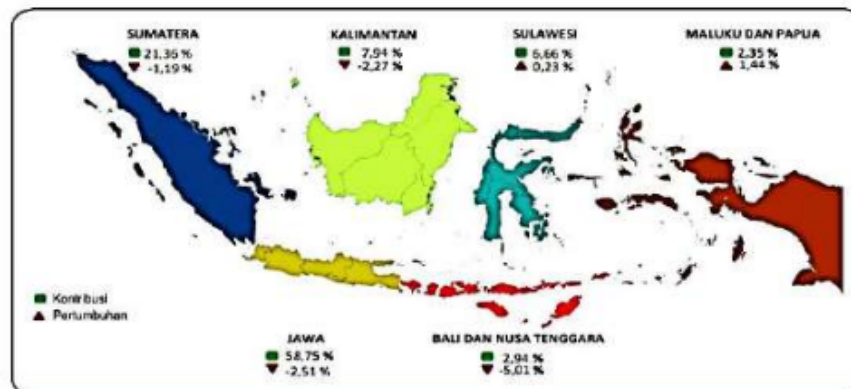
Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama tahun 2020:



Sumber: Badan Statistik masing-masing negara.

Sumber: BPS, 2021

Kendati mengalami kenaikan namun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih lambat pada 2019. Sementara Struktur spasial perekonomian Indonesia pada tahun 2020 masih didominasi oleh provinsi Jawa yang menyumbang 58,75 persen dari PDB; Pulau Sumatera menyumbang 21,36 persen; Pulau Kalimantan menyumbang 7,94 persen; Pulau Sulawesi menyumbang 6,66 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara menyumbang 2,94 persen; serta pulau Maluku dan Papua menyumbang 2,35 persen, sebagaimana tergambar dalam gambar 1 berikut ini.



Sumber: BPS, 2021.

Olehnya itu, OJK¹³, berharap konsep inklusi dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang memicu

86

pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, terciptanya sistem keuangan, dukungan program pencegahan, dan pengurangan konflik antarmanusia dan antardaerah. Partisipasi itu termasuk kontribusi LKM.

B. Definisi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan topik luas dengan berbagai makna yang tersedia dalam literatur, tergantung pada perkembangan sosial ekonomi suatu negara.¹⁴ Individu dan perusahaan dengan inklusi keuangan memiliki akses ke barang dan jasa keuangan yang murah dan dapat digunakan yang memenuhi persyaratan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, yang semuanya dipasok secara etis dan berkelanjutan.

The World Bank mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses di mana semua rumah tangga dan perusahaan, terlepas dari tingkat pendapatan, memiliki akses ke dan dapat berhasil menggunakan layanan keuangan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kehidupan mereka.¹⁵ Layanan tersebut harus tersedia bagi pelanggan dengan cara yang bertanggung jawab dan aman, dan harus diberikan dalam lingkungan yang terkendali yang dapat dipertahankan.¹⁶

Inklusi keuangan sedang diprioritaskan oleh otoritas global dan nasional sebagai item agenda pembangunan yang penting. Akibatnya, ada perselisihan global tentang apa yang dimaksud dengan inklusi keuangan. Namun, sebagian besar ahli menyarankan bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan yang mudah dari semua layanan keuangan formal

72

¹⁴ Godfrey Akileng, Gillian Mercy Lawino, dan Eric Nzibonera, "Evaluation of Determinants of Financial Inclusion in Uganda," *Journal of Applied Finance & Banking* 8, no. 4 (2018): 1792–6599.

¹⁵ World Bank, "Doing business 2018: Cameroon" (2018) 27–67.

¹⁶ Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, dan Dorothe Singer, "Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence," *Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence*, no. April (2017).

untuk semua segmen masyarakat dengan biaya, waktu, dan kuantitas yang adil.¹⁷

Karena pentingnya inklusi keuangan, baru-baru ini diakui sebagai komponen penting dari pembangunan jangka panjang karena memungkinkan transaksi keuangan yang efisien dan aman. Hal ini membantu orang miskin dalam mengatasi kemiskinan dengan memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan dan bisnis, serta mengelola risiko keuangan dengan lebih baik di masa-masa sulit.¹⁸

Inklusi keuangan saat ini menjadi diskursus pada forum-forum nasional maupun internasional. Inklusi keuangan disebut oleh Leyshon dan Thrift sebagai antitesa dari eksklusif keuangan. Sifat eksklusifitas keuangan akan sulit membuat masyarakat tidak mampu, miskin, kaum migran untuk mendapatkan akses keuntungan dari sektor keuangan dan merugikan individu yang tidak memiliki akses ke layanan sistem keuangan.¹⁹

Di sisi lain, keuangan inklusif diperlukan karena berbagai alasan. Bank Dunia menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, juga menekankan agar ekspansi yang diatur dalam akses layanan keuangan merupakan faktor penting untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan memastikan kemakmuran jangka panjang.²⁰

Laporan Bank Dunia juga mengungkapkan inklusi keuangan telah meningkatkan reformasi global dan merupakan topik yang sangat menarik bagi pembuat kebijakan, regulator, peneliti, praktisi pasar, dan pemangku kepentingan. Bagi kelompok Bank Dunia, inklusi keuangan memiliki implikasi

110

¹⁷ Thi Xuan Huong Tram, Tien Dinh Lai, dan Thi Truc Huong Nguyen, "Constructing a Composite Financial Inclusion Index for Developing Economies," *Quarterly Review of Economics and Finance*, no. xxxx (2021).

¹⁸ Demircuc-Kunt, Klapper, dan Singer, "Financ. Incl. Incl. Growth A Rev. Recent Empir. Evid." 43

¹⁹ Andrew Leyshon dan Nigel Thrift, "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States," *Transactions of the Institute of British Geographers* 20, no. 3 (1995): 312.

²⁰ International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, *Global Financial Development Report 2014; Financial Inclusion*.

untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.²¹

Keuangan inklusif digambarkan sebagai kemampuan orang tertentu untuk mendapatkan dan menggunakan layanan keuangan dasar seperti pinjaman, asuransi, dan tabungan secara nyaman, aman, dan fleksibel.²² Selain itu inklusi keuangan oleh Ogunsakin et.al dalam Holle dijadikan sebagai alat kebijakan oleh pemerintah suatu negara untuk memerangi kemiskinan.²³

Untuk itu Sharma, mengungkapkan akses dan penggunaan layanan keuangan dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena inklusi keuangan mencakup berkelanjutan, hemat biaya, relevan, dan bermakna layanan keuangan secara finansial terutama masyarakat di pedesaan.²⁴ Akses layanan keuangan sebut FATF, harus terjangkau kepada kelompok rentan, berp34 apatan rendah, orang yang tidak berdokumen, yang telah dilayani atau dikecualikan dari sektor keuangan formal.²⁵ Untuk Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan diperuntukkan ba1 masyarakat guna memanfaatkan berbagai layanan akses produk dan jasa keuangan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat.²⁶

Intinya keuangan inklusif menjadi instrument strategis guna membantu orang untuk mendiversifikasi atau meningkatkan aliran pendapatan di rumah, menyediakan likuiditas/ arus kas, menyerap guncangan kesulitan dengan

115

²¹ World Bank, *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion*, 135.

²² Bassey Ina Ibor, Amenawo Ikpa Offiong, dan Enyeokpon Samuel Mendie, "Financial Inclusion and Performance of Micro, Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria," *International Journal of Research - Granthaalayah*, 5, no. 3 (2017): 104–122,

²³ Mohammad H. Holle, "Inklusi Keua125 Solusipengentasan Kemiskinanunadaya Saing Perekonomian Bangsa," *Amal: Journal of Islamic Economic and Business (J.77)*, 1, no. 2 (2019): 163–176.

²⁴ Mukesh Kumar Sharma, "Financial Inclusion: a Prelude to Economic Status of Vulnerable Group," *International Journal of Research - Granthaal*, 68, 4, no. 12 (2016): 147–154,

²⁵ FATF, "Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion - With a Supplement on Customer Due Diligence," no. November 107),

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019," *Otoritas Jasa Keuangan* (2020).

membangun asset, mengatasi kerugian melalui kelancaran konsumsi, sehingga menghindari penjualan aset produktif.

Menurut Sarma dan Pais pengukuran sangat penting untuk kesadaran inklusi keuangan. Terlepas dari pentingnya inklusi keuangan diakui, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana mengukurnya. Ada kelangkaan literatur tentang pembuatan indeks keseluruhan yang komprehensif untuk mengumpulkan data yang cukup tentang inklusi keuangan, terutama untuk menetapkan indeks inklusi keuangan dengan menggunakan teknik pembobotan yang dapat diterima secara statistik. Akibatnya, inklusi keuangan harus diukur untuk menilai dampak dari berbagai inisiatif pemangku kepentingan dan merencanakan kegiatan di masa depan. Studi saat ini dimotivasi oleh fakta bahwa topik ini telah menarik minat para peneliti, politisi, dan pemerintah.²⁷

Inklusi keuangan juga didefinisikan di tingkat Uni Eropa sebagai proses di mana orang mengalami hambatan untuk mengakses atau memiliki layanan produk dan jasa keuangan di pasar utama untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan sosial yang normal di masyarakat mereka.²⁸

Inklusi keuangan, menurut committee Rancangan, adalah proses yang memastikan masyarakat kurang mampu dan/atau berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap layanan keuangan, menurut Bank Dunia dan IMF. Islam dan Mamun dalam Wahid menyatakan keuangan inklusif merupakan proses memastikan bahwa masyarakat sasaran inklusi menerima akses layanan keuangan. Biasanya dalam bentuk kerangka waktu dan jumlah biaya yang adil.²⁹ Komite Rancangan House of Commons memberikan definisi yang lebih tepat dan

98

²⁷ Sarma Mandira dan Jesim Pais, "Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis Mandira," *Asian Journal of Business Research* 6 (38) 1 (2016).

²⁸ Zhang Meihui, "Financial Inclusion From the Perspective of Basic Banking Services and Consumer Credit: A Comparative Study of Law and Regulation in the United Kingdom and China," no. 2015 (2015).

²⁹ Nusron Wahid. *Keuangan inklusif: membongkar hegemoni keuangan: peran kredit usaha rakyat dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Inter Cafe IPB dan OJK, 2014.

operasional, yang menyatakan bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat mengakses produk dan jasa layanan keuangan murah berdasarkan kebutuhan mereka. Kemampuan ini sebagian besar terkait dengan pemahaman yang canggih yang mencakup kesadaran keuangan, literasi tentang perbankan dan berbagai layanan yang disediakan oleh bank, dan pengetahuan tentang manfaat menggunakan sistem bank.³⁰

Keuangan, menurut Leyshon dan Thrift, adalah antitesa dari keuangan eksklusif karena proses keuangan eksklusif menghalangi masyarakat yang miskin mengakses sektor keuangan dan menempatkan masyarakat pada posisi yang kurang menguntungkan dalam memperoleh akses ke sistem keuangan karena mereka kekurangan akses, jaminan, kredit, sejarah, dan jaringan.³¹ Franklin Allen, dkk, menemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan akan membantu dan mendorong orang miskin untuk menggunakan lembaga keuangan berdasarkan data dari 123 dan lebih dari 124.000 orang.³² Inilah yang disinggung Hernando de Soto dalam karyanya *The Mystery of Wealth*, di mana ia membahas pentingnya orang miskin memiliki akses terhadap modal untuk meningkatkan kehidupan mereka. Ide ini berkembang dari kenyataan bahwa ada kemiskinan di tengah banyak bisnis dan ekonomi yang berkembang pesat.³³

Di Indonesia, inklusi keuangan yang dikonsepsi dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bukan sekadar teoritis; itu juga merupakan realitas praktis, Karena inklusi keuangan tidak hanya melibatkan Bank Indonesia tetapi juga regulator, kementerian, dan entitas pemerintah lainnya dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan strategi keuangan inklusif nasional,

100

³⁰ House of Commons Treasury Committee, "Financial Inclusion: Credit, Savings, Advice and Insurance," no. November (2006).

³¹ Leyshon dan Thrift, "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States,"

³² Franklin Allen et al., "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts," *Journal of Financial Intermediation* 27, no. 2016 (2016): 1–30.

³³ Hernando de Soto, *The Mystery of Capital*, no. March (2001): 29–30.

diharapkan upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan dan Pemerintah aman dan terstruktur.³⁴

Sektor keuangan dan perbankan Indonesia, sebagian besar masih belum berkembang. Akibatnya, banyak konsumen yang masih belum memahami atau memiliki akses informasi (literasi) yang cukup mengenai industri keuangan, baik itu tentang jenis produk, bahaya, maupun reward. Akibatnya, keluarga miskin sulit lepas dari kemiskinan yang melingkupinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada transformasi sosial yang berkaitan dengan industri keuangan. Kondisi ini tidak boleh dianggap enteng, karena literasi keuangan (financial literacy) merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap orang yang ingin mandiri secara finansial (kemandirian finansial). Dengan kata lain, melek keuangan merupakan syarat untuk menjadi kaya, menurut Kiyosaki.³⁵

Pada intinya, program inklusi keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan harga murah, terjangkau, dengan persyaratan pengembalian kredit yang sederhana dan tepat. Indikator kunci dari sifat inklusi keuangan adalah penghapusan ketimpangan ekonomi dengan memberikan kemungkinan yang sama bagi semua segmen untuk mengakses, menggunakan, dan mendapatkan keuntungan dari lembaga keuangan tanpa dikenakan bunga bank. Menurut definisi keuangan, esensi dari inklusi adalah kegiatan memperoleh dan menggunakan dana dengan mudah dari lembaga keuangan yang terbuka untuk semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi dalam rangka menciptakan perekonomian masyarakat secara luas.

Inklusi keuangan telah memperoleh banyak daya tarik dalam hal kebijakan di banyak negara berkembang maupun internasional.³⁶ Proses mendapatkan akses layanan keuangan dan penggunaan yang murah dan memudahkan ini dikenal

³⁴ Umar, "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia."

³⁵ Robert T Kiyosaki, "Rich Dad Poor Dad" (2012): 1–114.

³⁶ International Monetary Fund, "IMF Report 2017" (2017).

dengan istilah financial inclusion.³⁷ Ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk me³⁷apatkan dan menggunakan layanan keuangan penting seperti tabungan, kredit, dan asuransi dengan cara yang terjangkau, nyaman, fleksibel, dan dapat diandalkan.³⁸

Pada Pittsburg Summit 2009, misalnya, G20 menjadikan inklusi keuangan sebagai tema sentral.³⁹ Inklusi keuangan terhambat oleh batasan yang berasal dari berbagai hasil makroekonomi, termasuk stabilitas, kesetaraan, dan pertumbuhan ekonomi, menurut IMF.⁴⁰ Pembiayaan digital telah meningkat secara substansial berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah, mitra pembangunan, dan penyedia layanan semakin menekankan penyediaan layanan keuangan melalui sarana penyediaan layanan digital sebagai langkah positif menuju inklusi keuangan.⁴¹

Perkembangan keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui empat cara: pertama, dengan memperluas ketersediaan metode pembayaran murah; kedua, dengan meningkatkan volume transaksi keuangan; dan ketiga, dengan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, meningkatkan distribusi sumber daya. Ketiga, penerapan manajemen risiko yang menghasilkan investasi dan inovasi keuangan yang lebih produktif. Keempat, penyediaan informasi tambahan pada sistem keuangan tentang peluang investasi dan modal yang tersedia di sektor perbankan mengurangi konsekuensi dari informasi asimetris.

83

³⁷ Nwankwo Odi, "Impact of corruption on economic growth in Nigeria," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 6 SPEC. ISSUE (2014): 41–46.

16

³⁸ Marus Eton et al., "Financial inclusion and the growth of small medium enterprises in Uganda: empirical evidence from selected districts in Lango sub-region," *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 10, no. 1 (2021).

91

³⁹ Cull Robert, E Tilman, dan Holle Nina, "Financial inclusion and development: Recent impact evidence," *Focus Note* 92, no. April (2014): 1–12.

⁴⁰ Ratna. Sahay et al., "Banking of the Future - Finance in the digital Age," *SSRN Electronic Journal* 3, no. July (2018): 16.

⁴¹ Daniela Gabor dan Sally Brooks, "The digital revolution in financial inclusion: international development in the fintech era," *New Political Economy* 22, no. 4 (2017): 423–436.

Literatur ekonomi teoretis telah mempertahankan sepanjang sejarah bahwa sistem keuangan yang berkembang dengan baik mendukung alokasi sumber daya modal yang efektif dengan menyediakan berbagai aktivitas investasi yang mengendalikan risiko melalui diversifikasi, yang menghasilkan peningkatan likuiditas aset.⁴² Tabungan akan meningkatkan output per kapita, mendorong seluruh fungsi produksi lebih tinggi, menurut model pertumbuhan yang lambat. Model Solow terbatas pada jangka pendek dan menengah, dan tidak memperhitungkan kemajuan teknologi, yang dijelaskan oleh model pertumbuhan Schumpeter, yang menekankan pentingnya sistem keuangan yang berkembang dengan baik dan alat keuangan inovatif yang mendorong tabungan oleh semua orang. Segmen pendapatan ekonomi, menghasilkan peningkatan sumber daya keuangan untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat.⁴³ Inklusi keuangan adalah sumber pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, menurut penulis, karena layanan keuangan memungkinkan peningkatan tingkat investasi di perusahaan, kesehatan, dan pendidikan.⁴⁴

Inklusi keuangan dapat meningkat jika akses ke kredit dengan menggunakan mesin teller seluler dan otomatis (ATM), tabungan, dan akses sederhana ke pembayaran semuanya terbantu.⁴⁵ Inklusi keuangan juga terkait dengan tingkat investasi yang lebih baik, kesempatan kerja, tingkat pendapatan

32

⁴² Shem Alfred Ouma, Teresa Maureen Odongo, dan Maureen Were, "Mobile financial services and financial inclusion: Is it a Boon for Savings Mobilization?" *Review of Development Finance* 7, no. 1 (2017): 29–35.

⁴³ Abiola A. Babajide, Folasade B. Adegboye, dan Alexander E. Omankhanlen, "Financial Inclusion and Economic Growth in Nigeria," *International Journal of Economics and Financial Issues* 5, no. 3 (2015): 629–637.

⁴⁴ Demircuc-Kunt, Klapper, dan Singer, "Financ. Incl. Incl. Growth A Rev. Recent Empir. Evid" 16

⁴⁵ Marus Eton et al., "Financial inclusion and the growth of small medium enterprises in Uganda: empirical evidence from selected districts in Lango sub-region," *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 10, no. 1 (2021): 1–27.

yang tinggi, dan trend kemiskinan lebih rendah, dan kemajuan ekonomi hanya dapat dipertahankan jika sejumlah besar orang memiliki akses ke layanan keuangan formal.⁴⁶ Penyedia layanan keuangan harus mengurangi biaya operasional rekening untuk sebagian besar penduduk, terutama warga dari daerah pedesaan, untuk meningkatkan inklusi keuangan.⁴⁷

Disamping itu, penggunaan jasa keuangan dan kepemilikan rekening bank dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik sosial ekonomi dan demografi. Orang-orang dengan pendapatan rumahtangga lebih besar, yang berpendidikan, dan lebih tua, lebih mungkin mempunyai akses ke pembiayaan.⁴⁸ Sarma dan Jesim Pais⁴⁹, menjelaskan inklusi keuangan adalah proses yang memastikan bahwa semua anggota ekonomi memiliki akses mudah ke, dan penggunaan, sistem keuangan resmi. Ada berbagai keuntungan memiliki sistem keuangan inklusif. Ini memungkinkan penggunaan sumber daya produktif yang lebih efektif, yang berpotensi menurunkan biaya. Begitupun, akses ke layanan keuangan yang kompeten dapat meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari. Sistem keuangan inklusif dapat membantu mengurangi penyebaran sumber kredit informal yang eksploitatif. Akibatnya, sistem keuangan yang mencakup semua meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dengan memfasilitasi berbagai layanan keuangan yang efisien dan menawarkan cara untuk kebiasaan menabung yang aman dan aman.

Mereka berdua juga menyebutkan tujuan utama inklusi keuangan bagi kebijakan pembangunan banyak negara. Hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan dibahas di seluruh negara dalam artikel ini. Penelitian ini berusaha menemukan elemen-elemen yang berhubungan kuat dengan inklusi keuangan menggunakan indeks inklusi keuangan model

30

⁴⁶ Umar 20, "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia."

⁴⁷ Eton et al., "Financial inclusion and the growth of small medium enterprises in Uganda: empirical evidence from selected districts in Lango sub-region." 84

⁴⁸ Zuzana Fungáčová dan Laurent Weill, "Understanding financial inclusion in China," *China Economic Review* 34 (2015): 196–206.

⁴⁹ Mandira Sarma dan Jesim Pais, "Financial inclusion and development," *Journal of International Development* (2011).

Sarma.⁵⁰ Meskipun ada beberapa pengecualian, tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan suatu negara terkait erat. Pendapatan, seperti yang diperkirakan, berhubungan positif dengan jumlah inklusi keuangan di antara karakteristik sosial ekonomi. Selain kekayaan, faktor penentu utama lainnya termasuk ketidaksetaraan, melek huruf, dan urbanisasi. Selain itu, koneksi fisik dan infrastruktur informasi sangat terkait dengan inklusi keuangan.

Untuk negara di mana 80 persen atau lebih populasinya memiliki akun, fase berikutnya adalah beralih dari akses akun ke penggunaan akun (Cina, Kenya, India, Thailand). Reformasi, inovasi sektor swasta, dan dorongan untuk membuat akun berbiaya rendah, termasuk pembayaran seluler dan digital, digunakan untuk mendorong negara-negara ini maju.

Inklusi keuangan, telah menjadi subjek yang semakin menarik di kalangan peneliti, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan sektor keuangan lainnya. Misalnya, para pemimpin G20 telah berkomitmen dan meningkatkan upaya mereka untuk memenuhi tantangan dalam mempromosikan inklusi keuangan di seluruh dunia dengan alasan ekonomi dan politik bagi kebijakan pemerintah. Secara khusus, bukti paling meyakinkan adalah dalam hal penggunaan rekening bank.⁵¹

Pada KTT G20 di Seoul tahun 2010, inklusi keuangan diadopsikan untuk pengguna jasa keuangan formal yang diakui sebagai salah satu pilar utama agenda pembangunan. Inklusi keuangan inklusif mengacu pada fakta bahwa seseorang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Akun semacam itu memungkinkan untuk menyimpan dan meminjam uang secara formal, untuk mengontrak asuransi atau menggunakan layanan pembayaran. Karena itu, dimasukkan secara finansial mengarah pada manfaat ekonomi.⁵²

⁵⁰ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion, Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No 215*, 2008.

⁵¹ Allen et al., "The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts."

⁵² Alexandra Zins dan Laurent Weill, "The determinants of financial inclusion in Africa," *Review of Development Finance* (2016).

Selain pendidikan, beberapa penelitian juga seperti Allen et.al⁵³, menunjukkan bahwa terdapat disparitas gender dalam akses keuangan, dimana perempuan lebih rendah memiliki akses keuangan daripada laki-laki. Fungacova dan Weill⁵⁴, Zins dan Weill⁵⁵, berpendapat orang yang menikah lebih mungkin untuk memiliki akses ke sumber daya keuangan, Dilain sisi, semakin kecil rumah tangga, semakin kecil pula kemungkinannya memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan.⁵⁶

Keuangan mempermudah bisnis atau keluarga untuk merencanakan apa pun, mulai dari tujuan jangka panjang hingga bencana yang tidak terduga. Orang yang memiliki rekening bank lebih mungkin untuk memanfaatkan layanan keuangan lainnya, seperti kredit dan asuransi, untuk memulai dan mengembangkan bisnis, berinvestasi dalam pendidikan atau perawatan kesehatan, mengelola risiko, dan mengatasi guncangan keuangan, yang semuanya dapat meningkatkan kualitas mereka secara keseluruhan. kehidupan.

Kualitas hidup tergantung biaya dan kualitas jasa keuangan, selain unsur sosial dan ekonomi dari masyarakat, mempengaruhi penggunaan jasa keuangan dan kepemilikan rekening bank. Diuraikan Allen, et.al bahwa biaya tinggi ditemukan menjadi hambatan potensial untuk pembiayaan. Penilaian bank sentral atas biaya akses keuangan, yang meliputi pembukaan rekening, pemeliharaan rekening, dan biaya transaksi, digunakan untuk mengukur pengeluaran dalam penelitian ini. Bank sentral harus menentukan apakah biaya dalam yurisdiksinya terjangkau atau sangat mahal. Selain itu, berbagai penelitian telah menemukan bahwa kualitas layanan yang buruk, seperti kelemahan keamanan dan biaya layanan, biaya transportasi dapat berdampak pada penurunan inklusi keuangan.⁵⁷

⁵³ Allen et al., "The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts."

⁵⁴ Fungáčová dan Weill, "Understanding financial inclusion in China."

⁵⁵ Zins dan Weill, "The determinants of financial inclusion in Africa."

⁵⁶ Allen et al., "The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts."

⁵⁷ Ibid.

Inklusi keuangan telah dikaitkan dengan kemajuan ekonomi suatu negara, dan berbagai negara di dunia saat ini sedang mempertimbangkannya sebagai strategi pencapaian pertumbuhan yang lebih komprehensif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk kelompok penasehat PBB tentang inklusi keuangan pada tahun 2006, mengakui pentingnya inklusi keuangan. Kelompok ini memberikan saran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggota tentang hal-hal yang relevan dengan kemajuan global agenda inklusi keuangan. Banyak pencapaian telah dicapai sejak awal organisasi, termasuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya inklusi keuangan, membantu pemerintah dalam merancang sistem peraturan yang memfasilitasi penciptaan layanan keuangan bagi masyarakat miskin, mendorong penggunaan langkah-langkah holistik untuk mengukur inklusi keuangan, kemajuan, mengumpulkan dan menyebarkan praktik terbaik, dan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan bakat dan sumber daya.⁵⁸

C. Tujuan dan Kegunaan Inklusi Keuangan

Industri perbankan telah memimpin dalam mempromosikan inklusi keuangan. Reserve Bank of India (RBI) telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan di India, termasuk mengizinkan akun "tanpa embel-embel" dan "Kartu Kredit Umum" untuk setoran minimal dan jumlah kredit. Pada tahun 1996, Asosiasi Bankir Jerman mengeluarkan pedoman sukarela yang membentuk rekening giro 'setiap orang' yang memfasilitasi kegiatan perbankan dasar. Asosiasi Perbankan Afrika Selatan mengembangkan rekening bank murah bernama 'Mzansi' untuk orang-orang yang kurang beruntung secara finansial di Afrika Selatan pada tahun 2004. Di beberapa negara, lembaga keuangan alternatif seperti lembaga keuangan mikro dan Kelompok Swadaya telah dipromosikan untuk menjangkau untuk yang dikesualikan secara finansial.⁵⁹

⁵⁸ Akileng, Lawino, dan Nzibonera, "Evaluation of determinants of financial inclusion in Uganda."

⁵⁹ Sama dan Pais, "Financial inclusion and development."

Ditegaskan Yones, kebijakan inklusi keuangan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memperluas sumber daya keuangan dalam sistem keuangan, yang memerlukan peningkatan kesadaran dan fasilitasi layanan keuangan yang murah dan mudah diakses. Inklusi keuangan merupakan prioritas di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang bersama dengan kawasan Afrika Sub-Sahara, memiliki tingkat inklusi keuangan terendah, menurut database global Findex Bank Dunia. Ini menyoroti pentingnya mempelajari inklusi keuangan di kawasan untuk memfasilitasi tingkat inklusi yang lebih tinggi, yang berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih tinggi.⁶⁰

Bill dan Melinda Gates Foundation mendanai Financial Inclusion Global Initiative (FIGI), program tiga tahun yang dipimpin oleh World Bank Group, Committee on Payments and Market Infrastructure, dan International Telecommunications Union untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan tindakan reformasi yang dipimpin negara untuk memenuhi target inklusi keuangan nasional dan, pada akhirnya, tujuan global 'Akses Keuangan Universal 2020'.⁶¹

FIGI mendukung kelompok kerja untuk mengatasi tiga rangkaian tantangan luar biasa untuk mencapai akses keuangan universal: (1) penerimaan pembayaran elektronik, (2) ID digital untuk layanan keuangan, dan (3) keamanan; dan menyelenggarakan tiga simposium tahunan untuk menyatukan otoritas nasional, sektor swasta, dan publik yang terlibat dalam topik yang relevan dan untuk berbagi wawasan yang muncul dari kelompok kerja dan implementasi negara.⁶²

Sementara itu, *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPFI) memiliki target inklusi keuangan dimulai dengan inisiatif nasional yang menetapkan tujuan inklusi keuangan yang terkalibrasi dengan baik. Tujuan nasional dapat dilengkapi

87

⁶⁰ rasha Fouad Abd El Rahman Mohamed Yones, "Financial Inclusion and Economic Growth MENA Region," *المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة* 48, no. 4 (2018): 799–819. 89

⁶¹ The World Bank, "Financial Inclusion Global Initiative (FIGI)" (n.d.), <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/figi>.

⁶² Ibid.

dengan tujuan pengarahannya yang lebih global. Tujuan global memberikan kerangka kerja bersama untuk kegiatan nasional, yang menghasilkan peningkatan konsentrasi dan energi dalam memerangi pengucilan finansial. GPI juga mendesak pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melacak inklusi keuangan dan untuk menetapkan tujuan dan jadwal inklusi keuangan publik.⁶³

Indikator Inklusi Keuangan menurut G-20 seperti dikutip dalam laporan GPI adalah menyediakan kerangka kerja standar indikator sekaligus memungkinkan negara-negara untuk mengumpulkan data mereka sendiri. Artikel GPI sebelumnya tentang penetapan target memberikan ulasan yang solid dan beberapa saran tentang penetapan target, dan catatan ini merangkum ide-ide kuncinya (IFC 2011). Ketika tujuan tidak ditentukan dan ditetapkan dengan hati-hati, bahkan niat terbaik pun mungkin memiliki hasil negatif.⁶⁴

Pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif bergantung pada inklusi keuangan. Akses ke rekening transaksi membuka jalan bagi inklusi keuangan yang luas, memungkinkan orang dan bisnis dalam melakukan transaksi keuangan secara lebih efisien dan aman, mendapatkan akses ke dana (baik melalui pembayaran, kredit, tabungan, atau cara lain), menabung untuk masa depan, dan mengatasi dengan guncangan ekonomi. Akses ke akun transaksi juga memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan merupakan komponen penting dari pertumbuhan digital.⁶⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa 1,2 miliar orang telah membuka rekening keuangan sejak 2011, diperkirakan 1,7 miliar orang dewasa (atau 31% orang dewasa) masih belum

147

⁶³ United Nations; Department of Economic and Social Affairs dan ¹²² ty, *Financial Inclusion*, 2015, <https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/financial-inclusion.html>. ²⁹

⁶⁴ Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development, *Trade and Development Report, 2005* (New York and Geneva: Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development, 2005).

⁶⁵ The World Bank, "Financial Inclusion Global Initiative (FIGI)."

memiliki rekening transaksi dasar. Dua pertiga orang dewasa tanpa rekening bank mengatakan mereka tidak punya cukup uang, menyiratkan bahwa layanan keuangan belum terjangkau atau disesuaikan untuk pengguna berpenghasilan rendah.⁶⁶

Kebutuhan layanan keuangan digital dalam menawarkan instrumen keuangan yang aman, berbiaya rendah, dan tanpa gesekan kepada konsumen dan organisasi telah tumbuh semakin penting ketika dunia bergulat dengan masalah COVID-19. Selain itu, epidemi COVID-19 saat ini telah meningkatkan pentingnya layanan keuangan digital (DFS) dalam menjangkau kelompok-kelompok yang terabaikan dan rentan.⁶⁷

Inklusi keuangan adalah komponen kunci dari pengurangan kemiskinan dan kemajuan ekonomi, dengan layanan keuangan digital menjadi penting untuk partisipasi dalam ekonomi digital baru. Inklusi keuangan membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah bagi keluarga dan bisnis, memungkinkan mereka untuk merencanakan apa pun mulai dari tujuan jangka panjang hingga situasi yang tidak terduga.⁶⁸

Tujuan nasional dari rencana keuangan nasional inklusif Indonesia adalah "untuk membangun sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pembentukan sistem keuangan Indonesia." Visi tersebut kemudian dipisahkan menjadi beberapa tujuan, yang tercantum di bawah ini:⁶⁹

1. Mengintegrasikan inklusi keuangan ke dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan, distribusi pendapatan, dan desain sistem keuangan. Keuangan inklusif merupakan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti mitigasi ekonomi dan peningkatan

152

⁶⁶ The World Bank, "UFA2020 Overview: Universal Financial Access" (n.d.), <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020>.

⁶⁷ The World Bank, "Financial Inclusion Global Initiative (FIGI)."

⁶⁸ The World Bank, "UFA2020 Overview: Universal Financial Access by 2020." 54

⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019."

kesejahteraan masyarakat, dan merupakan komponen strategi untuk mencapai tujuan sistem keuangan. Orang-orang yang miskin atau terpinggirkan memiliki akses terbatas ke layanan keuangan. Adapun tujuan inklusif keuangan untuk memungkinkan setiap warga negara mengakses layanan keuangan yang lebih luas, tetapi ada kebutuhan untuk lebih fokus pada masyarakat yang miskin.

- 15 2. Menyediakan layanan, produk dan jasa keuangan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Melalui pelayanan yang holistik holistik, konsep keuangan inklusif harus mampu mengakomodir berbagai tuntutan seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan jasa keuangan. Hambatan yang paling signifikan untuk inklusi keuangan adalah kurangnya pengetahuan keuangan. Informasi ini diperlukan agar individu merasa lebih nyaman saat berhubungan dengan organisasi keuangan.
4. Peningkatan ketersediaan layanan keuangan kepada masyarakat luas. Batasan geografis dan administratif merupakan hambatan paling umum bagi akses masyarakat miskin ke layanan keuangan. Memecahkan masalah akan menjadi langkah maju dalam memperoleh akses layanan keuangan.
- 161 5. Membina kerjasama antar bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin bahwa tidak hanya kantor cabang yang diberdayakan, tetapi juga ada undang-undang yang memungkinkan pelaksanaan jasa keuangan formal. Oleh karena itu, kolaborasi antara bank, lembaga keuangan mikro (LKM), dan lembaga keuangan non-bank sangat penting untuk kelangsungan sistem keuangan..
6. Meningkatkan cakupan jasa keuangan dengan memaksimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi berpotensi menurunkan biaya transaksi dengan memperluas sistem keuangan formal di luar simpan pinjam. Untuk menyeimbangkan luas

dan risiko, norma dan peraturan khusus harus ¹¹ ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, yang dikutip Marginingsih (2021)⁷⁰ inklusi keuangan setidaknya memiliki empat tujuan. Yang *pertama* adalah membuat produk, lembaga, atau layanan keuangan yang mudah diakses masyarakat³. *Kedua*, menyediakan berbagai produk keuangan kepada pelaku usaha jasa keuangan. *Ketiga*, untuk barang atau jasa keuangan yang lebih baik yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan tuntutan sekelompok orang yang lebih besar. *Keempat*, kualitas produk dan layanan keuangan harus ditingkatkan. Dikatakan juga oleh Marginingsih⁷¹ Menurut Bank Indonesia, berikut adalah keuntungan dari inklusi keuangan:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Memastikan bahwa sistem keuangan dalam keadaan baik.
3. Mengurangi penggunaan shadow banking dan sembrono lending.
4. Mendorong pendalaman pasar keuangan
5. Memperluas pe¹³⁶g pasar perbankan.
6. Mendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
7. Memberikan kontribusi yang baik untuk kemakmuran ekonomi jangka panjang.
8. Meminimalisir kekakuan jebakan berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan, sebagai hasilnya, mengurangi kemiskinan.

Dari sisi intensitas, layanan inklusi keuangan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Yang pertama dilakukan dengan menghapus eksklusivitas periode penyediaan modal, yang biasa digunakan oleh organisasi keuangan. Mereka hanya meminjamkan uang bagi pihak-pihak *bankable*. Ini harus

⁷⁰ Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19," *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 56–64.

⁷¹ Ibid.

19 dimaklumi jika kita mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudentality*) bagi sebuah lembaga keuangan. Meskipun prinsip ini biasanya baik, terutama dalam transaksi komersial, bukan tanpa masalah. Dalam batasan konservatisme yang ketat ini, orang yang rendah hati dan miskin selalu dinilai tidak cocok untuk dipuji. Akhirnya, mereka harus terpinggirkan atau diturunkan statusnya menjadi partai non-kapitalis. Namun, dari sisi ekonomi sosial, partai-partai ini membutuhkan uang paling banyak. Baik untuk memperkuat ekonomi keuangan dan untuk memanfaatkan peluang, serta untuk mempromosikan pembangunan.⁷²

Pertama dan terpenting, istilah inklusi keuangan harus dilihat sebagai upaya untuk mengubah paradigma industri 19 dal, yang sering menafikan hak orang-orang *non-bankable* untuk mendapatkan bantuan modal. Kedua, gagasan inklusi keuangan ini memiliki satu tujuan 'untuk memperkenalkan kembali pihak-pihak yang sebelumnya dikecualikan atau dikeluarkan dari lembaga keuangan sebagai pihak yang membutuhkan jasa keuangan.⁷³

Sebuah sistem pelayanan yang komprehensif dapat menawarkan 19 an sejumlah manfaat. *Pertama*, masalah akses, uang kredit secara otomatis akan membuka peluang bisnis baru atau dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah uang yang diinvestasikan dalam perusahaan kecil. *Kedua*, terciptanya jaringan di sektor keuangan formal yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kemudahan dalam berbagai jenis pembiayaan usaha, serta berbagai produk tabungan dan asuransi. *Ketiga*, Kemudahan bagi pe 19 ahaan untuk mengakses pembiayaan dari sektor perbankan formal akan menghambat pertumbuhan kredit di sektor informal, yang biasanya didominasi oleh perantara berbasis biaya. Diperkirakan bahwa memiliki akses ke lembaga keuangan yang mapan dapat membantu masyarakat miskin membayar kembali kredit dengan lebih mudah. *Keempat*, banyak tagihan yang tercatat di lembaga

18
⁷² Nusron Wahid, *Keuangan inklusif: membongkar hegemoni keuangan: peran kredit usaha rakyat dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Inter Cafe IPB dan OJK, 2014).

⁷³ Ibid.

keuangan resmi pada acara-acara yang biasanya digunakan untuk tujuan yang sangat penting, seperti memperoleh berbagai keuntungan pemerintah seperti air bersih, listrik, dan lain-lain. Layanan keuangan, memungkinkan orang miskin menyimpan uang mereka dengan aman di luar rumah mereka, membatasi kekuatan ekonomi segelintir orang. Jasa keuangan telah terbukti menjadi alat litigasi berisiko yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, terutama ketika berhadapan dengan kesulitan khusus.⁷⁴

Hossain juga menyoroti manfaat inklusi keuangan, dia mengklaim bahwa layanan keuangan membantu orang miskin dengan memungkinkan mereka untuk meminjam dan menyimpan uang untuk sekolah, investasi bisnis, pembelian besar, atau masalah kesehatan.⁷⁵

D. Sasaran Inklusi Keuangan

Menurut catatan PBB, kurang lebih tiga miliar jiwa di dunia tak ada akses ke layanan keuangan resmi – seperti rekening bank, kredit, asuransi, wadah aman untuk menyimpan tabungan, cara yang aman dan efisien untuk menerima pembayaran manfaat sosial – melalui lembaga keuangan terdaftar.⁷⁶ Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah masalah global, individu yang dikecualikan secara finansial di negara berkembang lebih sering daripada bukan warga negara biasa. Dalam kerangka pembangunan inklusif yang lebih besar, inklusi keuangan dipandang sebagai alat penting untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mencapai tujuan pembangunan milenium (MDGs⁷⁷).

⁷⁴ Ibid.

106

⁷⁵ Shadiya T Hossain, "Financial Crisis , Inclusion and Economic Development in the US and OIC Countries" (2016). 153

⁷⁶ UN Department of Public dan Information, *Press Conference on best practices for financial inclusion, 30 May., n.d.*, Lihat juga; Michael Chibba, "Financial inclusion, poverty reduction and the millennium development goals," *European Journal of Development Research* (2009).

104 Pemerintah yang tidak efektif mempersulit penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, bencana alam, dan bahkan kelaparan. Secara global, bahkan dunia telah mengakui bahwa pembangunan yang adil, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga, tidak dapat dicapai tanpa kerjasama internasional. Hasilnya, 189 negara anggota PBB mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2000. (MDGs)., Lihat; B. Abeygunawardena, "Millennium Development Goals (MDGs),"

Jim Yong Kim, Presiden Grup Bank Dunia, mengatakan dalam pidatonya pada temu G-20, rekening e-money, kartu debit, dan rekening bank reguler berbiaya rendah, di antara instrumen lainnya, dapat secara signifikan meningkatkan akses keuangan bagi mereka atau kelompok sasaran yang saat ini dikecualikan pada awal tahun 2020.

Menurut GPFI, sasaran paling baik ditetapkan di tingkat global, sedangkan target paling baik ditetapkan di tingkat nasional, karena hal ini memerlukan pertimbangan alokasi sumber daya dan kalibrasi tingkat negara yang cermat. Tujuan global dapat memberikan arah, tetapi target nasional adalah sarana yang dengannya ambisi tujuan diterjemahkan ke dalam hasil praktis. Target dapat memobilisasi orang dengan memberikan perasaan urgensi dan fokus, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas ketika mereka didefinisikan dengan baik, diterbitkan, dan dipantau. Target juga dapat berfungsi sebagai motivator yang kuat bagi pemerintah nasional, mitra pembangunan, dan sektor korporasi untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Kesimpulannya, tujuan memberikan definisi dan konkrit untuk metode dan pernyataan tujuan yang mungkin masih kabur.⁷⁸

Sasaran lain dari inklusi keuangan saat ini adalah penyandang disabilitas. Para disabilitas ini terus menghadapi pengucilan dan diskriminasi di komunitas mereka, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan dan perawatan kesehatan. Bukti memang menunjukkan bahwa promosi pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas bermanfaat bagi semua dalam pembangunan. Untuk memastikan layanan dukungan yang inklusif dan diperlukan bagi penyandang disabilitas (termasuk perlindungan sosial yang ditujukan untuk inklusi penuh penyandang disabilitas), agenda pembangunan penting untuk mengenali dan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam

¹¹³bro, no. October (2000): 1, http://www.48o.int/topics/millennium_development_goals/about/en/, ⁶²

⁷⁸ Global, Partnership for Financial, dan Inclusion (GPFI), "Financial Inclusion Targets and Goals: Landscape and Gpfi View a Note to the Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)," *October*, no. October (2013): 17, https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/Financial_Inclusion_Targets_and_Goals.pdf.

pembangunan. Ini termasuk pembiayaan yang memadai untuk layanan dan dukungan yang relevan dengan disabilitas.⁷⁹

Layanan lembaga keuangan bank maupun non bank hingga kini sebanyak 2,5 miliar – lebih dari separuh orang dewasa yang bekerja di dunia – tidak termasuk dalam layanan keuangan. Ini paling akut di antara populasi berpenghasilan rendah di negara berkembang dan ekonomi berkembang, di mana sekitar 80% orang miskin dikecualikan. Akses ke aset keuangan dan sosial merupakan faktor kunci untuk membantu kaum muda membuat keputusan ekonomi mereka sendiri dan keluar dari kemiskinan. Menyediakan layanan keuangan bagi kaum muda—apakah tempat yang aman untuk menabung atau pinjaman terstruktur yang tepat untuk investasi di perusahaan atau pendidikan dapat mempromosikan kewirausahaan dan pembangunan aset, dan menekankan mata pencaharian yang berkelanjutan. Komponen keuangan sangat efektif bagi kaum muda ketika dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan, serta peluang bimbingan.

E. Indikator Inklusi Keuangan

1. Indikator Inklusi Keuangan Sarma, Pais, dan Gupta

Menurut Sarma dan Pais⁸⁰, Gupte et.al⁸¹, Dimensi ketersediaan ditunjukkan oleh jumlah outlet bank per 1000 penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 penduduk, dan dimensi penggunaan ditunjukkan oleh rasio volume dua layanan sistem perbankan dasar, yaitu kredit dan deposito dari proporsi seluruh penduduk dewasa terhadap nilai PDB. Pendapatan kelas menengah yang rendah menunjukkan IFI yang rendah, sedangkan sebagian besar negara berpenghasilan tinggi memiliki IFI yang tinggi.⁸²

⁷⁹ Affairs dan P³⁰y, *Financial Inclusion*.

⁸⁰ Mandira dan Jesim Pais, "Financial Inclusion and Development: A Cross Count²¹ analysis Mandira."

⁸¹ Rajani Gupte, Bhama Venkataramani, dan Deepa Gupta, "Computation of Financial Inclusion Index for India," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (2012).

⁸² Sarma, *Index of Financial Inclusion*.

4
Tabel 1.1. Keuangan Inklusif Menurut Sarma

Dimensi	4 Definisi Dimensi	Indikator
Penetrasi perbankan	Proporsi populasi yang memiliki rekening di Bank	Jumlah rekening bank komersial yang disimpan per 1000 orang dewasa
Ketersediaan Jasa Keuangan	4 Jumlah outlet (jaringan kantor) atau jumlah ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>)	Jumlah outlet (termasuk kantor, cabang, dan ATM) per 100.000 orang dewasa
Penggunaan	Kredit, deposit, pengiriman uang, transfer, dan pembayaran adalah contoh dari jasa keuangan.	Proporsi total pinjaman dan simpanan yang dibuat oleh konsumen dan kalangan bisnis terhadap PDB.

a. Penetrasi Perbankan

Menurut World Bank, akses ke layanan keuangan dinilai dari jumlah perorang, bisnis, rumahtangga, bisnis **24**g menabung, memperoleh kredit, membayar, serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan lainnya baik dari lembaga keuangan resmi atau non resmi. Akses layanan keuangan masyarakat merupakan indikator terbaik, seperti berapa banyak individu yang menggunakan rekening tabungan dan berapa banyak individu menggunakan lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman. Tapi, tak semua negara, terutama yang memiliki keuangan mikro dan lembaga keuangan informal, memiliki data yang lengkap. Indikator yang paling relevan untuk digunakan untuk mengukur akses ke layanan tabungan adalah jumlah rekening yang disimpan per 1000 orang dewasa.

Jumlah rekening ditentukan oleh kepemilikan akun, penggunaan akun, dan penetrasi akun keuangan yang merupakan metrik dan dapat digunakan untuk menilai inklusi keuangan. Tabel 1 menggambarkan penetrasi neraca keuangan negara-negara ASEAN sebagai persentase dari total penduduk dewasa.

Table 1.2
Penetrasi akun keuangan (% dari total populasi orang dewasa)

Malaysia	Singapura	Indonesia	Thailand	Philippines	Laos	Vietnam	Myanmar	PDR	Cambodia	Brunei
85%	98%	49%	82%	34%	29%	31%	22%	26%	NA	

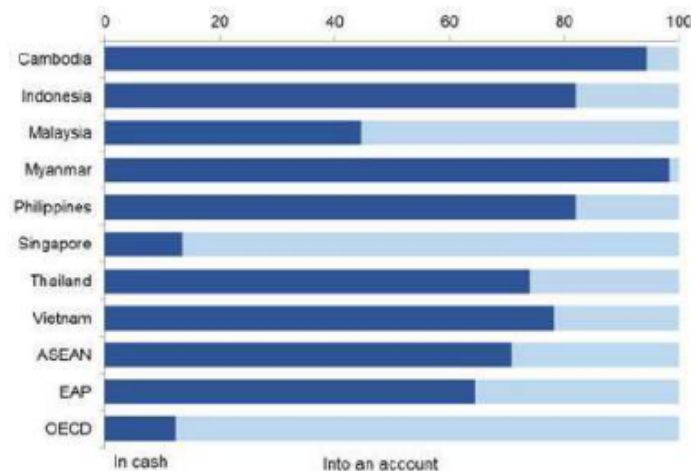
Sumber: Global Findex (2017), Bank Dunia.

(Data tidak tersedia untuk Brunei).

Tabel di atas menunjukkan tingkat kepemilikan akun yang lebih rendah. Jika dilihat, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei telah mencapai inklusi keuangan yang hampir universal, negara-negara lain di ASEAN menghadapi berbagai tantangan.⁸³ Dari Tabel 1, Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki penetrasi rekening keuangan lebih dari 75% sedangkan ASEAN lainnya berkisar antara 22% hingga 34%, yang berarti setidaknya dua pertiga dari populasi mereka tidak memiliki rekening bank.

Gaji umumnya dibayar tunai. Hanya 29% pekerja mengatakan mereka dibayar bulanan melalui rekening bank, sementara 71% mengatakan mereka dibayar tunai, yang bermasalah bagi perusahaan dan karyawan.

Membayar gaji pekerja ke rekening bank mereka lebih aman dan membantu mereka membuat riwayat kredit, yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan layanan tambahan seperti kredit konsumen, hipotek, pinjaman sekolah, dan asuransi.



Grafik 3 menunjukkan Singapura memimpin dengan kurang dari 20% orang dewasa menerima upah tunai, diikuti oleh Malaysia dengan kurang dari 50%, dan sisa ASEAN dengan lebih dari 70%. (tidak ada data tentang 137 tunei). Singapura setara dengan 35 anggota 'The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)'. Secara keseluruhan, ASEAN memiliki persentase orang dewasa yang memperoleh upah tunai lebih besar, lebih dari 75%, dibandingkan Asia Timur Pasifik, sekitar 65%.

Ketika ekonomi berkembang dan lebih banyak orang memasuki kelas menengah, permintaan akan layanan keuangan akan meningkat. Digitalisasi semua pembayaran pemerintah adalah salah satu langkah awal untuk mempercepat inklusi keuangan (upah, transfer sosial, dan pembayaran kepada pemasok). Langkah ini saja akan membawa jutaan individu di negara-negara ASEAN ke dalam sistem perbankan resmi.⁸⁴

Formalisasi aliran remitansi adalah pilihan kedua. Sebagian besar pengiriman uang domestik di negara-negara ASEAN masih dilakukan secara tunai. Tujuannya adalah untuk mengarahkan lebih banyak transaksi pengiriman uang melalui lembaga perbankan, operator pengiriman uang, atau operasi telepon seluler, sehingga

⁸⁴ Ibid.

52% individu yang melaporkan mengirim pengiriman uang tunai beralih ke metode yang lebih aman dan lebih hemat biaya di negara asal mereka.⁸⁵

Sementara itu mengusulkan indikator-indikator berikut berdasarkan temuan lokakarya di Malaysia: Mempromosikan pengukuran inklusi keuangan; menelan data perkembangan keuangan; mengukur akses dan penggunaan jasa keuangan; langkah-langkah inklusi keuangan alternatif, seperti akses UKM ke keuangan; indikator literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan pengembangan masyarakat; dan mengembangkan indikator inklusi keuangan gabungan. Fisher mengemukakan beberapa indikator yang diangkat dari hasil lokakarya di Malaysia⁸⁶, sebagai berikut:

- Mempromosikan pengukuran inklusi keuangan;
- Menelan data perkembangan keuangan;
- Mengukur akses dan penggunaan jasa keuangan;
- Langkah-langkah inklusi keuangan alternatif, termasuk akses UKM ke keuangan;
- Indikator literasi keuangan, perlindungan konsumen dan pengembangan masyarakat; dan
- Pengembangan indikator inklusi keuangan gabungan.

2. Indikator Inklusi Keuangan di Indonesia

Untuk menentukan sejauh mana pertumbuhan aktivitas keuangan memerlukan penggunaan metrik kinerja. Tolak ukur kemajuan sebuah negara terukur melalui indikator dalam mengembangkan inklusi keuangan dapat ditemukan di berbagai sumber.⁸⁷

- **Ketersediaan / akses** : Dalam hal aksesibilitas fisik dan biaya, mengukur kapasitas untuk menggunakan layanan keuangan formal.
- **Penggunaan** : Menentukan bagaimana produk dan layanan keuangan benar-benar digunakan (frekuensi, keteraturan, dan durasi menggunakan).

⁸⁵ 48

⁸⁶ Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics, *Financial Indicators*, *IFC Bulletin* (Kuala Lumpur, 2012), <https://www12.org/ifc/publ/ifcb38.pdf>.

⁸⁷ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. "Booklet Keuangan Inklusif", 14. Lihat,

- **Kualitas** : Menentukan fitur produk dan layanan keuangan apakah sudah sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen.

Tabel 1.3 Keuangan Inklusif Bank Indonesia

Dimensi	Definisi Dimensi	Indikator
Access / availability (access)	Dari segi keterjangkauan fisik dan finansial, kemampuan mengakses layanan keuangan formal	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kantor layanan keuangan resmi per 100.000 penduduk dewasa. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 penduduk dewasa. Jumlah agen jasa keuangan per 100.000 (seratus ribu) orang dewasa.
Penggunaan	Menilai penggunaan nyata dari jasa dan barang keuangan	<ol style="list-style-type: none"> sebuah. Jumlah rekening tabungan lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk; Jumlah rekening kredit lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) orang dewasa; Jumlah rekening uang elektronik yang terdaftar pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD); Persentase kredit/pembiayaan UMKM pada

		<p>lembaga⁴ keuangan formal terhadap total kredit/pembiayaan pada lembaga keuangan formal;</p> <p>e. Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) orang dewasa;</p> <p>f. Persentase kenaikan jumlah lahan bersertifikat; dan</p> <p>g. Jumlah konsumen nontunai bansos.</p>
Quality	Mengukur besarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa keuangan	<p>a. indeks literasi/pengetahuan keuangan;</p> <p>b. Jumlah pengaduan jasa keuangan; dan</p> <p>c. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.</p>

Sumber: Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2016 tentang SNKI⁸⁸

107

Infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan publik yang memungkinkan akses ke lembaga keuangan formal, produk, dan layanan dikenal sebagai akses.

- 1) Jaringan kantor ditambahkan;
- 2) Agen ditambahkan;
- 3) ATM ditambahkan;
- 4) Tambah access point layanan digital;
- 5) Menyiapkan fasilitas non perkantoran;

55

⁸⁸ Bank Indonesia. "Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat Atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah" (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), 6-7.

- 6) Tambahan kerjasama dengan pihak lain merupakan contoh perluasan akses keuangan;
- 7) Pengembangan jaringan pengiriman atau distribusi jasa dan produk keuangan.¹
- 8) Tersedianya layanan, produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap jenis layanan dapat memperoleh manfaat dari layanan, produk dan jasa keuangan yang disesuaikan dengan keinginan spesifiknya.

Guna mengukur sampai dimana upaya keuangan inklusif telah berkembang, dibutuhkan metrik kinerja oleh Financial Inclusion Index (IFI). IFI dapat memasukkan data pada banyak aspek sistem keuangan inklusif sebagaimana indikatornya, seperti Access / availability, usage, dan quality, dari layanan bank.⁸⁹

Di sisi lain, Bank Sentral Indonesia memiliki Indeks Inklusi Keuangan (IKI) sebagai indeks multidimensi berdasarkan data makroekonomi untuk mengukur inklusi keuangan, khususnya di sektor perbankan yang berbeda layanannya. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya Bank Indonesia untuk menggabungkan berbagai indikator sektor perbankan sehingga IKI pada akhirnya dapat mengintegrasikan beberapa informasi di berbagai bagian sistem keuangan inklusif, terutama akses, penggunaan, dan kualitas layanan perbankan. Dimensi availability adalah metrik untuk menentukan kapasitas seseorang untuk menggunakan layanan keuangan formal, sebagaimana dibuktikan oleh frekuensi tantangan guna mendapatkan serta memelihara rekening, seperti harga atau aksesibilitas fisik (ATM, kantor bank, dll.). (1) jumlah cabang bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah cabang bank per 1.000 km²; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km² semuanya dihitung dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi akses.⁹⁰

⁸⁹ (Bank Indonesia, 2013)

⁹⁰ OJK, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017):

Dimensi penggunaan, yang terdiri dari frekuensi, keteraturan, dan lama penggunaan, digunakan untuk 57 nilai penggunaan aktual barang dan jasa keuangan. (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1.000 penduduk dewasa, meliputi deposito, giro, dan tabungan; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi akses. Sedangkan dimensi kualitas digunakan untuk menguji apakah fitur produk dan layanan tersedia untuk memenuhi harapan konsumen.⁹¹

Pengukuran dimensi ini masih sulit, dan berbagai lembaga internasional yang peduli dengan pertumbuhan inklusi keuangan secara aktif bekerja pada indikator dan instrumen yang berkualitas. Alliance Financial Inclusion telah menyepakati seperangkat kriteria untuk menghasilkan indikator dimensi kualitas, yang mencakup kekhususan, kesederhanaan, peningkatan, dan perspektif klien.⁹²

Sementara itu, indeks inklusi keuangan yang dihitung menggunakan pendekatan PCA terdiri dari tiga indikator: penetrasi, indikator, dan penggunaan. Penanda ini telah sering digunakan dalam penyelidikan empiris sebelumnya. Sedangkan enam indikator kelembagaan dipilih dari World Governance Indicators (WGIs) Bank Dunia untuk membuat indeks komposit yang mewakili indeks kelembagaan.

⁹¹ Ibid. 11

⁹² Bank Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa, Bagaimana, dan Siapa dalam

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/kualitas/contents/default.aspx>, akses 12 Nopember 2019.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN

A. Sejarah Inklusi Keuangan

Industri keuangan mikro memulihkan kekuatan awalnya pada tahun 1970-an. Ini sebagian besar dipicu oleh peristiwa penting di India, Bangladesh, dan Brasil. Ketiga negara ini memberikan kredit kepada orang-orang miskin, khususnya perempuan.

Dalam hal sejarah inklusi keuangan, Chakrabarty mengklaim bahwa sejarah India lebih tua dari negara lain. Nasionalisasi bank, skema bank utama, merger bank kredit regional, metode area layanan, dan pengembangan organisasi swadaya adalah semua tindakan yang bertujuan untuk memungkinkan bank melayani seluruh penduduk. Dari tahun 1969 hingga 2012, ini menghasilkan pertumbuhan sepuluh kali lipat dalam jumlah bank di India, sehingga totalnya menjadi 99.000.

Akibatnya, menurut Chakrabarty, inklusi keuangan sangat penting untuk membangun budaya menabung, memperluas ketersediaan pinjaman untuk konsumsi dan bisnis, memungkinkan metode membayar yang efisien. Data empiris memperlihatkan negara-negara yang berpenduduk besar memiliki availability terbatas ke sektor lembaga keuangan resmi, serta tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang lebih besar. Inklusi keuangan, menurut Chakrabarty, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan, dan perbankan adalah pendorong utama inklusi keuangan.⁹³

Vikram Akula memelopori inklusi keuangan di India pada tahun 1997 melalui inklusi keuangan terbatas, juga dikenal sebagai Swaya Krishi Sangam (SKS Society), sebuah LSM nirlaba atau keuangan mikro SKS Limited. Pembiayaan non-perbankan adalah bisnis perusahaan (NBFC). Reserve Bank of India kemudian memberikan perusahaan lisensi (RBI). Tujuan utama perusahaan BFIL adalah untuk

⁹³ Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty, "Financial Inclusion and Bank: Issues and Perspectives" *RBI Bulletin* (India, 2011).

memberikan layanan keuangan kepada orang-orang yang kurang beruntung di 17 negara bagian India.

Karena perubahan keadaan di India, Keuangan Mikro SKS telah dikenal sebagai Bharat Financial Inclusion Ltd (BFIL) sejak 2016. Keuangan mikro SKS menyediakan asuransi jiwa dan berbagai pinjaman keuangan, termasuk pinjaman jangka menengah dan panjang, pinjaman untuk pembelian kompor masak, lampu surya, pembersih udara, telepon seluler, sepeda, dan mesin jahit, dan pinjaman yang dijamin dengan perhiasan emas. Perempuan di desa juga menjadi sasaran kredit keuangan mikro ini, yang memberi mereka bantuan keuangan mandiri untuk mendukung bisnis mereka dengan perusahaan, seperti memelihara ternak, menjalankan toko eceran kecil, dan berbagai perdagangan dan jasa lainnya. Selain itu, pinjaman keuangan tersedia bagi laki-laki untuk pengeluaran pernikahan dan pembelian benih.⁹⁴

Perusahaan SKS melakukan studi desa untuk menentukan apakah desa sesuai untuk pinjaman keuangan mikro. Survei tersebut mengidentifikasi karakteristik lokal seperti tingkat kemiskinan, populasi, stabilitas politik, aksesibilitas jalan, dan sumber mata pencaharian. Jika desa terpilih, pengurus SKS akan menginformasikan kepada masyarakat tentang tujuan, layanan, dan pendekatan organisasi. Setelah itu, kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima puluh orang dibuat, serta penjamin satu sama lain. Setelah pembuatan kelompok, staf SKS mengumpulkan data kuantitatif pada setiap anggota kelompok untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi standar, serta mendokumentasikan informasi dasar untuk studi masa depan. Jika sesuai standar, pelatihan penggunaan setiap transaksi keuangan dilanjutkan, dan inklusi keuangan ditindaklanjuti.⁹⁵

Muhammad Yunus mendukung upaya Vikram Akula untuk memberikan inklusi keuangan kepada masyarakat kurang mampu di India melalui lembaga keuangan mikro. Namun, cara mereka memperlakukan orang miskin adalah perbedaan utama di antara keduanya. Bagi Vikram Akula,

⁹⁴ Ibid., 3.

⁹⁵ Ibid.

fungsi institusi lebih penting daripada keterlibatan orang miskin, dan programnya mencakup laki-laki, sedangkan Yunus hanya berkonsentrasi pada perempuan miskin yang tinggal bersamanya sejak 2016, dan melalui Grameen Bank-nya telah berhasil mengentaskan kemiskinan. di Bangladesh. Grameen Bank sekarang memiliki 8.300.000 peminjam, dengan 97 persen di antaranya adalah perempuan. Bank membiayai sendiri dan tidak meminjam uang dari sumber luar. Orang harus menyimpan uang di bank, yang kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman sederhana kepada orang miskin, dengan tingkat pemulihan 97 persen. Yunus kemudian diberi Hadiah Nobel Perdamaian sebagai pengakuan atas upaya kemanusiaannya. Yunus juga mengkritik kebijakan SKS Vikram Akula yang mengoptimalkan keuntungan Bank dengan mengorbankan orang miskin. “, jelasnya “Ini dari sisi keuangan, dari sudut pandang memaksimalkan keuntungan, dan saya menentangnya. Saya tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka melakukannya, tetapi saya akan mengadvokasi skema kredit mikro yang sah.” Menurut Yunus, orang miskin tidak boleh digunakan untuk menghasilkan uang bagi bank. Ini disebut bisnis sosial jika itu dilakukan. Akibatnya, gagasan Bank Grameen Muhammad Yunus tentang inklusi keuangan berbeda dari bank keuangan mikro lainnya karena pinjaman diberikan tanpa agunan kepada kaum wanita di daerah pedesaan yang bergabung dengan program pemberdayaan wanita Grameen Bank dilatih dan dibina dengan tepat untuk memberdayakan keluarga mereka.⁹⁶

74

⁹⁶ Ika Yunia Fauzi, “Membangun Ekonomi Pedesaan dengan *Financial Inclusion* Melalui Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02 (April 2015), 184. Lihat Abul Bashir Bhuiyan, et.al, “Microcredit Impact on Children’s Education and Women Empowerment: A Review Experience of Grameen Bank Microfinance Schemes in Bangladesh”, *Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology* (January 2013), h. 66-71. Lihat Lex Loro, “Women’s Empowerment as a Result of Microcredit Loans in Bangladesh?”, *Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS)*, (18 September 2013), 1-12. Lihat Nazaruddin Malik, Sri Budi Cantika Yuli, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, “Optimization of Waste Management Through Women’s Empowerment”, *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 02 No. 01 (June 2018), 37-46. Lihat juga Meltem

Konsep Yunus serupa dengan Global Financial Development Report, yang menyatakan bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan keuangan yang tersedia dengan meminimalkan kehadiran orang-orang yang tidak menyadari manfaat keuangan. akses melalui akses murah.⁹⁷

1. Inklusi Keuangan dan Inisiatif Internasional

a. Negara-negara G-20

Menurut definisi mereka, inklusi keuangan adalah salah satu pilar paling kritis dari pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di antara negara-negara anggota G-20. Pada bulan September 2009, KTT Pittsburgh berjanji untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan keuangan dan untuk mendukung langkah-langkah untuk mempromosikan perbankan yang aman dan dapat diakses, termasuk bantuan keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

G-20 telah membentuk Kelompok Ahli Inklusi Keuangan G-20, yang akan mengidentifikasi pendekatan inovatif untuk menyediakan akses keuangan dan mendorong peraturan, kebijakan, dan standar di bidang inklusi keuangan, literasi keuangan, perlindungan konsumen, bekerja sama dengan 'Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)', International Finance Corporation (IFC), dan organisasi internasional lainnya.⁹⁸

Para pemimpin G-20 bertemu lagi di Toronto pada Juni 2010 dan menyepakati sembilan prinsip

25

Onay, Bugra Ozer, "Entrepreneurship, Empowerment and the Impact of the Dimension of Female Identity on the Women Involved in Microcredit Financing Schemes: An Empirical Investigation in Izmir Metropolitan Region", *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, Vol 3, No.2 (2011), 295-306

⁹⁷The World Bank, *Financial Inclusion*, Global Financial Development Report, International Bank for Reconstruction and Development (October 2014), 256

⁹⁸Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Keuangan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 92.

inklusi keuangan kreatif (Prinsip G20 untuk Inklusi Keuangan Inovatif), yang akan menjadi dasar untuk menciptakan langkah-langkah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke keuangan. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan mereka. Berikut ini adalah sembilan prinsip tersebut:

- 1) Kepemimpinan pemerintah, yaitu meningkatkan komitmen pemerintah terhadap inklusi keuangan sebagai sarana pengentasan kemiskinan.
- 2) Diversifikasi, yang mencakup kebijakan yang mendorong persaingan dan memberikan insentif berbasis pasar untuk akses keuangan jangka panjang, serta penggunaan berbagai layanan keuangan berbiaya rendah dan beragam.
- 3) Inovasi, dengan penekanan pada inovasi teknologi dan kelembagaan, sebagai sarana untuk meningkatkan akses dan penggunaan produk keuangan, terutama melalui penyelesaian kekurangan infrastruktur.
- 4) Perlindungan konsumen, yang mendorong pemerintah, penyedia jasa keuangan, dan nasabah untuk bekerja sama menjaga konsumen.
- 5) Pemberdayaan, termasuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan pengetahuan keuangan.
- 6) Kolaborasi (collaboration), yang meliputi pembentukan lembaga pemerintah dengan peran dan koordinasi yang jelas, serta mendukung dialog dan kemitraan langsung dengan pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
- 7) Literasi, data dan informasi yang kuat dalam pembentukan regulasi, pengukuran kemajuan, dan regulator dan penyedia layanan keuangan menggunakan metode "uji dan pelajari".
- 8) Proporsionalitas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan unsur risiko dan imbalan dari inovasi produk dan layanan keuangan secara proporsional, serta

didasarkan pada ketidakadilan dan hambatan dalam aturan yang ada.

- 9) Kerangka tersebut mempertimbangkan ukuran nasional, internasional, dan pasar kompetitif dalam kerangka peraturan, termasuk rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Teroris (APU/PPT), penggunaan agen untuk melayani konsumen, peraturan untuk menyimpan nilai uang secara elektronik, dan insentif berbasis pasar untuk mencapai tujuan jangka panjang.⁹⁹

b. World Bank

Setelah itu, Bank Dunia membentuk CGAP, kerjasama dari 34 organisasi yang besar untuk memperluas keuangan inklusif. Melalui riset dan keaktifan penyedia layanan keuangan, pembuat regulasi, dan pendonor, CGAP menciptakan solusi baru. CGAP mengambil pendekatan pragmatis untuk pengembangan pasar keuangan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan keuangan dan meningkatkan kehidupan mereka. Tujuan CGAP adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dengan mempromosikan pasar keuangan yang etis, berkelanjutan, dan inklusif melalui inovasi dan peningkatan pengetahuan dan solusi.¹⁰⁰

c. Alliance for Financial Inclusion (AFI)

AFI, yang dibentuk pada tahun 2008, adalah organisasi global untuk pembuat kebijakan yang tertarik pada inklusi keuangan. Setiap tahun, keanggotaan AFI bertambah, dan saat ini menjadi organisasi pembuat kebijakan terbesar di dunia yang berfokus pada inklusi keuangan di negara-negara berkembang. Lebih dari 90 bank sentral negara berkembang dan otoritas keuangan lainnya adalah anggota AFI dan fasilitas dan sumberdaya disediakan

⁹⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Keuangan Indonesia*, 93-94.

¹⁰⁰ Ibid.

AFI bagi para anggotanya untuk layanan keuangan masyarakat miskin. Tujuan AFI adalah untuk menyediakan berbagai kegiatan terkait inklusi keuangan, termasuk sebagai program keanggotaan, kelompok kerja, hibah, dan forum pertukaran sejawat seperti Forum Kebijakan Global tahunan. Pendekatan pembelajaran *peer-to-peer* AFI mendorong dan memfasilitasi interaksi pembuat kebijakan keuangan dan berbagi pengalaman dalam memperluas akses publik ke layanan keuangan.¹⁰¹

B. Perkembangan Inklusi Keuangan di Dunia

Inklusi keuangan adalah komponen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sekaligus mencapai tujuan pembangunan jangka panjang (SDGs). Inklusi keuangan adalah proses entitas institusional arus utama yang menyediakan barang dan jasa keuangan yang memadai bagi kelompok rentan, miskin, berpenghasilan rendah, dengan biaya yang dapat diakses menggunakan cara adil dan terbuka. Menurut Sarma dan Pais, inklusi keuangan “suatu proses yang menjamin kemudahan aksesibilitas, ketersediaan, dan tentunya menggunakan layanan keuangan resmi”.¹⁰² Ini merupakan kondisi dimana semua anggota masyarakat mempunyai akses penuh ke layanan produk dan jasa keuangan terjangkau dan nyaman. Keuangan inklusif menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, meningkatkan keterjangkauan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰³ Sementara Sifat-sifat pribadi, ciri-ciri masyarakat, kelemahan makroekonomi dan infrastruktur, keterbatasan kelembagaan, dan hambatan yang muncul dari operasi perbankan adalah

¹⁰¹ Il 39 95

¹⁰² Mandira Sarma dan Jesim Pais, “Financial Inclusion and Development,” *Journal of International Development* (2011). 94

¹⁰³ Yen Hai Dang Nguyen dan Dao HA Thieu Thi, “The Effect of Institutional Quality on Financial Inclusion in ASEAN Countries,” *Journal of Asian Finance* 8, no. 8 (2021): 421–0431.

semua elemen yang menyulitkan untuk mendapatkan dan menggunakan layanan keuangan.¹⁰⁴

Untuk mengakses layanan keuangan, masyarakat diharapkan memiliki literatur tentang inklusi keuangan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi inklusi keuangan di seluruh negara:

- (1) Faktor struktural, yang terkait dengan biaya penyediaan layanan keuangan kepada warga negara; dan
- (2) Faktor terkait kebijakan, yang terkait dengan penciptaan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan inklusi keuangan.¹⁰⁵

Untuk mengetahui perbandingan akses layanan inklusi keuangan di dunia, maka dapat dipaparkan index inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh World Bank, The Global Findex Database 2014, seperti tergambar pada grafik 2.1.



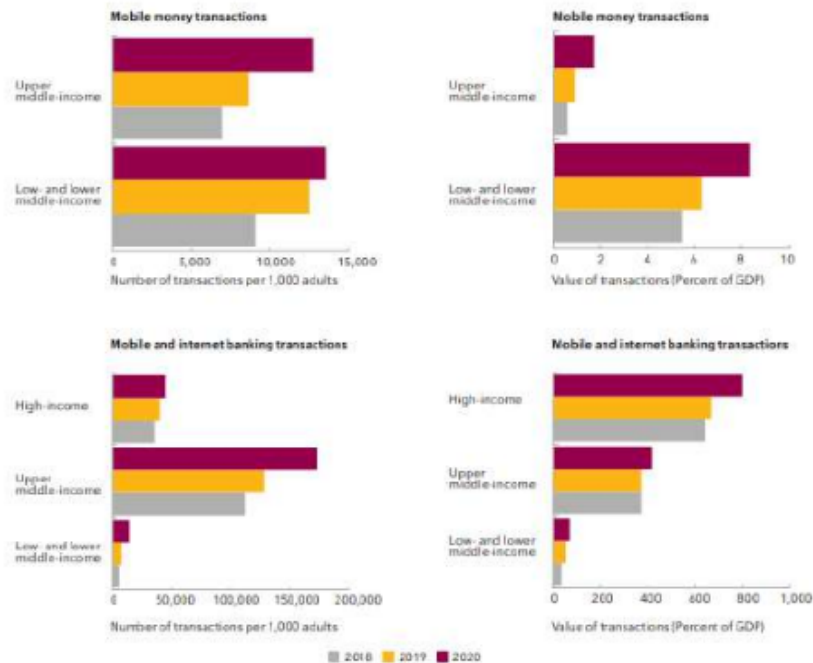
Berdasarkan survei Bank Dunia dalam The Global Findex Database 2014, 62 persen penduduk dunia memiliki rekening, meningkat dari 51 persen pada 2011. Selanjutnya, untuk Indonesia, 36,1 persen orang dewasa pada 2014 sudah

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

mempunyai rekening, 35,9 persen di lembaga keuangan dan 0,4 persen rekening uang elektronik yang dapat diakses menggunakan telepon seluler. Jika dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, tingkat keuangan inklusif Indonesia relatif tinggi, tapi masih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia.

Di tahun 2020 layanan keuangan mengalami kenaikan luar biasa karena dampak digital. Hasil survei Financial Access Survey (FAS) menunjukkan ekspansi yang cukup besar dalam penggunaan layanan keuangan digital selama pandemi, sementara penggunaan layanan keuangan tradisional tetap stabil. Penggunaan layanan keuangan digital berkembang pesat selama pandemi. Penggunaan layanan keuangan digital telah didukung oleh social distancing dan lockdown, seperti yang terlihat dari data FAS terbaru. Penggunaan uang seluler berkembang pada negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan nilai transaksi uang seluler sebagai persentase dari PDB meningkat rata-rata 2 poin persentasenya pada tahun 2020. Volume dan nilai transaksi mobile dan internet banking meningkat di semua kelompok, dimana masyarakat ekonomi berpenghasilan menengah ke atas dan berpenghasilan tinggi mengalami kenaikan pendapatan paling tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dalam grafik 2.2.



Grafik 2.2. Uang Seluler, Transaksi Perbankan dan Internet

Penggunaan layanan keuangan tradisional secara umum tetap stabil. Data gabungan menunjukkan bahwa aksesibility dan penggunaan layanan produk dan jasa keuangan di bank komersial secara umum tetap stabil untuk negara-negara di semua kelompok pendapatan pada tahun 2020. Ini bisa menjadi hasil dari langkah-langkah kebijakan yang diterapkan untuk mendukung individu dan perusahaan selama pandemi. Namun, di beberapa negara, termasuk beberapa negara rapuh dan terkena dampak konflik, indikator penggunaan layanan keuangan (terutama yang terkait dengan pinjaman) turun pada tahun 2020. Data lembaga keuangan mikro-yang merupakan penyedia layanan keuangan utama bagi kelompok yang lebih rentan termasuk perempuan-juga menunjukkan beberapa pembalikan.

Pinjaman UKM yang beredar sebagian besar tetap stabil untuk banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. UKM merupakan pusat kegiatan ekonomi banyak negara dan beberapa pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mendukung mereka. Pelacak Kebijakan COVID-19 Akses Keuangan IMF menunjukkan bahwa bantuan keuangan dalam bentuk hibah telah menjadi langkah kebijakan UKM yang paling banyak digunakan selama pandemi, diikuti oleh jaminan publik atas pinjaman, moratorium pinjaman, keringanan pajak, dan suku bunga rendah. Banyak yurisdiksi mencatat sedikit perubahan atau peningkatan pinjaman kepada UKM oleh bank umum pada tahun 2020, berpotensi karena efektivitas langkah-langkah kebijakan ini, meskipun beberapa kasus di mana pinjaman UKM menurun.

Hasil beragam untuk akses perempuan ke dan penggunaan layanan keuangan. Data terpilah gender FAS terbaru menunjukkan hasil yang beragam dalam hal inklusi keuangan perempuan. Simpanan dan pinjaman milik perempuan di bank komersial tetap stabil atau bahkan meningkat di beberapa negara. Hasil ini mungkin sebagian disebabkan oleh langkah-langkah sensitif gender yang diambil untuk mendukung akses keuangan perempuan selama pandemi. Namun, jumlah peminjam perempuan per 1.000 perempuan dewasa turun di beberapa negara dan, dalam beberapa kasus, keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya terbalik pada tahun 2020. Rata-rata, sebagian besar indikator menunjukkan kesenjangan gender yang tidak berubah dalam akses keuangan selama pandemi, tetapi mengingat kesenjangan gender yang sudah ada sebelumnya, memajukan akses keuangan perempuan di ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah tetap menjadi tantangan.

Pada Oktober 2021, 165 yurisdiksi telah mengirimkan data ke FAS. Jumlah yurisdiksi yang melaporkan data terpilah gender meningkat menjadi 71-meningkat sepuluh persen dari

putaran sebelumnya. Jumlah pelapor uang seluler juga tumbuh menjadi 83-kira-kira 90 persen negara dengan layanan uang seluler langsung.

Dengan melakukan inovasi pembangunan infrastruktur keuangan dan peningkatan kualitas institusi, negara-negara ASEAN dapat mempercepat inklusi keuangan. Menurut Loo, strategi meliputi penyediaan infrastruktur perbankan, pengendalian korupsi, dan pemantauan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang beruntung.¹⁰⁶ Namun, negara-negara ASEAN terus memiliki kualitas kelembagaan yang buruk. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa inklusi keuangan di negara-negara ini tetap rendah.

Selain kelembagaan yang buruk, Akudugu dkk, menyatakan Aturan yang tidak tepat dalam memperoleh uang dapat menghambat inklusi keuangan di suatu negara. Hal ini dapat membuat publik di pedesaan, enggan bergabung dalam sistem keuangan formal.¹⁰⁷ Lebih lanjut, Nkoa dan Song¹⁰⁸, menemukan bahwa inklusi keuangan berkualitas memiliki dampak signifikan di tingkat makro, dan kepercayaan pada institusi keuangan adalah pendorong inklusi keuangan.¹⁰⁹

C. Inklusi Keuangan Indonesia, Sejak Kapan?

Padahal, dalam hal indikator dan proses untuk mendorong inklusi keuangan, Indonesia telah melakukannya sejak tahun 1970-an, ketika Bank Rakyat Indonesia meluncurkan kampanye Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Berjangka (Taska). Hal ini dilakukan BRI untuk meningkatkan

52

¹⁰⁶ Mark Kam Loon Loo, "Enhancing Financial Inclusion in ASEAN: Identifying the Best Growth Markets for Fintech," *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 4 (2019): 181.

¹⁰⁷ Mamudu A. Akudugu, Irene S. Egyir, dan Akwasi Mensah-Bonsu, "Women farmers' access to credit from rural banks in Ghana," *Agricultural Finance Review* 69, no. 3 (2009): 284–299.

¹⁰⁸ Bruno Emmanuel Ongo Nkoa dan Jacques Simon Song, "Does institutional quality affect financial inclusion in Africa? A panel data analysis," *Economic Systems* 90 no. 4 (2020): 100836

¹⁰⁹ Xiaoyan Xu, "Trust and financial inclusion: A cross-country study," *Finance Research Letters* 35 (2020): 101310

keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sekaligus mengurangi beban pemerintah. Tabanas adalah jenis rekening tabungan yang disimpan oleh bank yang ditunjuk pemerintah yang, secara teori, tidak dibatasi oleh waktu, jumlah yang disimpan, atau penarikan. Tabanas dan Taska pertama kali diluncurkan pada 2 Agustus 1971, dalam acara Gerakan Menabung Nasional (GTN). Upaya tabungan nasional ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengangguran dari masyarakat untuk mendukung pembangunan sekaligus menanamkan kesadaran dan kebiasaan menabung.¹¹⁰

Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan dunia perbankan meluncurkan kampanye nasional "Come to the Bank" pada tahun 2008. Tujuannya adalah untuk menyajikan barang dan jasa perbankan, serta fitur-fiturnya, seperti keuntungan, risiko, biaya, hak, dan tanggung jawab, serta peran intermediasi perbankan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlunya memperhatikan 3P sebelum membeli barang dan jasa perbankan, Bank Indonesia memulai kampanye kesadaran masyarakat pada tahun 2009. Pastikan Manfaat, Pastikan Risiko, dan Pastikan Biaya adalah tiga Ps. Gerakan Menabung Indonesia (GIM) didirikan pada Februari 2010, bersamaan dengan produk TabunganKU. Merupakan produk tabungan perorangan penduduk Indonesia dengan kondisi sederhana dan mudah yang ditawarkan bank-bank di Indonesia dalam rangka mendorong tradisi menabung untuk kesejahteraan masyarakat.¹¹¹

Di sisi lain, baik berbasis perbankan, tradisional, regional, maupun koperasi, pertumbuhan praktik keuangan mikro di Indonesia merupakan bagian dari inklusi keuangan. Alasan mendasar terciptanya praktik keuangan mikro di negara ini, menurut sejarah semua jenis organisasi keuangan mikro, adalah kebutuhan asli masyarakat. Dengan kondisi perekonomian yang masih lemah dan struktur perusahaan yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga keuangan harus

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid., 97-98.

memiliki kualitas yang sesuai dengan operasional usaha mikro dan kecil agar dapat memenuhi tuntutan jasa keuangannya.¹¹²

Hasil Survei Keuangan Inklusif Nasional Dewan Nasional Keuangan Inklusif (S-DNKI) 2020, 81,4 persen masyarakat telah memanfaatkan barang atau jasa lembaga keuangan regional. Jika dibandingkan tahun 2018, angka ini tumbuh menjadi 78,8 persen. Sementara itu, 61,7 persen orang memiliki akun. Persentase ini juga meningkat sejak tahun lalu, yaitu 55,7 persen.¹¹³ Artinya, kepemilikan akun lebih luas di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Namun, kepemilikan rekening pedesaan tumbuh lebih cepat daripada kepemilikan rekening perkotaan. Agen bank dan BUMDes juga memiliki peran vital dalam meningkatkan kepemilikan rekening di daerah pedesaan.¹¹⁴

Kemudian, program bantuan pemerintah menyebabkan peningkatan kepemilikan rekening. Sebanyak tujuh dari sepuluh orang yang mendapatkan bantuan pemerintah memiliki rekening. Pada 2020, peserta program bantuan pemerintah tumbuh menjadi 40,8 persen, naik dari 17,2 persen pada 2018. Pada 2020, akses masyarakat Indonesia terhadap barang dan perbankan syariah juga akan tumbuh. Penggunaan dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah meningkat sebesar 1%, tabungan dan deposito meningkat sebesar 0,7%, transfer bank meningkat sebesar 0,3%, dan akses masyarakat terhadap barang dan jasa perbankan syariah meningkat sebesar 0,6%.¹¹⁵

Selain itu, program kerja keuangan inklusif 2021-2024 berfokus pada peningkatan akses layanan perbankan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penurunan biaya layanan perbankan, perluasan akses layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah, serta peningkatan integrasi. Survei tersebut mempertimbangkan stratifikasi wilayah

¹¹² Darsono, dkk. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2018), 22.

¹¹³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Republik Indonesia, *Sistem Keuangan Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, *Siaran Pers HM.4.6/165/SET.MEKON.3/06/2021*, 2021, www.ekon.go.id.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

perkotaan/pedesaan dan gender, serta perkiraan jumlah penduduk nasional tahun 2020.

D. Pengembangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Kompetensi sikap dan perilaku keuangan yang bijak, dan aksesibilitas layanan keuangan merupakan tiga pilar SNLKI. Beberapa inisiatif dan program aksi utama merupakan bagian dari Program Strategis yang telah ditetapkan.

Selain SNLKI 2021-2025, OJK telah mengembangkan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan Buku Saku Literasi Keuangan Pengantin yang merupakan komponen infrastruktur literasi keuangan. Learning Management System (LMS) dibuat sebagai bagian dari strategi pembelajaran dan pelatihan terpadu untuk menjadi pusat pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan di bidang peningkatan materi literasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengatasi masalah demografi dan geografis Indonesia, pengembangan LMS sangat penting sebagai bagian dari campuran taktik implementasi pendidikan offline dan online. Pengembangan LMS bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan pelatihan literasi keuangan;
2. Meningkatkan akses peserta terhadap sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan;
3. Mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan; dan
4. Memetakan tingkat pemahaman materi literasi keuangan.

Learning Management System (LMS) yang dapat diakses di <https://lmsku.ojk.go.id> ini diharapkan dapat membantu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam menjalankan program kerja perluasan akses keuangan di daerah-daerah dengan mempercepat pemerataan indeks literasi di daerah.

Penelitian empiris menunjukkan hubungan yang kuat antara inklusi keuangan, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara rencana inklusi keuangan dengan pembangunan ekonomi yang lebih luas dan strategi pengentasan kemiskinan. Perluasan akses keuangan dapat meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi keuangan melalui peningkatan tabungan, peningkatan investasi dalam negeri, dan stabilitas sistem keuangan yang kesemuanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat pentingnya keuangan inklusif dalam mendorong kemajuan ekonomi, Presiden Indonesia menekankan komitmen Indonesia terhadap keuangan inklusif dalam KTT G20 di Los Cabos, Meksiko tahun 2012. Sesuai dengan janji tersebut, tujuan inklusi keuangan Indonesia dalam Nawa Cita Ketujuh adalah untuk meningkatkan persentase penduduk dewasa yang menggunakan jasa keuangan melalui lembaga keuangan formal sebesar 50% pada akhir tahun 2019. Lebih lanjut, dengan melihat adanya hubungan sebab akibat yang kuat antara pengembangan sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu, tujuan inklusi keuangan Indonesia telah dinaikkan menjadi 75 persen pada akhir tahun 2019.

Keuangan inklusif membantu orang-orang yang rentan dan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan pendapatan mereka, mengumpulkan uang, mengelola risiko, dan keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan, Indonesia harus mengupayakan tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi. Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Strategi Nasional untuk Keuangan Inklusif (SNKI).

Pemerintah memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah dengan meningkatkan akses pelayanan bagi seluruh masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan

2 ekonomi. keuangan. Peningkatan akses ke layanan keuangan ini dilakukan dengan memperluas sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan keuangan, serta pemahaman masyarakat akan pentingnya sistem keuangan. Dari sisi penawaran, pemerintah 2 memperluas ketersediaan layanan keuangan ke semua sektor masyarakat. Upaya pemerintah untuk 2 mendorong akses layanan keuangan menghasilkan lima pilar. **Pilar pertama** adalah pendidikan keuangan, yang berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan formal, barang dan jasa keuangan. **Pilar kedua** adalah hak milik masyarakat, dengan tujuan meningkatkan akses kredit masyarakat ke lembaga keuangan formal. **Pilar ketiga** adalah jalur intermediasi dan distribusi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan guna menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam. **Pilar keempat** adalah layanan keuangan pemerintah, yang berupaya mendorong tata kelola dan transparansi layanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai. **Pilar kelima** adalah perlindungan konsumen yang berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, lima pilar SNKI ditopang oleh tiga landasan. Pilar per 12 adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan inisiatif keuangan inklusif. Pilar kedua adalah infrastruktur pendukung dan teknologi informasi keuangan, yang dirancang untuk mengurangi informasi asimetris yang dapat menjadi hambatan dalam menerima layanan keuangan. Landasan ketiga adalah organisasi dan sistem implementasi yang efektif 42 untuk memfasilitasi koordinasi dan integrasi berbagai operasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi inklusi keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut survei tahun 2020, keuangan inklusif yang diukur berdasarkan akun meningkat 61,7 persen. Tren inklusi keuangan Indonesia meningkat, 81,4 persen di tahun 2020 dibanding 59,74 persen pada 2013 silam. Target yang dicanangkan Presiden Jokowi di tahun 2024 indeks inklusi keuangan harus mencapai 90 persen.

103 Indeks literasi keuangan di tahun 2019 berada dikisaran 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan adalah 76,19 persen. Menurut Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional ketiga OJK, persentase ini lebih besar 45 hasil polling OJK 2016 yang mengungkapkan skor literasi 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan menyumbang 67,8 persen. Berikut grafik 2.4, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2016-2019.



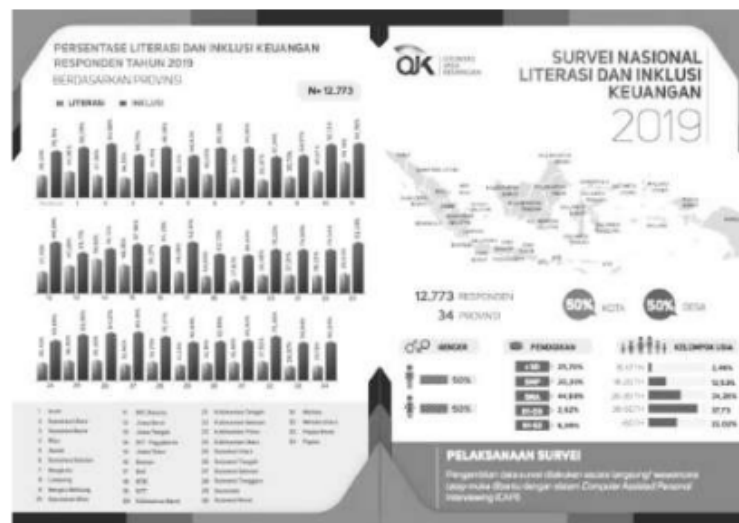
Masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap barang dan jasa perbankan syariah pada tahun 2020. Pemanfaatan dana LK⁸ meningkat sebesar 1%, deposito dan tabungan naik sebesar 0,7 persen, transfer bank meningkat 0,3 persen, sedangkan akses masyarakat terhadap layanan produk dan jasa perbankan syariah meningkat sebesar 0,6 persen. ⁸

Tiga tahun terakhir, literasi keuangan meningkat 8,33 persen, sedangkan akses produk dan jasa layanan keuangan 8,39 persen. Hasil survei yang dilakukan OJK di 2019 melibatkan 12.773 informan terdiri dari 34 meliputi 67 kota/kabupaten, dengan mempertimbangkan strata dan gender.

Menurut laporan OJK, daerah perkotaan memiliki skor literasi keuangan sebesar 41,41 persen pada tahun 2019, sedangkan masyarakat pedesaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 34,53 persen. ini menunjukkan mereka yang melek finansial lebih cenderung tinggal di kota daripada di pedesaan. Selanjutnya, pria memiliki nilai indeks lebih tinggi 39,94 persen daripada wanita hanya 36,13 persen.¹¹⁶ Di Indonesia, setiap provinsi memiliki tingkat literasi yang bervariasi. Dengan skor 40,0 persen, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi pada tahun 2016. Sementara itu, rata-rata peringkat literasi atau pengetahuan keuangan nasional 29,7%. Provinsi Papua Barat dengan 19,3 persen merupakan provinsi di Indonesia dengan tingkat literasi keuangan terendah.¹¹⁷ Berikut data lengkap inklusi keuangan per provinsi di Indonesia.

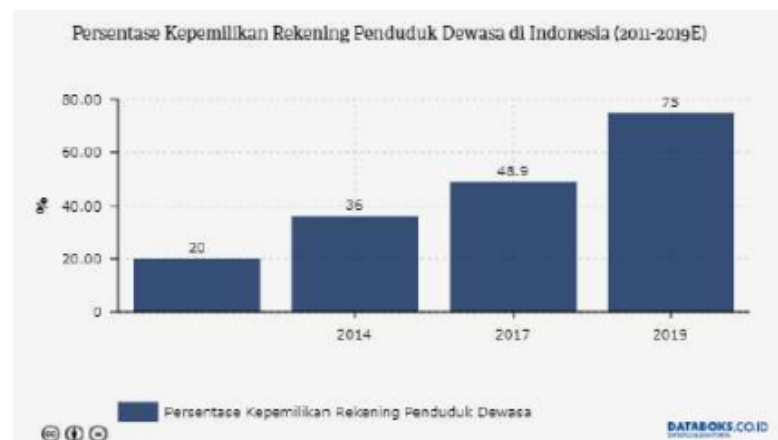
¹¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019."

¹¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia 2017," *Ojk* (2018).



Total rekening bank baru saat dibuka selama Bulan Keuangan Inklusi naik menjadi 789.025 rekening. Dilain sisi, Indonesia memiliki 13,8 juta rekening uang elektronik dan 5,1 juta pedagang yang menggunakan Kode Respon Cepat Standar Indonesia, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan mayoritas pedagang.

Dari 2014 hingga 2018, jumlah akun pada kelompok usia dewasa tidak melampaui 50%. Ia mampu meningkatkan inklusi keuangan publik di Indonesia dengan mengembangkan inisiatif inklusi keuangan untuk perempuan dan kelompok berpenghasilan rendah. Orang dewasa yang memiliki akun menyumbang 48,9% dari populasi orang dewasa pada akhir tahun 2017. Ini adalah persentase yang lebih besar dari rekor tahun sebelumnya sebesar 36%. Hal ini ditunjukkan pada grafik 2.6, tentang persentase penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank dari tahun 2011 hingga 2019.



Sumber: Databox, 2021

Meskipun telah ditingkatkan, akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih di bawah penduduk dewasa pada umumnya. Kenaikan fintech peer-to-peer lending (P2P) diprediksi akan mendorong keuangan inklusi di Tanah Air. Pemerintah ingin masyarakat mampu membayar jasa keuangan pada tingkat 75%.

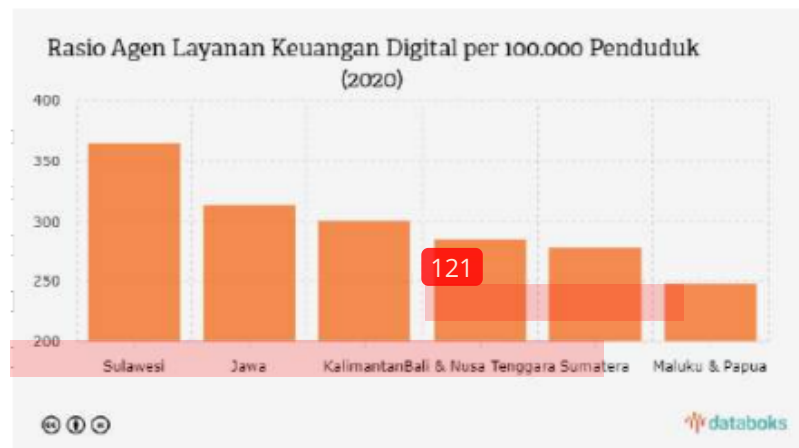
Pemerintah melakukan inovasi layanan keuangan dan bekerja sama dengan organisasi non-keuangan untuk mempercepat inklusi keuangan. Peningkatan infrastruktur inklusi keuangan, kesadaran dan literasi masyarakat, serta sertifikasi hak milik masyarakat juga menjadi prioritas.

Tingkat keuangan inklusi Indonesia masih rendah. Tahun 2019, sebanyak 51% populasi orang dewasa (95 juta orang) tidak memiliki akses ke rekening bank. Layanan keuangan digital adalah salah satu solusi (LKD).

LKD adalah kegiatan membayar dan jasa financial yang dilaksanakan pihak ketiga dengan teknologi digital seperti ponsel atau internet (agen). Perorangan atau publik yang non pegawai perbankan yang telah mendapat izin resmi mendirikan lembaga keuangan digital disebut sebagai agen LKD.

Jumlah Agen per 100.000 penduduk dewasa di Pulau Sulawesi, menurut statistik dari Bank Indonesia 2020. Di pulau itu, total ada 365 agen. Dengan 313 agen, Pulau Jawa berada di urutan kedua, disusul Pulau Kalimantan dengan 300 LKD, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali dengan 285 LKD, Pulau

Sumatera dengan 278 agen, dan Kepulauan Maluku dan Papua dengan 248 LKD. Pada tahun 2020, jumlah agen LKD layanan keuangan digital per 100.000 orang di Indonesia adalah seperti grafik 2.7.



Peningkatan inklusi terutama pelaku usaha mikro³¹ dan kecil. Bank umum menyalurkan kredit UMKM 19,8%, sementara Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp196,42 triliun atau 103,3 persen dari target Rp190 triliun.

Usaha Kecil Menengah (UKM), menurut Aga et.al, adalah inti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta penyedia lapangan kerja utama.¹¹⁸ UKM dikatakan Kamunge dan Tirimba merupakan pemain penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena memberikan peluang kerja bagi warga negara, yang meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka.¹¹⁹ Namun, Peter dan Cathy menunjukkan kurangnya studi tentang kontribusi UKM untuk jaringan, yang berdampak pada daya saing ketika sumber daya dibatasi. Menunjukkan bahwa, selain meningkatkan daya saing, jejaring di antara UKM menyediakan pengumpulan biaya pelatihan karyawan, serta

50

¹¹⁸ Gemechu Aga, David C. Francis, dan Jorge Rodriguez-Meza, "SMEs, Age, and Jobs: A Review of the Literature, Metrics, and Evidence," *Policy Research Working Paper 7493*, no. November (2015): 41.

¹¹⁹ Mbugua Stephen Kamunge dan Ondabu Ibrahim Tirimba, "Factors Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya" 4, no. 12 (2014).

penghematan biaya dalam konsultasi dan R&D, produksi, ekspor, dan dukungan sumber daya manusia dan keuangan.¹²⁰

Sementara Kenny dan Fahy tidak mengungkap hubungan kausal antara jaringan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan kinerja internasional, penelitian mereka menunjukkan bahwa jaringan modal manusia perusahaan memiliki hubungan yang menguntungkan dengan kinerja internasional.¹²¹ Sebagian besar UKM di Afrika Sub-Sahara, dan khususnya di Uganda, menghadapi banyak masalah yang mempengaruhi operasi mereka dan kelangsungan hidup jangka panjang. Telah diperhatikan bahwa tingkat kegagalan bisnis menakutkan, dengan hanya sebagian kecil perusahaan yang bertahan selama satu tahun.¹²²

Dibandingkan dengan ekonomi industri, mengklaim bahwa UKM menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengetahuan teknologi dan lingkungan bisnis yang tidak bersahabat, yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.¹²³ Kinerja setiap UKM akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berinovasi agar sesuai dengan selera dan preferensi konsumen, yang akan memperluas jangkauan pasar dan memberikan keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Karena tingkat persaingan semakin meningkat setiap hari, UKM harus kreatif dan imajinatif meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan layanan mereka, yang akan memotivasi karyawan.¹²⁴

Daya cipta UMKM harus dipupuk dengan ketersediaan infrastruktur pendukung dan teknologi informasi. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, koneksi internet saat ini tersedia di 11.817 lokasi fasilitas umum, dan utilisasi Palapa

¹²⁰ Turyakira Peter dan Ikiror Mbidde Cathy, "Networking for SMES in Uganda: A conceptual paper," *African Journal of Business Management* 9, no. 2 (2015): 4, 21.

¹²¹ Breda Kenny dan John Fahy, "Network resources and international performance of high tech SMEs," *Journal of Small Business and Enterprise Development* 18, no. 3 (2011): 509–555.

¹²² Aga, Francis, dan Rodriguez-Meza, "SMEs, Age, and Jobs: A Review of the Literature, Metrics, and Evidence." 20

¹²³ Reza Farrokhian dan Faezeh Soleimani, "Assessing capabilities for innovation - The case of Iranian kalleh meat product company," *International Conference on Operation Excellence and Service Engineering* (2015): 23–32.

¹²⁴ Ibid.

31

Ring secara umum terus meningkat. Pemerintah juga telah menetapkan Peta Akses Jasa Keuangan Indonesia dan merilis LocationKu, alat pencari titik layanan keuangan.

Demikian pula POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat diterbitkan untuk meningkatkan edukasi literasi dan inklusi keuangan. Setahun sekali, para pelaku usaha di industri jasa keuangan menjalani pelatihan.

Untuk meningkatkan indeks dan literasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2020 untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman di biaya yang terjangkau. agar hubungan yang kuat ini tetap berjalan dan mencapai tujuan tanggal 2024. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat berkembang sejalan dengan tuntutan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan menutup kesenjangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah bermaksud meningkatkan akses dan jangkauan layanan keuangan formal melalui SNKI, meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, meningkatkan akses permodalan dan mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan produk dan layanan keuangan digital, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan melalui layanan digital.

Literasi keuangan sangat penting, menurut Bhushan dan Medury, karena berbagai alasan. Konsumen yang memiliki pengetahuan finansial mungkin dapat melewati masa ekonomi yang sulit karena mereka telah melakukan *saving*, asuransi dan mendiversifikasi investasi. Literasi keuangan terkait dengan kebiasaan baik termasuk membayar tagihan, melakukan pembayaran tepat waktu, menabung sebelum habis, dan memanfaatkan kartu kredit dengan bijak. Kerugian individu akan terjadi karena kurangnya pengetahuan keuangan, baik sebagai akibat dari inflasi, penurunan kondisi ekonomi domestik dan internasional, atau pertumbuhan sistem ekonomi

yang membuat masyarakat lebih boros dan konsumtif. Begitupun kurangnya literasi keuangan membuat orang sulit berinvestasi dan mengakses pasar keuangan.¹²⁵

Indonesia telah berjanji¹⁴³ untuk mempromosikan inklusi keuangan di seluruh negeri. OJK bersama dengan Industri Jasa Keuangan dan organisasi terkait terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas¹²⁶ akses keuangan, menjamin ketersediaan barang dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan keuangan. Beberapa program¹²⁸ juga digunakan untuk melaksanakan tugas ini, antara lain:

- Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor
- Tabungan Pelajar
- Tabungan⁸⁶ muda dan Mahasiswa
- TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)
- Bank Wakaf Mikro
- Sentral Edukasi dan Layanan Konsumen serta Akses Keuangan UMKM
- KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- Layanan Keuangan Mikro

Inisiatif-inisiatif berikut meliputi penciptaan pendidikan digital, dukungan program pendidikan dan literasi keuangan syariah terintegrasi serta pendidikan berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur pendidikan, dan penguatan taktik aliansi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Sementara itu, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan memperkuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan program kerja untuk meningkatkan akses keuangan, serta mengembangkan dan memperkuat sistem informasi.

E. Kontribusi Inklusi Keuangan dari Berbagai Sektor Jasa Keuangan

Literasi masyarakat tentang produk jasa dan layanan keuangan formal diyakini masih terbatas. Olehnya itu, OJK¹⁵⁹ menetapkan target pencapaian keuangan inklusif 90 persen di tahun 2024. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

45

¹²⁵ Yajulu Medury Puneet Bhushan, "Financial Literacy and its Determinants," *International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBA)* 4 (2), no. July (2013): 155–160.

119. Pada OJK, indeks literasi atau pengetahuan keuangan adalah 38,03 persen dan inklusi keuangan Indeks sebesar 76,19 persen pada 2019. Jika dibandingkan dengan hasil survei OJK tahun 2016, angka tersebut meningkat. Skor literasi keuangan saat itu adalah 29,7%, sedangkan indeks inklusi keuangan adalah 67,8%.

15. Indeks literasi keuangan merupakan kompilasi dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mengejar kekayaan. Oleh karena itu, Thomas Dewaranu, peneliti di Center for Indonesian Policy Studies berpendapat bahwa literasi atau pengetahuan keuangan harus menjadi prioritas utama dalam memperluas inklusi keuangan. Inklusi keuangan, atau memperoleh akses ke sistem keuangan formal bagi mereka yang tidak bankable, dapat diikuti dengan membangun kepercayaan dan pemahaman.¹²⁶ Berikut kontribusi inklusi keuangan berbagai sektor pembiayaan di Indonesia.

1. Kontribusi Fintech

Bisnis fintech global terus berkembang. Cambridge Center of Alternative Finance (CCAF) menerbitkan Global COVID-19 Fintech Market Rapid Assessment Study pada November 2020, yang menunjukkan peningkatan adopsi layanan keuangan digital di negara berkembang, khususnya pembayaran dan pengiriman uang digital, bank digital, dan tabungan atau simpanan digital. Temuan penelitian ini menambah kepercayaan dunia tentang potensi fintech untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan, inklusi ekonomi, dan kontribusi ekonomi.

41. Jumlah anggota AFTECH, misalnya, meningkat drastis selama 5 (lima) tahun terakhir, dari 24 (2016) menjadi 369 (2020), mewakili lebih dari 20 jenis usaha.

¹²⁶ Thomas Dewaranu (Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Mikro Berada di Urutan Paling Bawah. Dimuat oleh Merdeka.com, Selasa, 2 November 2021. Diakses pada tanggal 27 September 2021. <https://www.merdeka.com/uang/pemahaman-masyarakat-tentang-lembaga-keuangan-mikro-berada-di-urutan-paling-bawah.html>

Secara keseluruhan, pandemi tidak memperlambat sisi pasok³ ekspansi industri fintech.

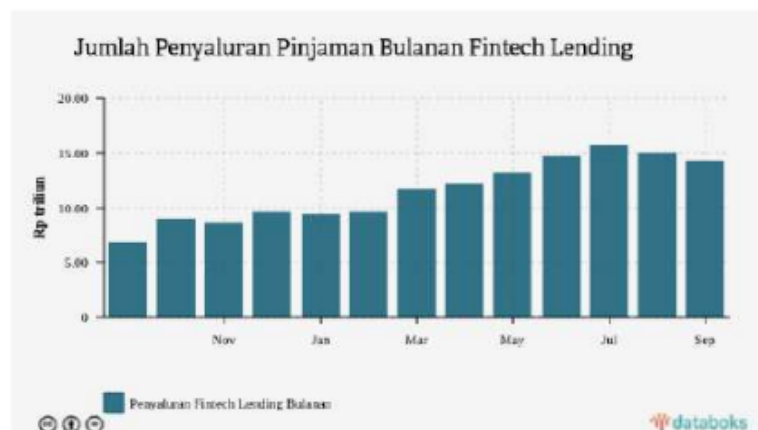
Financial Technology (Fintech) merupakan salah satu inovasi layanan keuangan yang semakin populer di era digital saat ini, dan teknologi dalam arti digitalisasi pembayaran merupakan salah satu sektor bisnis Fintech yang paling berkembang di Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah³ dan masyarakat menginginkan industri Fintech untuk mendorong dan memperluas jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan.

Bank Indonesia memb⁴⁴kan penjelasan mengenai Teknologi Finansial dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Dalam hal Implementasi Teknologi Finansial. Teknologi keuangan adalah penerapan teknologi dalam³ sistem keuangan untuk menciptakan barang jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan ketergantungan sistem pembayaran.

Financial Stability Board dalam Nizar, mendefinisikan fintech sebagai bentuk inovasi teknologi layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk dengan efek material yang terkait dengan penyedia³ jasa layanan keuangan. Berdasarkan pengertian di atas Fintech merupakan suatu inovasi industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan tek⁷³gi.

Menurut statistik OJK per Juli ³20, total penyaluran kredit melalui Fintech pada tahun 2020 (Januari hingga Juli) mencapai Rp35 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 135 persen (Juli 2020, year-on-year). Hal ini menunjukkan bahwa di minat masyarakat terhadap pinjaman berbasis fintech tetap meningkat.¹²⁷

Fintech menjadi semakin penting sebagai salah satu cara untuk mengeksplorasi sistem keuangan Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang tak terlayani lembaga keuangan. Peningkatan penyaluran kredit fintech di luar Jawa sebesar 107,73% (year-on-year), menunjukkan pentingnya Fintech dalam penyebaran sektor ekonomi, khususnya UMKM.¹²⁸ Di Indonesia, total nilai penawaran fintech lending melampaui Rp. 88,4 triliun. Grafik 2.7, menggambarkan jumlah total penawaran pinjaman fintech lending di Indonesia.



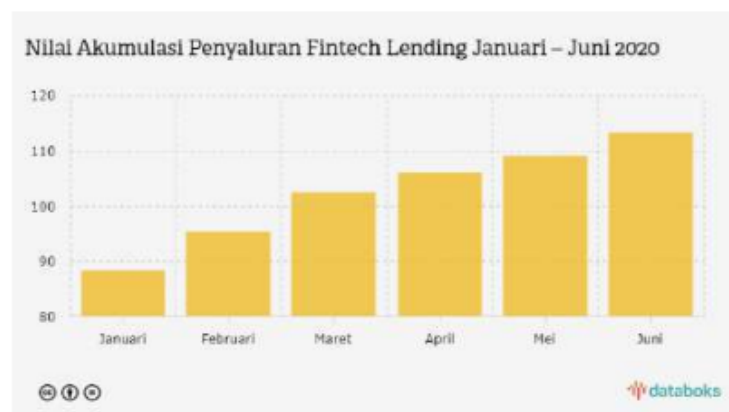
Sumbangsih inklusi keuangan dari sektor fintech memang terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan itu belum dibarengi dengan pemerataan di seluruh Indonesia. Kenaikan tersebut masih terfokus di wilayah Jawa. Data ini dapat dilihat pada grafik sebagaimana grafik 2.8 berikut ini.

¹²⁸ INDEF dan Asosiasi Fintech Indoensia, "Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional." *Institute for Development of Economics and Finance* (2019): 1–13, <https://indef.or.id/update/detail/studi-dampak-fintech-peer-to-peer-lending-terhadap-perekonomian-nasional>.



3

Berdasarkan grafik di atas, DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan distribusi uang Fintech tahunan tertinggi, yaitu sebesar Rp. 27,1 triliun dan Rp. 24 triliun, masing-masing. Jawa Timur (Rp 9,6 triliun), Banten (Rp 8,2 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 8,2 triliun) semuanya memiliki penyaluran kredit yang signifikan (Rp 5,8 triliun). Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta memiliki kapasitas keuangan gabungan sebesar Rp 1 triliun. Fintech strategik meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga bulan September 2021 data penyaluran pinjaman fintech lending dikeluarkan databox katadata, seperti grafik 2.9, sebagai berikut.



Kehadiran Fintech terbantu dengan maraknya penggunaan smartphone oleh masyarakat, khususnya

aset sosial organisasi penyelenggara keamanan tumbuh sebesar 16,78 persen. Total aset organisasi yang menawarkan ASN, Asuransi TNI/POLRI, Kecelakaan Umum Penumpang, dan Lalu Lintas Jal tumbuh 3,32 persen pada tahun 2020, meningkat dari Rp131,56 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp135,93 triliun pada tahun 2020. Aset asuransi ditunjukkan di bawah ini.¹³¹

Sejak tahun 2014, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan Jaminan Sosial, sedangkan PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jasa Raharja telah menyediakan Perusahaan Asuransi untuk ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan.

Pada 2020, total dana investasi untuk bisnis asuransi Indonesia adalah Rp1.224,64 triliun. Angka ini naik 4,29 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.174,25 triliun. Perusahaan asuransi jiwa memiliki 40,9 persen dana investasi, diikuti oleh penyelenggara jaminan sosial (40,3 persen), perusahaan asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas (10,5 persen), perusahaan asuransi umum (6,8 persen), dan reasuransi perusahaan (1,4 persen). Dari tahun 2016 hingga 2020, total investasi dari masing-masing sektor perusahaan asuransi ditunjukkan pada Tabel 1.6. Sedangkan Grafik 2.11, menunjukkan persentase investasi untuk masing-masing kategori perusahaan.¹³²

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.



120

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017, skor literasi asuransi di Indonesia baru 15,76 persen. Statistik ini lebih rendah dari 17,84 persen yang terlihat dalam jajak pendapat 2013. Oleh karena itu, acara yang direncanakan untuk Hari Asuransi 2018 dirancang untuk meningkatkan literasi dan inklusi asuransi. Sedangkan tingkat utilitas mencapai 12,08 persen, sedikit berubah dari survei tahun sebelumnya sebesar 11,81 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya 15 hingga 16 orang Indonesia dari setiap 100 orang yang peduli dengan lembaga jasa keuangan asuransi. Meskipun baru 12 orang yang menggunakan jasa asuransi.¹³³

3. Kontribusi Pergadaian

51 Lembaga Keuangan Khusus adalah sekelompok lembaga atau usaha yang didirikan atau didirikan untuk melaksanakan kegiatan 51 n fungsi khusus, yang sebagian besar terkait dengan upaya mendukung inisiatif pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa termasuk di antara lembaga keuangan khusus yang diterbitkan (Pers 64).¹³⁴

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian mengatur

¹³³ Ibid.

1

¹³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Lembaga Keuangan Khusus 2020*, *Statistik Lembaga Keuangan Khusus 2020* (Jakarta, 2021).

123) ng usaha gadai dalam rangka membangun usaha gadai yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha gadai, dan melindungi nasabah. Operasi bisnis 1) utama pegadaian meliputi:¹³⁵

- a. Penyaluran uang pinjaman dengan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan 1) Pegadaian;
- b. penyaluran pinjaman uang dengan agunan berdasarkan fidusia;
- c. Jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d. Layanan 160) aian.

Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lain selain 1) kegiatan usaha pokoknya, seperti:

- a. Kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan Pegadaian yang memberikan fee based income sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa keuangan; dan/atau
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK.

Pegadaian pen 149) ah dan pegadaian swasta merupakan dua jenis pegadaian yang dikendalikan dan diawasi oleh OJK. 9

Perusahaan Pegadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero), sebagaimana tertuang dalam Staatsblaad 1928 nomor 81 tentang Peraturan Pandhuis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan (Persero).¹³⁶

Pegadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan transaksi gadai. Badan hukum pegadaian adalah perseroan terbatas atau koperasi. Modal disetor perusal 81) n pegadaian ditentukan oleh ruang lingkup bidang usaha, yaitu Rp. 500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau Rp. 2,5 miliar untuk lingkup

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

1

wilayah usaha provinsi. Pelaku usaha gadai yang melakukan kegiatan usaha gadai sebelum berlakunya POJK Nomor 31 dapat mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK paling lambat dua tahun setelah POJK diundangkan. Pegadaian yang telah terdaftar wajib mengajukan permohonan izin usaha Pegadaian dalam jangka waktu tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diterbitkan. Sedangkan pelaku usaha pegadaian yang belum memiliki izin usaha harus mengajukan permohonan izin kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha.

Aset gadai mencapai Rp72.187 miliar pada tahun 2020, meningkat 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Liabilitas dan ekuitas masing-masing naik 11,3% dan 7,1% menjadi Rp47.376 miliar dan Rp24.811 miliar. Kredit yang disalurkan selama ini mencapai Rp55.067 miliar, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik 2.11, posisi keuangan pergadaian tahun 2016-2020 (miliar Rupiah).¹³⁷



Sebagai satu-satunya pegadaian milik pemerintah, PT Pegadaian (Persero) mencatatkan aset Rp71.469 miliar pada Desember 2020, tumbuh 9,4 persen dibandingkan 2019.¹⁵⁵ Liabilitas dan ekuitas masing-masing naik 10,9 persen dan 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan PT Pegadaian (Perserooperasional) tumbuh 24,1 persen dari tahun 2019 menjadi Rp. 21.964 miliar pada tahun 2020. Pendapatan operasional yang paling signifikan berasal

¹³⁷ Ibid.

dari pendapatan sewa modal, yaitu sebesar Rp14.545 miliar. Sementara belanja operasional tumbuh 42,2 persen menjadi Rp19.173 miliar pada periode yang sama. Seiring dengan kenaikan biaya, pendapatan PT Pegadaian (Persero) turun 34,9% menjadi Rp2.022 miliar. Rasio PT Pegadaian (PerseroBOPO) pada 2020 sebesar 87,3 persen, naik 11,1 poin dari tahun sebelumnya.

Kredit yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) pada Desember 2020 meningkat 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp54.697 miliar. Nilai kredit yang disalurkan melalui gadai konvensional meningkat 21,0 persen menjadi Rp40,178 miliar, gadai syariah meningkat 25,1 persen menjadi Rp6,438 miliar, dan kredit yang disalurkan melalui kegiatan lain yaitu kredit mikro fidusia dan emas turun 32,7% menjadi Rp 8.080 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.¹³⁸

Pada Desember 2020, PT Pegadaian (Persero) memiliki 16,9 juta konsumen aktif dan 19,0 juta akun. Jumlah konsumen aktif naik 3,1 juta orang, naik 22,2 persen, sementara jumlah rekening meningkat 2,4 juta unit, naik 14,6 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening gadai konvensional pada periode ini tercatat sebanyak 9,6 juta rekening, atau 50,4% dari total rekening PT Pegadaian (Persero). Adapun jumlah rekening produk emas merupakan produk dengan peningkatan terbesar, yaitu 55,9% dari tahun sebelumnya menjadi 7,6 juta rekening. Aset pegadaian swasta senilai Rp718 miliar pada kuartal IV-2020, meningkat 78,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kewajiban dan ekuitas industri gadai swasta masing-masing sebesar Rp511 miliar (naik 72,6 persen) dan Rp207 miliar (naik 94,3%).¹³⁹

Selama kurun waktu tersebut, pegadaian swasta mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp128

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

miliar dan biaya operasional sebesar Rp116 miliar. Selama periode yang sama, rasio BOPO adalah 90,5 persen. Sedangkan laba bersih periode ini sebesar Rp. 12 miliar. Hingga kuartal IV 2020, bisnis pegadaian swasta telah mengucurkan pinjaman sebesar Rp370 miliar. Nominalnya terdiri dari gadai Rp329 miliar, fidusia Rp40 m¹⁴⁰, dan tunai Rp1 miliar.¹⁴⁰

4. Kontribusi Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang menyediakan keuangan atau barang modal sebagai bagian dari kegiatan pembiayaannya. Diantara lembaga keuangan tersebut adalah:¹⁴¹

- a. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Kartu Kredit.
- b. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan/penyertaan modal pada suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berbasis pada pembagian hasil operasi. dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah perusahaan komersial yang didirikan secara tegas untuk menawarkan pembiayaan dalam bentuk pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur..

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2020, total aset Lembaga Keuangan pada tahun 2020 sebesar Rp589,34 triliun, dengan aset Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp452,85 triliun (76,83 persen),

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Lembaga Pembiayaan 2020," *Direktorat Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan* (2020): 1-99, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Desember-2020.aspx>.

1 aset Perusahaan Modal Ventura sebesar Rp21,07 triliun (3,58 persen), dan aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp115,42 triliun (19,59 persen). Sebagaimana ditampilkan dalam grafik 2.12, berikut ini.¹⁴²



Berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan masing-masing turun 11,39 persen dan 15,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekuitas perusahaan pembiayaan naik 1,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan pembiayaan tercatat Rp4,92 triliun, turun Rp12,04 triliun atau 70,99% dari Rp16,96 triliun pada tahun sebelumnya. Sedangkan tabel 2.2, menunjukkan jumlah entitas, aset, kewajiban, ekuitas, dan laba bersih Lembaga Pembiayaan.¹⁴³

No	Jenis Lembaga Type of Institution	Entitas Entity (Unit)	(triliun Rp/trillion IDR)			
			Aset Assets	Liabilitas Liabilities	Ekuitas Equities	Laba Bersih Net Profit
1	Perusahaan Pembiayaan/ Finance Company	176	452,85	321,16	131,69	4,92
2	Perusahaan Modal Ventura/ Venture Capital Company	61	21,07	9,49	11,59	1,98
3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Infrastructure Finance Company	2	115,42	75,72	39,70	1,95
1	Jumlah/Total	239	589,34	406,37	182,98	8,85

Pinjaman dalam dan luar negeri yang berasal dari bank dan/atau organisasi komersial lainnya, penerbitan surat berharga, dan pinjaman subordinasi merupakan sumber pendanaan utama bagi Perusahaan Pembiayaan. Sumber permodalan perusahaan

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

1 pembiayaan mengalami penurunan sebesar 16,41% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴⁴

5. Kontribusi Lembaga Pembiayaan Khusus

Dari data per 31 Desember 2020, jumlah aset lembaga pembiayaan khusus sebesar Rp257.790 miliar, naik 3,4% dibanding tahun 2019. Ekuitas juga mengalami kenaikan 16,2% sedangkan liabilitas turun 1,6%. Di sisi lain, laba bersih pada periode ini tercatat sebesar Rp3.417 miliar. Pada 2020, LPEI masih akan mendominasi aset dan kewajiban lembaga keuangan khusus, masing-masing menyumbang 35,7 persen dan 38,1 persen dari total aset dan kewajiban lembaga keuangan khusus. Pegadaian mendapat ekuitas dan keuntungan paling banyak, masing-masing menyumbang 30,5 persen dan 59,4 persen dari total ekuitas dan keuntungan lembaga keuangan khusus. Secara umum, tabel 2.3, tersebut membandingkan aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan masing-masing lembaga di lembaga keuangan tertentu.¹⁴⁵

Jenis Industri/ Industry Type	Aset/Assets	Liabilitas/Liabilities	Ekuitas/ Equities	Laba Bersih/ Net Profit
LPEI Indonesia Lembank	92.085	67.288	24.797	288
Perusahaan Pegadaian	72.187	47.376	24.811	2.031
Lembaga Penjamin/ Guarantee Institutions	27.314	13.301	13.813	511
PT SMF (Persero)	32.567	21.078	11.429	476
PT PNM (Persero)	31.090	25.517	5.573	351
PT Danareksa (Persero)	2.608	1.808	799	31
Jumlah/ Total	257.790	176.569	81.221	3.682

Selama lima tahun 144 sebelumnya, aset lembaga keuangan khusus telah meningkat rata-rata 10,5 persen per tahun. Dibandingkan tahun 2016, aset lembaga keuangan khusus naik sebesar Rp69.760 miliar hingga tahun 2020. Berikut grafik 2.13, tentang aset lembaga keuangan khusus tahun 2016-2020 (miliar rupiah).¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Stat. Lemb. Keuang. Khusus 2020*.

¹⁴⁶ Ibid.



6. Kontribusi Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengawasi dan menjalankan skema manfaat pensiun. Dana Pensiun terdiri dari:¹⁴⁷

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang didirikan sebagai pendiri oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban.
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi orang perseorangan, baik pegawai maupun pekerja mandiri, yang berbeda dengan Dana Pensiun pemberi kerja pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- c. Dana Pensiun Berbasis Laba, adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran

¹⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Dana Pensiun* (Jakarta, 2020).

Pasti dengan 5 iuran dari perusahaan saja berdasarkan rumus yang dikaitkan dengan penghasilan pemberi kerja.

Jumlah dana pensiun swasta tradisional terus menurun selama lima tahun sebelumnya. Antara 2016 dan 2020, jumlah Dana Pensiun yang dibubarkan adalah 34. Pembubaran tersebut disebabkan oleh efisiensi operasional dan keuangan Pemberi Kerja atau Pendiri, serta tersedianya skema Jaminan Pensiun (JP) yang diperlukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Penurunan jumlah Dana Pensiun mulai berdampak pada jumlah peserta Dana Pensiun. Berikut tabel 2.4, dana pensiun tahun 2016 s.d. 2020.¹⁴⁸

Jenis Dana Pensiun <i>Pension Fund Type</i>	2016	2017	2018	2019	2020
DPPK PPMPI/EPF-DBPP	180	169	164	158	148
DPPK PPIPI/EPF-DCPP	44	44	44	41	44
DPLK/FIPF	25	23	24	25	23
Jumlah/Total	249	236	232	224	215

Pada tahun 2020, jumlah peserta Dana Pensiun turun 0,96 persen atau 41.935 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset bersih Dana Pensiun terlihat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan aset bersih melambat pada 2018, meningkat hanya 2,76 persen. Namun, pertumbuhan aset bersih Dana Pensiun meningkat sebesar 8,30 persen pada 2019. Perekonomian nasional kembali mengalami pelemahan pada 2020 akibat Pandemi Covid 19 yang juga menghambat peningkatan aset bersih Dana Pensiun. Pertumbuhan aset bersih Dana Pensiun tahun 2020 sebesar 7,92 persen, lebih rendah 7,92 persen dari rata-rata pertumbuhan aset bersih Dana Pensiun 2016-2020 sebesar 8,75 persen setiap tahun. Berikut Grafik 2.14, pertumbuhan jumlah dana pensiun tahun 2016 s.d. 2020.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.



Selanjutnya, apabila melihat pertumbuhan investasi Dana Pensiun tercatat sebesar rata-rata pertumbuhan investasi Dana Pensiun dalam 5 tahun terakhir 8,92%. Secara yoy, investasi Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp22,95 triliun atau naik 8,11% dari total investasi pada tahun 2019 sebesar Rp283,14 triliun menjadi Rp306,10 triliun pada 2020. Investasi Dana Pensiun sebagian besar berasal dari instrumen pasar modal dengan komposisi investasi sebesar Rp193,61 triliun atau 63,25%, yang didominasi oleh 4 instrumen, yaitu Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi/Sukuk, Saham dan Reksadana dengan porsi investasi masing-masing sebesar 24,71%, 21,99%, 10,51% dan 5,57%. Kemudian, untuk menjaga tingkat likuiditas Dana Pensiun menempatkan investasi di setara Deposito sebesar Rp87,91 triliun atau 28,72% dari total investasi.¹⁵⁰

Dana pensiun juga meningkat. Rata-rata pertumbuhan tahunan kekayaan bersih Dana Pensiun selama lima tahun terakhir sebesar 8,75 persen. Total aset bersih Dana Pensiun meningkat 7,92 persen year on year, dari Rp290,27 triliun pada 2019 menjadi Rp313,26 triliun pada 2020. Berikut komposisi total aset bersih berdasarkan program pensiun pada akhir tahun 2020 : Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti sebesar Rp167,44 triliun (53,45 persen), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Iuran Pasti sebesar

¹⁵⁰ Ibid.

Rp37,78 triliun (12,06 persen), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebesar Rp108,04 triliun (34,49 persen).¹⁵¹

¹⁵¹ Ibid.

11 **BAB III** **LEMBAGA KEUANGAN MIKRO; DEFINISI DAN** **PERKEMBANGANNYA**

A. Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah organisasi keuangan yang mengkhususkan diri dalam pertumbuhan perusahaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dicapai melalui pinjaman usaha mikro, pengelolaan simpanan, dan penyediaan layanan konsultasi pengembangan perusahaan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang dirancang khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota dan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun investasi pada perusahaan skala mikro, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pengelolaan simpanan, serta penyediaan layanan konsultasi pengembangan perusahaan nirlaba.

Landasan penulisan UU Lembaga Keuangan Mikro adalah tumbuhnya lembaga keuangan bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha sektor keuangan yang secara nyata membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan lembaga keuangan skala mikro ini berpusat pada penyediaan keuangan atau modal kepada perusahaan skala mikro dan kecil. Pada tanggal 8 Januari 2013, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah akan jasa keuangan, serta memberikan landasan hukum dan kepastian hukum bagi kegiatan lembaga keuangan mikro di komunitas ini. Di antara operasi bisnis LKM adalah:

1. Pelayanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota dan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan pada perusahaan skala mikro;
2. Pengelolaan simpanan; atau

3. Memberikan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha.

Wilayah usaha LKM terbatas pada satu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Luas wilayah usaha disesuaikan dengan skala usaha masing-masing LKM. Luasnya perusahaan LKM ditentukan oleh distribusi pinjaman atau pembiayaan konsumen, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

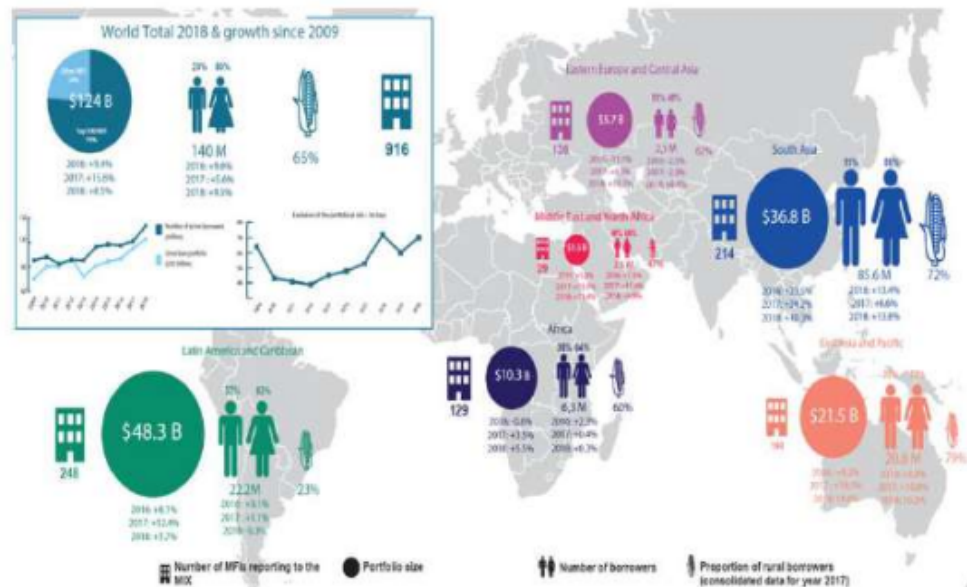
- a. LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;
- b. LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan yang sama;
- c. Suatu LKM memiliki skala usaha apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada 24 penduduk di 2 (dua) kabupaten/kota.

B. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Dunia

Di sebagian besar¹⁴⁵ perekonomian, khususnya di negara berkembang, usaha mikro kecil dan menengah (UKMK) memainkan peran penting. UKMK membentuk sebagian besar bisnis secara global dan merupakan kontributor penting untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi global. Mereka menyumbang sekitar 90% dari perusahaan dan lebih dari setengah dari semua pekerjaan di dunia. Di negara berkembang, UKMK formal menyumbang hingga 40% dari pendapatan nasional (PDB). Ketika UKMK informal dimasukkan, jumlahnya jauh lebih besar. Untuk mengakomodasi peningkatan tenaga kerja global, World Bank mengantisipasi bahwa 600 juta pekerjaan akan dibutuhkan pada tahun 2030, menjadikan pertumbuhan UKMK sebagai prioritas utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. UKMK, yang merupakan tujuh dari sepuluh pekerjaan di negara berkembang, menghasilkan sebagian besar pekerjaan

formal. Akses permodalan, di sisi lain, merupakan batu sandungan utama bagi ekspansi UKM di negara berkembang.¹⁵²

Dalam sepuluh tahun, lembaga keuangan mikro (LKM) telah meminjamkan ratusan miliar dollar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 11,5% selama lima tahun terakhir. Pada saat yang sama, jumlah peminjam di seluruh dunia terus mengalami peningkatan – meskipun kecepatannya lambat dibandingkan periode 2000 hingga 2010 silam yang mencatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 7% sejak 2012, dibandingkan dengan tingkat hampir 20% pada periode sebelumnya.¹⁵³ Berikut pertumbuhan lembaga keuangan mikro di dunia dalam kurun waktu 2009-2018 sebagaimana dirilis *Zero Exclusion Carbon Poverty* di Inggris pada gambar 3.1.



67

¹⁵² The World Bank, *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance; Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital* (Washington - USA, 2021), <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>.

¹⁵³ mohita Khemar Blaine Stephens, "Global microfinance figures: what are the trends?," *Zero Exclusion Carbon Poverty* (Inggris, 2018), <https://www.convergences.org/en/119115/>. Akses date: 28 December 2021

Pada tahun 2018, 139,9 juta peminjam mendapatkan manfaat dari layanan LKM, dibandingkan dengan hanya 98 juta pada tahun 2009. Dari 139,9 juta peminjam tersebut, 80% adalah perempuan dan 65% adalah peminjam pedesaan, proporsi yang tetap stabil selama sepuluh tahun terakhir, meskipun peningkatan jumlah peminjam. Dengan perkiraan portofolio kredit sebesar \$124,1 miliar, LKM mencatat satu tahun pertumbuhan lagi di tahun 2018 (+8,5% dibandingkan dengan 2017).¹⁵⁴

Selama dekade terakhir, LKM juga telah meningkatkan efisiensinya. Meskipun satu dekade ditandai dengan peningkatan tajam dalam biaya per peminjam, dari rata-rata \$68,4 pada tahun 2009 menjadi \$106,7 pada tahun 2018 (+56%), rasio biaya operasional menurun sebesar 2,7 poin selama periode tersebut. Antara 2009 dan 2018, LKM juga mencatat peningkatan pengembalian aset (+1,3 poin) dan ekuitas (+2,9 poin). Namun demikian, ada sedikit penurunan kualitas portofolio selama seluruh periode, dengan portofolio berisiko (PAR) selama 30 hari telah meningkat dari 6,4% pada tahun 2009 menjadi 7% pada tahun 2018. Setelah penurunan PAR > 30 hari antara 2010 dan 2012, naik lagi dan stabil antara 2016 dan 2018 di sekitar 7%.¹⁵⁵

Asia Selatan terus mendominasi keuangan mikro global: ini adalah wilayah dengan jumlah peminjam terbesar (85,6 juta pada 2018), dengan jumlah ini tumbuh lebih cepat daripada di wilayah lain (+13,8% antara 2017 dan 2018). Ini juga memiliki tiga pasar teratas dalam hal peminjam, India, Bangladesh dan Vietnam. Sauvagarder dan orang yang mudah menyerah. Sebuah fitur penting dari kawasan ini, hampir semua peminjam sebenarnya adalah peminjam perempuan (89% pada 2018). Meskipun mewakili hampir dua pertiga dari peminjam global, Asia Selatan hanya berada di urutan kedua dalam hal portofolio

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ibid.

kredit, dengan perkiraan jumlah yang luar biasa sebesar \$36,8 miliar pada tahun 2018.¹⁵⁶

Sebaliknya, Amerika Latin dan Karibia saja menyumbang 44% dari total portofolio sektor keuangan mikro, dengan pinjaman sebesar \$48,3 miliar (rata-rata +5% per tahun sejak 2012). Wilayah ini adalah yang terbesar kedua dalam hal jumlah peminjam, dengan 22,2 juta pelanggan pada 2018, angka yang sedikit lebih rendah (-0,3%) setelah bertahun-tahun tumbuh. Wilayah Amerika Latin dan Karibia juga terus dicirikan oleh tingkat penetrasi yang rendah di daerah pedesaan. LKM di wilayah tersebut adalah yang paling tidak berorientasi pada pedesaan, terhitung hanya 23% dari klien mereka.¹⁵⁷

Berbeda dengan kawasan terkemuka ini, negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah serta kawasan MENA merupakan pasar yang lebih kecil. Namun, mereka tumbuh baik dari segi jumlah pelanggan dan portofolio kredit. Di Eropa Timur dan Asia Tengah, jumlah peminjam telah meningkat lebih dari 30% sejak 2012, mencapai 2,5 juta pada 2018. Wilayah MENA memiliki jumlah peminjam yang sama. LKM di kedua wilayah ini juga memiliki proporsi peminjam wanita terendah, dengan 49% peminjam wanita di Eropa Timur dan Asia Tengah dan 60% di wilayah MENA pada tahun 2018. Portofolio kredit di kedua wilayah ini juga meningkat selama periode tersebut. Sedangkan kawasan MENA hanya mengalami pertumbuhan yang lemah antara tahun 2017 hingga 2018 (+1%), Eropa Timur dan Asia Tengah mencatatkan peningkatan sebesar 5%, membaik setelah mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016.¹⁵⁸

Jumlah total LKM Afrika yang luar biasa telah meningkat 56% sejak 2012, sementara jumlah peminjam meningkat 46% dibandingkan periode yang sama mencapai 6,3 juta orang pada 2018. Meskipun portofolio berkualitas rendah (13,6% PAR > 30 hari di 2017) dan

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid.

biaya tinggi per peminjam, portofolio terus menunjukkan hasil yang kuat – 20% – tetapi turun 6,6 poin. Pengembalian aset juga tetap positif – 1,9% – tetapi turun (-1,4 poin). Terakhir, dengan 73% klien wanita dan 79% peminjam pedesaan, LKM di Asia Timur dan Pasifik terus tumbuh dengan portofolio \$21,5 miliar pada tahun 2018, naik 13,1%. Pada tahun yang sama, 20,8 juta penerima manfaat meminjam dari LKM di wilayah ini (+10,2%). Sejak 2012, jumlah total LKM yang beredar di wilayah tersebut akan meningkat rata-rata 16% per tahun, disertai dengan pertumbuhan jumlah nasabah yang berkelanjutan namun lebih moderat (+6%/tahun).¹⁵⁹

Sementara itu, laporan dari *Global Newswire* pasar Keuangan Mikro di AS diperkirakan mencapai US\$43 Miliar pada tahun 2020. Negara tersebut saat ini menguasai 26,95% pangsa pasar global. Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, diperkirakan akan mencapai ukuran pasar yang diperkirakan sebesar US\$89,3 Miliar pada tahun 2027 mengikuti CAGR sebesar 18,1% hingga 2027. Di antara pasar geografis penting lainnya adalah Jepang dan Kanada, masing-masing diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,7 % dan 12,1% masing-masing selama periode 2020-2027. Di Eropa, Jerman diperkirakan tumbuh sekitar 10,9% CAGR sementara pasar Eropa lainnya (sebagaimana didefinisikan dalam penelitian ini) akan mencapai US\$89,3 Miliar pada tahun 2027.¹⁶⁰

C. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Indonesia

Kredit mikro memiliki sejarah panjang dan terkenal di Indonesia. Keberadaan keuangan mikro dapat dipisahkan menjadi dua periode berdasarkan catatan, yaitu periode kolonial dan periode kemerdekaan. Beberapa bank yang didirikan oleh

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ ReportLinker - Global Newswire, *Global Microfinance Market to Reach US\$394.8 Billion by the Year 2027* (New York, 2021), https://www.reportlinker.com/p05799111/?utm_source=GNW.

pemerintah Hindia Belanda mendominasi sektor keuangan pada masa penjajahan Belanda. Raden Bei Wiriaatmadja, seorang warga yang menjabat sebagai Gubernur Purwokerto, mendirikan "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" atau Bank Bantuan dan Simpanan Pegawai, sekitar bulan Desember 1895, atas usul seseorang. Setelah itu, seorang Belanda bernama *De Wolf van Westerode* memulihkan organisasi dan menamainya Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat.¹⁶¹

Kabupaten-kabupaten lain di pulau Jawa segera menyusul, mendirikan Bank Rakyat sendiri. Desa-desa di seluruh Jawa, khususnya daerah penghasil beras, menciptakan Lumbung Desa, sebuah organisasi simpan pinjam yang menggunakan komoditas beras sebagai instrumen simpan pinjam, sekitar waktu yang sama, sekitar tahun 1898. Bank Desa, juga dikenal sebagai Badan Perkreditan Desa, didirikan pada tahun 1904 sebagai daerah pedesaan tumbuh dan pentingnya peredaran uang menjadi lebih dipahami oleh penduduk pedesaan (BKD). Pada tahun 1934, Bank Rakyat bergabung dengan "*Algemene Volkscredietbank*" (AVB), sebuah bank yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui bantuan kredit sambil juga menghasilkan keuntungan.¹⁶²

Setelah Indonesia merdeka, AVB berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan terus membantu masyarakat pedesaan dengan memberikan kredit mikro dan mendirikan cabang di daerah pedesaan. Jika kita mempertimbangkan sejarah panjang BRI, tidak mengherankan untuk menemukannya sebagai bank besar dengan cakupan area yang luas yang tetap mengabdikan diri untuk memberikan kredit mikro. Badan Perkreditan Desa

¹⁶¹ Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Ekonomi, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia," *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi* (2017).

¹⁶² I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia," *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013): 114–125.

yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa tetap beroperasi setelah Bank Rakyat dilebur menjadi AVB. Namun pada masa kemerdekaan, Badan Perkreditan Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa menjelma menjadi lembaga perkreditan rakyat seperti Lembaga Perkreditan Daerah dan Bank Karya. Produksi Desa Jawa Barat, Badan Perkreditan Rakyat Jawa Tengah, dan Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur.¹⁶³

Beberapa organisasi, seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat, telah berubah menjadi lembaga keuangan berdasarkan hubungan tradisional. Selama masa kepresidenan Sukarno, pemerintah Indonesia memainkan peran kecil dalam penciptaan kredit mikro karena ada pergolakan politik dan Republik Indonesia berada di tengah-tengah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Antara tahun 1957 dan 1965, langkah-langkah yang berhasil menghapus semua kepemilikan atau keterlibatan asing dalam sistem perbankan, serta menasionalisasi bank-bank yang sebelumnya dipegang oleh Belanda, sangat merugikan sistem keuangan formal. Setelah situasi politik mulai membaik di bawah Presiden Suharto, pemerintah mulai memberikan penekanan yang lebih besar pada pembangunan pedesaan.¹⁶⁴

Pada awal 1970-an, pemerintah mendirikan bank di masing-masing dari 27 provinsi yang ada saat itu. Pemerintah juga memberikan kebebasan dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan sekitar 300 BPR beroperasi pada awal tahun. Ada juga semacam layanan keuangan mikro di awal sistem baru ini, dalam bentuk uang subsidi yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Bimbingan Massal adalah nama dari inisiatif ini (Bimas). Pada tahun 1964, Bimas ditetapkan sebagai

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

pilot project, dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), dan BRI Unit Desa yang bertujuan untuk meningkatkan input produksi dan pinjaman bagi petani. Produsen beras akan segera memiliki akses bimbingan untuk industri pertanian lainnya seperti tebu, kapas, dan industri perikanan. Pembiayaan Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Tetap merupakan program kredit yang ditawarkan oleh pemerintah pada saat itu untuk mendukung petani kecil dengan investasi dan modal kerja (KMKP). Menteri Keuangan saat itu membuat Kredit Mini dan Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang diterbitkan melalui KUD, untuk usaha mikro di luar pertanian.¹⁶⁵

Pada akhir tahun 1970-an, Indonesia memiliki hampir 300 lembaga pemberi pinjaman semacam itu. Lembaga-lembaga tersebut pada waktu itu tergolong lembaga keuangan bukan bank, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang Perbankan 1967, sehingga uang dari lembaga-lembaga tersebut harus diperoleh dari sumber lain. Lembaga-lembaga ini juga tidak diperbolehkan untuk memobilisasi uang dalam bentuk deposito dan tidak tunduk pada batasan suku bunga BI, memungkinkan mereka untuk mengatur sendiri.¹⁶⁶

Beberapa lembaga tersebut, termasuk yang didirikan pada awal periode ini, seperti Badan Perkreditan Daerah (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Daerah (LPK) di Jawa Barat, dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera, masih beroperasi di Indonesia. Institusi tradisional mengontrol Barat. Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur (1984) dan Lembaga Perkreditan Desa

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Lincoln Arsyad, "Lembaga Keuangan Mikro : Institusi, Kinerja dan Sustentabilitas," in *Monograf* (Yogyakarta : Andi, 2008), 236.

(LPD) di Bali sama-sama didirikan pada tahun 1980-an. LPD merupakan lembaga yang unik karena hanya dimiliki oleh desa adat Bali, berbeda dengan lembaga lain yang sebagian dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.¹⁶⁷

Indonesia akhirnya mencapai swasembada beras pada 1980-an berkat upaya bersama dan pemberian kredit mikro kepada petani. Melihat peran dan keahlian BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro pada saat itu, sekitar tahun 1983, pemerintah memutuskan untuk mengembangkannya menjadi sistem perbankan komersial. Metode baru ini memungkinkan BRI Unit Desa untuk menggunakan norma atau kebijakan yang fleksibel dalam hal suku bunga simpan pinjam. BRI mulai menawarkan Kredit Umum Perdesaan (Kupedes) melalui jaringan unit desa pada tahun 1984, diikuti oleh Simpedes (Simpanan Perdesaan) pada tahun 1985. Pemerintah menetapkan pada tahun 1988, melalui Paket Oktober (Pakto) 88, bahwa segala macam lembaga keuangan non bank (termasuk: BKD, BKK, LPK, LPN, KURK, dan juga LPD) diberikan pilihan untuk beralih menjadi BPR untuk jangka waktu dua tahun. Undang-undang ini sangat memberatkan lembaga keuangan pedesaan, yang menyebabkan dikeluarkannya Keputusan Pemerintah pada bulan Maret 1989 (Pakmar 89) yang menghapus undang-undang tersebut untuk meringankan masalah yang dialami oleh lembaga kredit pedesaan serta BPR akibat transisi mereka.¹⁶⁸

Pasal 58 UU Perbankan tahun 1998 mengakui keberadaan lembaga perkreditan pedesaan dengan memungkinkan mereka untuk beralih ke BPR sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sesuai. Lembaga perkreditan desa yang beralih fungsi menjadi BPR kini memiliki jangkauan yang lebih luas berkat pembatasan tersebut. Apalagi sekarang mereka telah diberikan

¹⁶⁷ Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia."

¹⁶⁸ Ibid.

otorisasi untuk membangun cabang di kota-kota lain di dalam provinsi. Masalah lembaga perkreditan desa tidak diatur secara tepat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang pelaksanaan UU Perbankan. Aturan ini, di sisi lain, memudahkan banyak lembaga keuangan non-bank untuk menghindari menjadi BPR. Sementara itu, lembaga yang telah beralih fungsi menjadi BPR memiliki opsi untuk menyesuaikan dengan undang-undang BPR dalam jangka waktu lima tahun.¹⁶⁹

Akhir 1990-an melihat pendirian banyak bank komersial yang berspesialisasi dalam sektor mikro. Meskipun situasi politik telah stabil, tidak adanya pemegang kekuasaan pemerintah jangka panjang, seperti pada era Suharto, berarti bahwa proyek-proyek pemerintah di bagian ini hanya melanjutkan program Presiden Suharto. Dalam arti tidak ada program pemerintah yang benar-benar baru sejak era Suharto. Pembentukan bentuk baru organisasi keuangan berdasarkan ide hukum Islam, yang disebut lembaga syariah, menyoroti dekade 2000-an. Banyak bank umum telah mendirikan bagian syariah atau mendirikan bank baru berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Basis syariah pada dasarnya sebanding dengan pembiayaan modal ventura, yang didasarkan pada mekanisme bagi hasil daripada bunga. Pemerintah, melalui kementerian-kementerian yang diperlukan, meluncurkan forum yang diberi nama Gerakan Bersama Pembangunan Keuangan Mikro Indonesia, atau "Gema PKM", pada awal tahun 2000, dengan tujuan memperluas cakupan dan kapitalisasi dana keuangan mikro. Pertemuan tersebut meminta BI untuk mengadopsi peraturan yang mengatur tentang pembentukan dan pengoperasian lembaga keuangan mikro.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ibid.

BI mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro kepada Menteri Keuangan pada tahun 2001, yang kemudian dirujuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan. Di sisi lain, DPR belum memberikan indikasi akan mengesahkan peraturan tersebut saat ini. Hasilnya, pada tahun 2003, BI merilis penelitian dan formulasi tentang pengelolaan dan pertumbuhan LKM bekerja sama dengan Promotion of Small Financial Institutions (Pro-Fi), sebuah organisasi Jerman yang menjadi mitra BI dalam mengelola LKM (Martowijoyo, 2007). Menurut laporan tersebut, pemerintah harus menghapus semua hambatan untuk pengembangan dan desain LKM dan mengadopsi undang-undang dan peraturan yang secara tegas mengontrol penciptaan dan pengoperasian LKM. Rekomendasi tersebut antara lain (1) menghapus program bantuan dana bersubsidi dalam bentuknya yang sekarang, (2) melegalkan lembaga keuangan mikro non-bank/non-koperasi, dan (3) memperluas akses cakupan layanan, termasuk simpan pinjam, serta wilayah operasional LKM.

Lembaga keuangan harus memberikan dukungan menyeluruh untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di masa lalu, kurangnya akses keuangan ke lembaga perbankan yang mapan telah menghambat UMKM. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa lembaga keuangan non-bank bermunculan di masyarakat untuk melakukan kegiatan komersial untuk layanan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Lembaga ini dikenal sebagai lembaga keuangan mikro (LKM). Banyak dari LKM ini, di sisi lain, belum menjadi badan hukum dengan izin usaha. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan pada tanggal 8 Januari

2013, untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi LKM.

Lembaga Simpan Pinjam Keuangan Mikro, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Multiguna, Lembaga Perkreditan Desa, Koperasi Unit Desa, Simpan Pinjam Danamon, FIF, Teras BRI, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Mal Watamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan lainnya adalah salah satu LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Beberapa dari LKM ini aktif di daerah pedesaan dan perkotaan.

Layanan pengembangan komersial dan pemberdayaan masyarakat adalah dua dari operasi komersial LKM, yang juga mencakup pinjaman mikro dan pendanaan untuk anggota dan masyarakat umum, pengelolaan simpanan, dan konseling pengembangan usaha. Operasi bisnis yang dapat dilakukan dengan cara tradisional atau syariah; LKM diizinkan untuk melakukan kegiatan berbasis biaya selama mereka tidak melanggar undang-undang jasa keuangan. Sedangkan tujuan LKM antara lain:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keuangan skala mikro;
2. Membantu pemberdayaan dan produktivitas ekonomi masyarakat; dan
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Adapun jumlah modal disetor untuk LKM berbentuk hukum PT atau simpanan utama, simpanan, dan hibah untuk LKM berbentuk hukum koperasi sebagai berikut:

- a. sebesar Rp 50.000.000 untuk sektor komersial desa/kelurahan.
- b. Rp100.000.000 Kawasan Bisnis Distrik
- c. Wilayah usaha Kabupaten dan Kota: Rp500.000.000.

Dilain sisi, Usaha Kecil Menengah, menurut Aga et.al¹⁷¹ adalah inti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta penyedia lapangan kerja utama. UKM dikatakan Peter dan Cathy¹⁷² merupakan pemain penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena memberikan peluang kerja bagi warga negara, yang meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Namun, kata Peter dan Cathy menunjukkan kurangnya studi tentang kontribusi UKM untuk jaringan, yang berdampak pada daya saing ketika sumber daya dibatasi. Menunjukkan bahwa, selain meningkatkan daya saing, jejaring di antara UKM menyediakan pengumpulan biaya pelatihan karyawan, serta penghematan biaya dalam konsultasi dan R&D, produksi, ekspor, dan dukungan sumber daya manusia dan keuangan.¹⁷³ Sementara Kenny dan Fahy tidak mengungkap hubungan kausal antara jaringan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan kinerja internasional, penelitian mereka menunjukkan bahwa jaringan modal manusia perusahaan memiliki hubungan yang menguntungkan dengan kinerja internasional.¹⁷⁴

Dibandingkan dengan ekonomi industri, Farrokhian dan Soleimani mengklaim bahwa UKM menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengetahuan teknologi dan lingkungan bisnis yang tidak bersahabat, dan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Kinerja setiap UKM akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berinovasi agar sesuai dengan selera dan preferensi konsumen, yang akan memperluas jangkauan pasar dan memberikan keunggulan

¹⁷¹ Aga, Francis, dan Rodriguez-Meza, "SMEs, Age, and Jobs: A Review of the Literature, Metrics, and Evidence."

¹⁷² Kamunge dan Tirimba, "Factors Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya."

¹⁷³ Peter dan Cathy, "Networking for SMES in Uganda: A conceptual paper."

¹⁷⁴ Kenny dan Fahy, "Network resources and international performance of high tech SMEs."

kompetitif atas pesaing mereka.¹⁷⁵ Karena tingkat persaingan semakin meningkat setiap hari, UKM harus kreatif dan imajinatif, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan mereka, yang akan memotivasi karyawan.¹⁷⁶

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan perekonomian, serta mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat, khususnya masyarakat di sekitar pesantren, OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan platform LKM Syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah. BWM merupakan LKM Syariah yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. BWM pertama kali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2017. Model bisnis BWM adalah sebagai berikut (lihat gambar 3.1):

1. Berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha LKM Syariah;
2. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip Syariah;
3. Tidak menghimpun dana (*non deposit taking*);
4. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun;
5. Tanpa agunan;
6. Diberikan pelatihan dan pendampingan; dan
7. Diawasi OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Laznas BSM Umat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), pesantren, dan tokoh masyarakat

¹⁷⁵ Farrokhian dan Soleimani, "Assessing capabilities for innovation - The case of Iranian kalleh meat product company."

¹⁷⁶ Ibid.

Gambar 3. 1 Model Bisnis BWM



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

2. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Indonesia

Sejak berlakunya Undang-Undang LKM pada tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019, saat ini terdapat 204 LKM yang memiliki izin usaha dengan rincian 30 PT LKM dan 174 Koperasi LKM. Pertumbuhan rata-rata jumlah LKM yang memperoleh izin sejak 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 149,42% per tahun. Berikut jumlah pelaku usaha kecil mikro yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2019, seperti dalam grafik 3.1.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Sementara itu, jumlah pelaku LKM berdasarkan jenis kegiatan usaha, sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 129 LKM Konvensional dan 75 LKM Syariah yang memperoleh izin dari OJK. Jumlah pelaku LKM Syariah meningkat secara signifikan sejak tahun 2017 dengan didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM).

Sampai dengan akhir tahun 2019, sebanyak 21 dari 34 provinsi telah memiliki LKM. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah LKM terbanyak, yaitu sebanyak 108 LKM atau 52,94% dari total jumlah LKM. Berdasarkan cakupan wilayah usaha, pada tahun 2019 terdapat 123 LKM atau 60,29% dari total LKM yang memiliki cakupan wilayah usaha Kecamatan. Sementara itu, untuk cakupan wilayah usaha Kabupaten/ Kotamadya terdapat 49 LKM dan sisanya 32 LKM memiliki cakupan wilayah usaha Desa/Kelurahan Sesuai dengan kegiatan usaha LKM, nasabah LKM terdiri dari Nasabah Peminjam dan Nasabah Penyimpan. Jumlah Nasabah Peminjam secara rata-rata tumbuh 181,02% per tahun dari 8.758 nasabah pada tahun 2017 menjadi 67.360 nasabah pada tahun 2019. Jumlah Nasabah Penyimpan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 57.548 nasabah.

Sejak berlakunya Undang-Undang LKM pada tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019 aset LKM secara

agregat nasional tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 207,19% per tahun dari Rp45,46 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp1,07 triliun pada tahun 2019. Sejalan dengan pertumbuhan aset LKM tersebut, jumlah *outstanding* Pinjaman/Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) LKM juga bertumbuh dari Rp23,30 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp615,92 miliar pada tahun 2019 atau tumbuh rata-rata sebesar 284,56% per tahun sejak tahun 2015. Berikut Grafik 3.2, tentang aset dan PYD (miliar Rupiah)



Pada tahun 2019 aset PT LKM Konvensional memiliki porsi 47,62% dari keseluruhan aset industri LKM dengan nilai aset sebesar Rp509,48 miliar sedangkan aset Koperasi LKM Syariah memiliki porsi kedua terbesar (41,23%) dengan nilai aset sebesar Rp441,20 miliar. Adapun aset Koperasi LKM berbentuk Koperasi Konvensional memiliki porsi 8,65% dari total aset LKM dengan nilai aset sebesar Rp92,60 miliar dan aset PT LKM Syariah memiliki porsi terkecil yaitu sebesar 2,50% dengan nilai aset sebesar Rp26,70 miliar.

Sebagaimana halnya porsi aset LKM, dari tahun 2015 hingga tahun 2019 PYD LKM berbentuk PT Konvensional memiliki porsi terbesar dari nilai pinjaman/pembiayaan industri LKM. Pada tahun 2019, PYD LKM berbentuk PT Konvensional memiliki porsi 61,07% dengan nilai

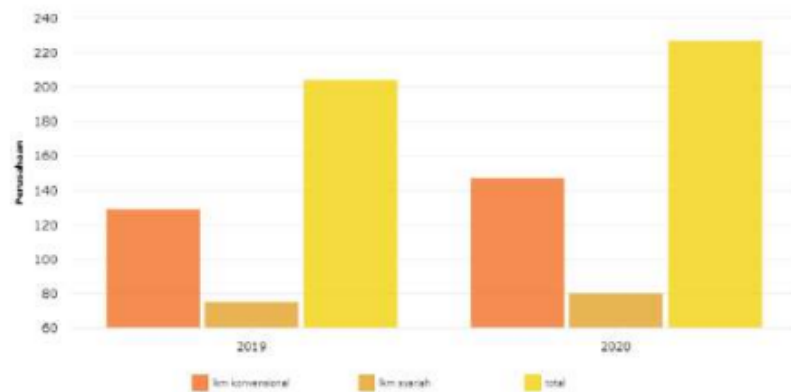
penyaluran pinjaman sebesar Rp376,17 miliar. Demikian pula, PYD Koperasi LKM Syariah menempati urutan kedua terbesar yaitu sebesar Rp159,00 miliar atau 25,82% dari PYD industri LKM. Sementara itu, nilai PYD Koperasi Konvensional dengan nilai sebesar Rp70.722 miliar memiliki porsi 11,48% dan PYD PT Syariah sebesar Rp10,03 miliar memiliki porsi 1,63%. Berikut Grafik 3.3, aset berdasarkan bentuk badan hukum dan jenis kegiatan usaha (miliar Rupiah).



D. Faktor-faktor yang Menghambat Perkembangan LKM di Indonesia

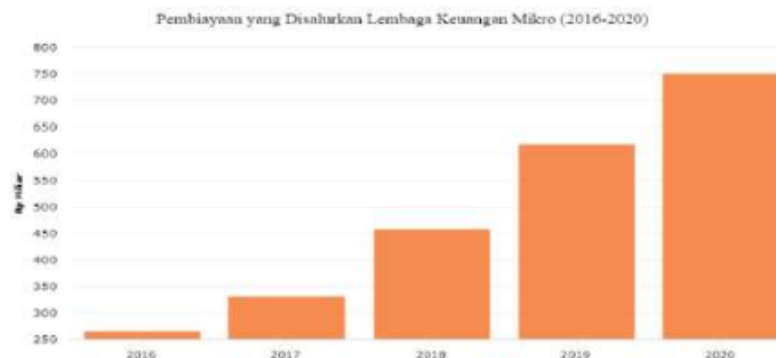
Pada tahun 2020, Indonesia akan memiliki 227 lembaga keuangan mikro (LKM), menurut OJK. Ini merupakan peningkatan 10,13 persen dibandingkan total tahun sebelumnya sebanyak 204 LKM. Secara total, 147 LKM konvensional ada di negara ini. Sementara itu, 80 bisnis lainnya adalah LKM syariah. Jumlah LKM di Indonesia terbagi menjadi 22 dari 34 provinsi di Indonesia. Jawa Tengah memiliki jumlah LKM terbesar, dengan 122 perusahaan menyumbang 53,74 persen dari total. Jawa Barat berada di posisi kedua, dengan 28 LKM. Setelah itu, ada 23 LKM di Jawa Timur. Pada 2020, aset LKM Indonesia mencapai Rp 1,23 triliun. Nilai tersebut meningkat 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,07 triliun. Aset LKM tradisional mencapai Rp734,67 miliar, atau 59,52 persen, dari total aset. Jumlah tersebut meningkat 22,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 602,08

miliar. Sedangkan aset yang dimiliki LKM syariah sebesar Rp 499,7 miliar atau 40,48% dari total aset. Jumlah tersebut meningkat 6,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 467,9 miliar, sebagaimana grafik 3.4 dibawah ini.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Jumlah pembiayaan yang disalurkan LKM kepada masyarakat mencapai Rp 749,42 miliar pada 2020, menurut laporan OJK. Jumlah itu naik 21,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 615,92 miliar. Ringkasnya, pendanaan LKM konvensional akan mencapai 74,28% atau Rp 556,65 miliar tahun 2020. LKM berbentuk PT Konvensional mencapai 63,80% dari total, dengan total nilai pembiayaan Rp. 478,15 miliar, dan Koperasi Konvensional sebesar 10,47 persen, dengan total nilai pembiayaan Rp. 78,50 miliar. Sedangkan LKM Syariah memasok pembiayaan sebesar Rp 192,77 miliar atau 25,72%. Dari tahun 2016-2020, tren statistik pembiayaan yang disalurkan LKM di Indonesia ditunjukkan dalam grafik 3.5, di bawah ini.



Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Pembiayaan LKM akan terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan jumlah nasabah. Menurut OJK, jumlah nasabah LKM pada tahun 2020 sebanyak 82.461 atau meningkat 22,4 persen dari total tahun 67.360 pelanggan. LKM didirikan, dalam upaya untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat dan UMKM.

Dari tahun ke tahun, UMKM terus memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp7.034,1 triliun atas dasar harga konstan pada 2019, naik 22,9 persen dari Rp5.721,1 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, UMKM menyumbang Rp 9.580,8 triliun terhadap PDB atas dasar harga berlaku. UMKM Indonesia menyerap 119,6 juta orang atau 96,92 persen dari total tenaga kerja di tanah air atau meningkat 2,21 persen. Unit usaha utama Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan. UMKM menyumbang 64,2 juta bisnis Indonesia, atau 99,99 persen dari total negara. Usaha Mikro sebesar 63,4 juta, Usaha Kecil sebesar 783,1 ribu, dan Usaha Menengah sebesar 60,7 ribu. Sedangkan Usaha Besar hanya menguasai 5,5 ribu unit usaha di Indonesia atau 0,01 persen dari total. Tenaga kerja yang diserap dari unit bisnis berjumlah 3,6 juta orang, atau sekitar 3% dari total tenaga kerja Indonesia. Berikut sumbangsih UMKM terhadap PDB Indonesia 2015-2019 yang digambarkan dalam grafik 3.6.



Sumber : Databox, 2021

Sementara transaksi dengan menggunakan QRIS untuk memfasilitasi inklusi keuangan berkontribusi pesat di masa pandemi Covid-19. Per 30 Desember 2020, QRIS telah terhubung dengan sekitar 5,8 juta merchant ritel nasional, menurut Bank Indonesia. Terhitung sejak 22 Maret 2020 berjumlah 3,1 pengecer, naik 88%. Mayoritas merchant adalah UMKM, seperti dalam grafik 3.7.



Sumber : Databox, 2021

BAB IV

INDEX INKLUSI KEUANGAN

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

A. Prolog

Keuangan mikro sering dipandang sebagai metode untuk mengurangi kemiskinan, terutama dalam rangka memperlancar arus konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah. Keuangan mikro tidak hanya menawarkan pinjaman kepada orang miskin, tetapi juga memberi mereka layanan keuangan lain seperti tabungan, pendidikan keuangan, dan asuransi. Keuangan mikro ditentukan oleh ketersediaan layanan keuangan lainnya. Keuangan mikro telah membantu mereka yang kurang mampu dengan menyediakan layanan keuangan tambahan. Akibatnya, keuangan mikro dipandang sebagai salah satu strategi untuk memerangi eksklusif keuangan, yang dianggap sebagai sumber kemiskinan yang menjebak kaum miskin, dan mendorong inklusi keuangan.

Untungnya, keuangan mikro telah berkembang menjadi lebih dari sekadar fasilitas pinjaman bagi masyarakat miskin, yang memungkinkan mereka untuk mengalami dan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak dapat mereka akses dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Keuangan mikro telah membantu masyarakat miskin untuk terlibat secara finansial dalam sistem keuangan melalui layanan keuangan lainnya seperti tabungan dan asuransi.

B. Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Dunia

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan layanan keuangan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat miskin telah berkembang dari pendekatan pinjaman awal yang terfokus pada penyediaan kredit mikro untuk industri yang lebih luas dilambangkan dengan istilah keuangan mikro.¹⁷⁷ Keuangan mikro hari ini diakui sebagai alat yang berharga untuk memberikan layanan keuangan kepada orang yang hidup dalam

¹⁷⁷ Jonathan Morduch, "The Micro Finance Schism," *World Development - Elsevier Science* 28, no. 4 (2000): 617–629.

kemiskinan¹⁷⁸ sehingga berkontribusi meningkatkan ekonomi formal di negara berkembang, tetapi data tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 40% dari populasi global masih tidak memiliki rekening di bank atau di lembaga keuangan formal lainnya.¹⁷⁹

Mikro finance menjanjikan baik untuk memerangi kemiskinan dan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan keuangan sistem melalui serta menemukan cara untuk hemat biaya meminjamkan uang kepada rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin biasanya dikecualikan dari formal sistem perbankan karena kurangnya agunan, tetapi gerakan keuangan mikro mengeksplorasi struktur kontrak baru dan bentuk organisasi yang mengurangi risiko dan biaya pembuatan kecil, pinjaman tanpa agunan. Program keuangan mikro juga telah menunjukkan bahwa rumah tangga miskin pun dapat menabung dalam jumlah yang cukup besar.

Sejak akhir 1970-an, kaum miskin di negara berkembang semakin memperoleh akses ke keuangan layanan yang ditawarkan oleh apa yang disebut lembaga keuangan mikro (LKM). LKM ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam memberikan layanan keuangan kepada rumah tangga miskin. Padahal pada tahun 1997 LKM ini memiliki sekitar 10 juta klien, pada tahun 2010 jumlah ini telah berkembang menjadi lebih dari 200 juta. LKM ini fokus untuk menjangkau orang miskin, sementara pada saat yang sama berkelanjutan secara finansial.¹⁸⁰

Keuangan mikro, atau penyediaan layanan keuangan untuk usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, telah menjadi aspek penting dari agenda inklusi keuangan selama beberapa dekade terakhir. Hal ini didasarkan pada premis

¹⁷⁸ Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty," in *Asia-Pacific Research and Training Network on Trade. Book Review Series, No. 7, July 2012*, vol. V, 2012, 303.

¹⁷⁹ Asli Demirguc-Kunt et al., "The Global Findex Database: Measuring financial inclusion around the world," *Policy Research Working Paper 7255*, no. April (2015): 11.

¹⁸⁰ Jonathan Morduch, "The microfinance promise," *Journal of Economic Literature* 37, no. 4 (1999): 1569–1614.

bahwa memperluas akses dan penggunaan lembaga keuangan formal mengurangi biaya transaksi, memungkinkan masyarakat miskin untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang menguntungkan dan kemungkinan pemerataan konsumsi yang meningkatkan kesejahteraan. Menurut penelitian Collier et al. 2009 dalam Urresta (2019)¹⁸¹, pengelolaan keuangan rumah tangga yang efisien lebih penting bagi keluarga berpenghasilan rendah daripada rumah tangga berpenghasilan menengah atau tinggi.

Lembaga keuangan mikro (LKM) dikatakan Taylor dalam Urresta (2019) umumnya dilihat sebagai pendorong penting inklusi keuangan, sebagian karena mereka beroperasi di persimpangan sektor keuangan formal dan informal (bank LKM, serikat kredit, dan perantara keuangan non-bank). Akibatnya, mereka sering menjadi tulang punggung kelembagaan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Baru-baru ini, kata "keuangan mikro" dan "inklusi keuangan" telah digunakan secara bergantian, atau keuangan mikro secara bertahap dihapus dan diganti dengan inklusi keuangan.¹⁸²

Situasi ini telah menyebabkan terciptanya tujuan umum baru, inklusi keuangan, konsep multidimensi yang lebih luas dengan beberapa aspek ekonomi, politik dan implikasi sosial.¹⁸³ Lembaga keuangan mikro (LKM) bertujuan untuk menangani beberapa kebutuhan rumah tangga di negara berkembang. LKM adalah jenis penyedia jasa keuangan tertentu, karena selain tujuan keuangan, mereka secara teratur mengejar serangkaian tujuan sosial yang dinyatakan dalam misi sosial yang mereka nyatakan.¹⁸⁴ Tujuan kombinasi keuangan dan sosial merupakan apa yang disebut *double bottom line* keuangan mikro, yang juga

¹⁸¹ Tania Lorena López Urresta, "Microfinance Institutions And Financial Inclusion," *Microfinance* (Frankfurt, Germany, N.D.), 2019.

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ Javier Sierra dan María José Rodríguez-Conde, "The Microfinance Game: Experiencing the dynamics of financial inclusion in developing contexts," *International Journal of Management Education* 19, no. 3 (2021).

¹⁸⁴ Javier Sierra, Victoria Muriel-Patino, dan Fernando Rodríguez-López, "The quest for the evaluation of microfinance social performance," *Iberoamerican Journal of Development Studies* 9, no. 2 (2020): 55–108.

dapat dikombinasikan dengan beberapa tujuan lingkungan.¹⁸⁵ Mencapai tujuan ini merupakan tantangan bagi banyak LKM.¹⁸⁶

Inklusi keuangan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan inti dari tantangan diversifikasi ekonomi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah (MENAP dan CCA).¹⁸⁷

Inklusi keuangan mengambil prioritas yang lebih tinggi di banyak negara dan dalam agenda kebijakan internasional, seperti melalui Rencana Aksi Inklusi Keuangan yang disahkan pada KTT G20 2010 di Seoul. Di kawasan MENAP dan CCA, banyak negara menghadapi tantangan berat untuk pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih inklusif serta sektor swasta yang lebih dinamis.¹⁸⁸

Rata-rata pangsa UKM dalam total pinjaman bank di negara-negara MENAP dan CCA hanya sekitar 7 persen, terendah di dunia. Oleh karena itu, IMF dan lembaga internasional lainnya memiliki peran kunci dalam mendukung prioritas reformasi dan desain strategi kebijakan dengan cara meningkatkan inklusi keuangan UKM yang bersifat spesifik dan berdasarkan pengalaman internasional.

Di Timur Tengah dan Asia Tengah, UKM menyumbang sebagian besar bisnis dan pekerjaan. UKM mencakup lebih dari 96 persen dari semua perusahaan yang terdaftar di wilayah tersebut dan mempekerjakan sekitar setengah dari seluruh angkatan kerja, yang sejalan dengan statistik global (Grafik

¹⁸⁵ Frédéric Huybrechs, Johan Bastiaensen, dan Gert Van Hecken, "Exploring the potential contribution of green microfinance in transformations to sustainability," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 41 (2019): 85–92.

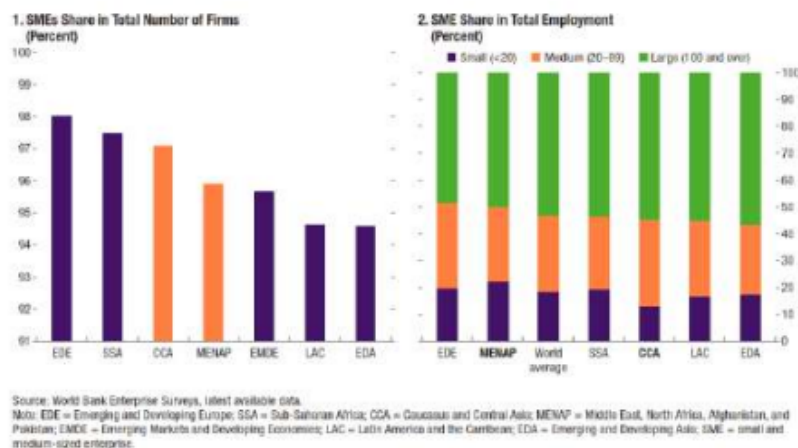
¹⁸⁶ Niels Hermes dan Marek Hudon, "Determinants of the Performance of Microfinance Institutions: a Systematic Review," *Journal of Economic Surveys* 32, no. 5 (2018): 1483–1513.

¹⁸⁷ Wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah mengacu pada 31 negara di Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan (MENAP) dan di Kaukasus dan Asia Tengah (CCA). Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses ke, dan penggunaan, layanan keuangan formal.

¹⁸⁸ Pernyataan Dana Moneter Internasional, Dana Arab untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial, dan Dana Moneter Arab, Konferensi Mempromosikan Pertumbuhan, Pekerjaan, dan Inklusivitas di Dunia Arab.

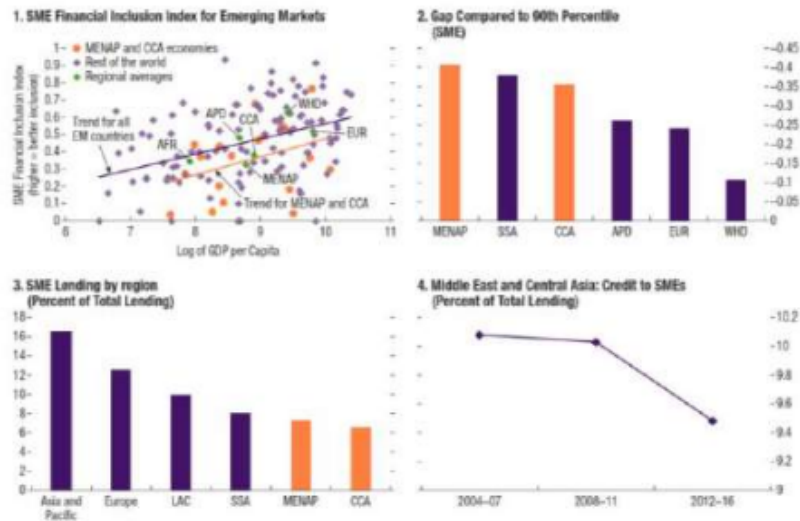
4.1). Sektor informal mempekerjakan sejumlah besar UKM di wilayah tersebut.

Dalam hal akses UKM ke pendanaan perbankan, wilayah MENAP dan CCA tertinggal dari sebagian besar wilayah lainnya. UKM menyumbang sekitar 7% dari keseluruhan pinjaman bank di wilayah MENAP dan CCA, dan serendah 2% di beberapa negara Dewan Kerjasama Teluk. Menurut Survei Perusahaan Bank Dunia, persentase perusahaan MENAP yang sangat tinggi (sekitar 32%) menyebutkan akses ke pembiayaan sebagai batasan utama (dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 26%). Di wilayah CCA, persentasenya lebih kecil (18%).¹⁸⁹ Sebagaimana ditunjukkan pada grafik 4.1, berikut ini.



¹⁸⁹ Nicolas Blancher et al., Financial Inclusion of Small and Medium-Sized Enterprises in the Middle East and Central Asia, *Departmental Papers / Policy Papers*, vol. 19, 2019.

Akses UKM ke pembiayaan di Timur Tengah dan Asia Tengah adalah juga rendah dibandingkan dengan negara-negara lain pada tingkat ekonomi yang sama perkembangan. Penyimpangan yang signifikan dari indeks inklusi keuangan yang diamati dari nilai yang diprediksi berdasarkan fundamental ekonomi menunjukkan bahwa wilayah tersebut



Sources: Financial Access Survey, World Development Indicators, World Bank Enterprise Surveys, and IMF staff calculations.
 Note: The financial inclusion gap is the difference in the SME financial inclusion index (Annex 1) between respective region's average and the 90th percentile of the sample. MENAP - Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan; CCA - Caucasus and Central Asia; SSA - Sub-Saharan Africa; APD - Asia Pacific; EUR - Europe; WHO - Western Hemisphere; LAC - Latin America and Caribbean; SME - small and medium-sized enterprise.
 *Financial Institution Depth Index is a composite index, which measures the depth of the banking system, pension and mutual funds as well as the insurance sector.

dapat mencapai tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi bahkan dalam lingkungan ekonomi makro yang berlaku. Di Selain itu, konsentrasi kredit telah meningkat, dengan pangsa UKM menurun, baik secara global maupun di Timur Tengah dan Asia Tengah, seperti ditunjukkan pada grafik 4.2.¹⁹⁰

Bagian ini menggambarkan sifat dan besarnya potensi manfaat keuangan makro dari inklusi keuangan UKM yang lebih besar. Melengkapi dan memperluas temuan dari literatur, ini menyajikan hasil dari pendekatan metodologis yang berbeda (analisis empiris lintas negara dan spesifik negara, tingkat perusahaan, dan berbasis data makro) yang digunakan untuk mengukur dampak inklusi keuangan UKM yang lebih besar pada ekonomi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja,

¹⁹⁰ Ibid.

efektivitas kebijakan makroekonomi, dan stabilitas keuangan makro.

C. Indeks Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Indonesia

Inklusi keuangan di Indonesia meningkat dengan laju yang berbeda-beda juga didasarkan atas kontribusi di setiap sektor usaha. Pada tahun 2019, sektor yang paling besar menyumbang adalah Perbankan dengan 73,88%, diikuti lembaga pembiayaan yang memberikan kontribusi inklusi keuangan sebesar 14,56%. Selanjutnya ada sektor asuransi menyumbang 13,15%. Sementara sektor usaha pegadaian ikut menopang inklusi keuangan Indonesia sebesar 12,38% dan sektor dana pensiun 6,18%. Sedangkan sektor pasar modal hanya mampu memberikan sumbangsih inklusi keuangan sebesar 1,55%. Kontribusi terkecil datang dari sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang hanya mampu menyokong inklusi keuangan Indonesia 0,72%. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel indeks literasi dan indeks inklusi keuangan yang disumbangkan berdasarkan sektor jasa keuangan berikut ini.



Tentunya kontribusi inklusi keuangan yang disumbangkan oleh LKM berbanding terbalik dengan perhatian besar

pemerintah akan LKM. Itu memberikan sinyal bahwa LKM yang menjadi basis ekonomi masyarakat kecil tak mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya. Minimnya kontribusi inklusi keuangan dari sektor LKM, berbanding lurus dengan kontribusi literasi keuangan LKM yang hanya mampu menyumbang 0,85%. Artinya pemahaman atau pengetahuan akan LKM oleh masyarakat masih sangat rendah. Kondisi ini agak berbeda dengan literasi Perbankan yang sinergis dengan inklusinya. Misalnya sektor Perbankan memiliki literasi tertinggi hingga mencapai 36,12%. Berikutnya sektor asuransi 19,40%, diikuti sektor pegadaian 17,81%. Selanjutnya sektor lembaga pembiayaan yang menyumbang literasi keuangan sebesar 15,17%. Setelah itu sektor dana pensiun 13,14%, dan sektor pasar modal sebesar 4,92%. Perbandingan literasi dan inklusi keuangan Indonesia berdasarkan sektor jasa keuangan, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Rendahnya inklusi keuangan Indonesia sampai mendapat perhatian Presiden RI, Joko Widodo. Berbicara kepada media dalam Rakornas TPAKD, Kamis, 12 Oktober 2020. Presiden mendesak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tanah air.¹⁹¹

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia per 2019 hanya 76%, jauh di bawah negara tetangga. Thailand, misalnya, memiliki tingkat literasi keuangan 82% dan Malaysia memiliki 85 persen dan Singapura memiliki tingkat literasi keuangan hingga 98%. Kondisi ini diperparah dengan kredit bank umum 73,7%.¹⁹²

Walaupun tingginya angka kredit ini, namun hanya berputar di area Pulau Jawa. Artinya, porsi kredit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak lebih dari 27%.¹⁹³ Situasi paradox antar sektor usaha lembaga keuangan, baik Perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya

¹⁹¹ Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, Presiden: Pakai Cara Inovatif. Dimuat dalam Media Indonesia, Kamis 10 Desember 2020. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/367808/inklusi-keuangan-ri-masih-rendah-presiden-pakai-cara-inovatif>

¹⁹² Otoritas Jasa Keuangan, "Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019."

¹⁹³ Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, op.cit

termasuk Lembaga Keuangan Mikro ini perlu mendapat perhatian pemerintah terutama para pengambil kebijakan terkait inklusi keuangan Indonesia.

Rendahnya inklusi keuangan Indonesia sebagai akibat dari kombinasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap LKM dan pengelolaan keuangan yang kurang mendukung masyarakat Indonesia. *Marginal Propensity to Consume*¹⁹⁴ masyarakat tumbuh, sesuai dengan trend. Alasan mendasar untuk ini adalah budaya menabung masyarakat yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK memperkenalkan produk tabungan ramah anak serta program AYO ke Bank.

Selain budaya tabungan yang buruk, akses keuangan yang rendah didukung oleh penetrasi perbankan yang rendah, transaksi pembayaran yang terbatas, akses kredit yang terbatas, dan akses layanan asuransi yang terbatas, yang semuanya disebabkan oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tanggungan yang cukup, seperti ditentukan oleh bank untuk memperoleh kredit, dan kurangnya minat lembaga keuangan untuk bekerja di sektor ini.

Guna mengatasi kondisi di atas, pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia saat ini sedang membuat terobosan baru di bidang keuangan digital. Sebagai hasil dari transaksi di dunia digital, literasi dan inklusivitas keuangan harus ditingkatkan. Terobosan ini berdampak besar terhadap naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan Lembaga Keuangan Mikro kepada masyarakat. Tercatat pembiayaan mencapai Rp 749,42 miliar pada 2020, menurut laporan OJK.

¹⁹⁴ Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*, disingkat MPC) adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposibel bertambah satu unit. jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan pendapatan disposibel, sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari satu. Angka MPC juga tidak mungkin negatif, di mana jika pendapatan disposibel terus meningkat, konsumsi terus menurun sampai nol (tidak ada konsumsi). Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Lihat, H. Abdul Wahab, *Pengantar Ekonomi Makro*, Alauddin University Press (Alauddin University Press, 2020), au-press@yahoo.com.

Jumlah tersebut naik 21,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 615,92 miliar.

Untuk menguatkan dan mempertahankan kenaikan pembiayaan LKM, OJK telah menetapkan tiga pilar untuk meningkatkan pengetahuan dan inklusi keuangan agar tidak tertinggal dari negara lain, infrastruktur besar, pendidikan, dan kreativitas. Pilar pertama adalah pendidikan masif, yang dilakukan dengan mengunjungi setidaknya 24 kota di Indonesia setiap tahun. Pilar kedua adalah penciptaan teknologi infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Pilar ketiga adalah inovasi dan kreasi, yang mencoba memaparkan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga program yang ada dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, Thomas Dewaranu, peneliti di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), berpendapat bahwa literasi keuangan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan. Inklusi keuangan, atau memperoleh akses ke sistem keuangan formal bagi mereka yang tidak bankable, harus diikuti dengan literasi keuangan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan.¹⁹⁵

Dengan melibatkan masyarakat sebagai nasabah yang sadar akan haknya dalam menggunakan layanan keuangan, pentingnya literasi sebagai faktor vital dalam perluasan inklusi keuangan Indonesia dapat ditingkatkan. Ini harus dimulai dengan pemahaman mendasar tentang konsep keuangan. Hanya 38% masyarakat umum yang memahami literasi keuangan saat penelitian ini dilakukan, menurut data OJK¹⁹⁶. Dengan hanya 0,85 persen, lembaga keuangan mikro memiliki pemahaman paling sedikit tentang inklusi keuangan. Hal ini penting bagi lembaga keuangan mikro dalam upaya memberikan kredit

¹⁹⁵ Thomas Dewaranu (Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Mikro Berada di Urutan Paling Bawah. Dimuat oleh Merdeka.com, Selasa, 2 November 2021. Diakses pada tanggal 27 September 2021. <https://www.merdeka.com/uang/pemahaman-masyarakat-tentang-lembaga-keuangan-mikro-berada-di-urutan-paling-bawah.html>

¹⁹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019."

kepada UKM sehingga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan.

Hingga kini, sekitar 92 juta orang dewasa di Indonesia tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Kehadiran lembaga keuangan non-bank seperti fintech tentu dapat membantu masyarakat *unbanked*, namun harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mengetahui layanan yang dapat mereka akses, risiko yang mereka hadapi, dan pengamanan yang harus mereka lakukan saat melakukan transaksi keuangan. Kesadaran masyarakat atau organisasi yang tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, disebutkan Davidsson¹⁹⁷ dalam penelitiannya memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalami kemerosotan kinerja.¹⁹⁸ Masalah akses layanan keuangan yang menjadi salah satu faktor lambatnya inklusi keuangan juga disampaikan oleh Sanjaya dan Nursechafia dalam penelitiannya yang menemukan bahwa dimensi aksesibilitas berdampak besar terhadap inklusi keuangan di Indonesia, sedangkan dimensi ketersediaan dan penggunaan memiliki pengaruh yang kecil. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa orang miskin memiliki akses terbatas ke layanan keuangan.¹⁹⁹

Kesadaran masyarakat akan haknya sebagai konsumen jasa keuangan harus dimulai dengan pemahaman dasar tentang jasa keuangan. Upaya untuk mengembangkan literasi layanan keuangan di masyarakat sulit karena masyarakat Indonesia beragam dari segi budaya, bahasa, tingkat pendidikan, cara hidup, dan fitur kegiatan ekonomi. Jika pemahaman dasar akan Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga jasa keuangan dapat diterima masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan, dimana masyarakat mulai bisa

¹⁹⁷ Per Davidsson, Leona Achtenhagen, dan Lucia Naldi, *Small firm growth, Foundations and Trends in Entrepreneurship*, vol. 6, 2010.

¹⁹⁸ Davidsson, P. (2015). Small Firm Growth Small Firm Growth Per Davidsson School of Management Queensland University of Technology (and Jönköping International Business School) Gardens Point , Brisbane 4001 Queensland, Australia Leona Achtenhagen Jönköping Intemational Busin. (January 2010).

¹⁹⁹ I Made Sanjaya dan Nursechafia, "Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif:," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18, no. 3 (2016): 281–306.

melakukan transaksi pembayaran, mengakses kredit, layanan asuransi, pasar modal dan tentunya memanfaatkan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai wadah jasa pelayanan keuangan.

Dengan demikian, pasar keuangan negara akan meningkat. Keterbukaan akses layanan jasa keuangan yang diberikan LKM dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kredit, berinvestasi dengan tabungan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat²⁰⁰, secara tidak langsung dapat menjadi faktor pemicu peningkatan inklusi keuangan. Pendapat Allen dan analisis di atas relevan dengan penelitian Hermes, et.al²⁰¹ menyatakan bahwa kontribusi dan kapasitas LKM pada peningkatan inklusi keuangan rumah tangga miskin dan usaha kecil ditentukan oleh sejauh mana pasar keuangan negara berkembang. Di satu sisi, pasar keuangan yang berkembang dengan baik menyediakan lingkungan di mana LKM dapat berkembang dan meningkatkan efisiensinya, dan berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih meningkat. Kontribusi LKM dalam inklusi keuangan dipertegas Beck & Demirgüç-kunt, dalam penelitian mereka bahwa inklusi keuangan memungkinkan para pelaku UMKM mengembangkan usaha dan menerapkan investasi yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi terbaru yang akan meningkatkan daya saing dan menciptakan inovasi.²⁰²

Indeks inklusi keuangan dihitung dengan menggunakan variabel aksesibilitas, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan sistem perbankan. Karena sektor keuangan merupakan bagian terpenting dari perekonomian Indonesia, maka sering dijadikan sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan menilai IFI di database

²⁰⁰ Franklin Allen et al., *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts are in the Development, Policy Research Working Paper 6290*, 2012.

²⁰¹ Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, Financial Development and the Efficiency of Microfinance Institutions.

²⁰² P Demirgüç-Kunt, A.; Beck, T.H.L.; Honohan, *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. (A World Bank policy research report)* (Washington, DC: Washington, D.C: World Bank, 2008).

provinsi, pembuat kebijakan dapat memprioritaskan reformasi dan mendorong desain kebijakan yang lebih berani berdasarkan temuan empiris, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan negara.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks inklusi keuangan akan meningkat jika dilakukan penguatan literasi keuangan secara masif bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat yang akhirnya menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Selain itu, pemerataan akses layanan jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia harus dilakukan, sehingga asas adil dan merata dalam menikmati akan jasa keuangan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari area perkotaan hingga pedesaan.

Sistem keuangan yang inklusif harus dapat diakses oleh semua pengguna, oleh karena itu harus menjangkau berbagai kalangan. Penetrasi perbankan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang dapat dilayani sektor jasa perbankan

D. Faktor Penyebab Rendahnya Inklusi Keuangan Lembaga Mikro di Indonesia

Salah satu tujuan penguatan inklusi keuangan, menurut Soyemi, et.al, untuk membuat sistem fintech lebih mudah diakses. Teknologi fintech semakin marak di Indonesia, dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. Sebagian besar fintech di Indonesia masih bergerak di bisnis pembayaran. Jumlah fintech yang menyalurkan kredit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah fintech yang melakukan pembayaran. Mengingat sebagian besar perusahaan fintech bercita-cita untuk menjangkau kelompok perkotaan dan pedesaan yang saat ini tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank (unbankable).²⁰³

Disatu sisi, inklusi keuangan memburuk di beberapa daerah akibat dari tingginya jumlah UMKM tidak dapat

²⁰³ Soyemi, K. A., Et.Al (2020). Financial Inclusion And Sustainable Development In Nigeria. *Journal Of Economics & Management*, 39, 105– 131.

mengembangkan usahanya (Churchill & Marisetty²⁰⁴; Li et al²⁰⁵; Murendo, et.al²⁰⁶; Lotto²⁰⁷; Niankara & Muqattash)²⁰⁸.

Orang berpenghasilan rendah dengan pendapatan yang tidak jelas dan tidak terduga, menurut Churchill, et.al, merupakan kelompok yang tidak dapat memperoleh jasa keuangan. Akses ke keuangan, di sisi lain, akan memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan dan melindungi diri mereka dari hal-hal yang tidak terduga. Pencurian uang tunai juga cukup umum.²⁰⁹

Sementara itu, di pasar negara berkembang, layanan tabungan informal terkadang dikaitkan dengan biaya administrasi yang tinggi. Orang miskin pada umumnya tidak dapat menabung, baik dalam bentuk tunai maupun dalam simpanan tersembunyi di bawah kasur atau dalam toples kaca, bahkan ketika mereka memiliki uang yang sederhana untuk dibelanjakan, karena mereka hidup di bawah tekanan kebutuhan

²⁰⁴ Churchill, S. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial Inclusion And Poverty: A Tale Of Fortyfive Thousand Households. *Applied Economics*, 52(16), 1777–1788.

²⁰⁵ Li, A., Et.Al. (2021). Financial Inclusion May Limit Sustainable Development Under Economic Globalization And Climate Change. *Environmental Research Letters*, 16(5), 54049.

²⁰⁶ Murendo, C., Et.Al. (2021). Financial Inclusion, Nutrition And Socio-Economic Status Among Rural Households In Guruve And Mount Darwin Districts, Zimbabwe. *Journal Of International Development*, 33(1), 86–108.

²⁰⁷ Lotto, J. (2020). Understanding Financial Inclusion In East Africa: How Does Tanzania Compare? *International Journal Of Finance & Economics*

²⁰⁸ Niankara, I., & Muqattash, R. (2020). The Impact Of Financial Inclusion On Consumers Saving And Borrowing Behaviours: A Retrospective Cross-Sectional Evidence From The UAE And The USA. *International Journal Of Economics And Business Research*, 20(2), 217–242.

²⁰⁹ Churchill, S. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial Inclusion And Poverty: A Tale Of Fortyfive Thousand Households. *Applied Economics*, 52(16), 1777–1788.

ekonomi yang kompleks (Alhassan, et.al²¹⁰; Cull, et.al²¹¹; Gyasi & Adam²¹²; Lu, Wu, & Liu²¹³;

Dengan belajar tentang literasi keuangan, memahami peristiwa ekonomi secara umum, dan tekad dalam mengambil keputusan keuangan yang akan menentukan kehidupan manusia di masa depan, literasi keuangan menyiratkan kemampuan untuk memilah kebutuhan keuangan, kebutuhan perencanaan keuangan, dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang akan menentukan kehidupan manusia di masa depan. Manusia membutuhkan pendidikan literasi keuangan yang komprehensif dan terencana.

Selain itu inklusi keuangan yang rendah akses dari kesadaran masyarakat yang rendah pula, belum lagi skill pengelolaan keuangan yang tidak memadai ikut menimbulkan budaya menabung yang buruk dan berdampak pada *Marginal Propensity to Consume*²¹⁴ masyarakat tumbuh.

Literasi keuangan didefinisikan sebagai proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai produk dan konsep keuangan dengan menggunakan informasi, instruksi, dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kesadaran akan bahaya keuangan. Mampu menangani pertanggung jawaban asuransi dan meningkatkan kemungkinan membuat keputusan keuangan yang sehat. Memahami item keuangan dan mampu mengambil langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang

²¹⁰ Alhassan, A., Li, L., Reddy, K., & Duppati, G. (2021). The Relationship Between Political Instability And Financial Inclusion: Evidence From Middle East And North Africa. *International Journal Of Finance & Economics*, 26(1), 353–374.

²¹¹ Cull, R., Demirguc-Kunt, A., & Morduch, J. (2021). *Banking The World: Empirical Foundations Of Financial Inclusion*. MIT Press.

²¹² Gyasi, R. M., & Adam, A. M. (2021). Does Financial Inclusion Predict A Lower Risk Of Loneliness In Later Life? Evidence From The Ageheapsywel-Heaseeb Study 2016–2017. *Aging & Mental Health*, 25(7), 1254–1261.

²¹³ Lu, Z., Wu, J., & Liu, J. (2020). Bank Concentration And SME Financing Availability: The Impact Of Promotion Of Financial Inclusion In China. *International Journal Of Bank Marketing*.

²¹⁴ H. Abdul Wahab, *Pengantar Ekonomi Makro*, Alauddin University Press (Alauddin University Press, 2020).

(Dabla-Norris, et.al²¹⁵; Akanfe, et.al²¹⁶; Nizam, et.al²¹⁷; Usman, et.al²¹⁸; Siddik & Kabiraj²¹⁹). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi, menurut Menurut Xu, karena penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasi yang rendah. Akibatnya, UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi jangka panjang.²²⁰ Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta lambatnya pertumbuhan usaha baru, kata Huang, et.al²²¹ dan Demirgüç-Kunt, et.al²²², akan memerlukan perhatian yang cukup besar di masa mendatang untuk mengubah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

Keberadaan UMKM diproyeksikan akan memberikan kontribusi yang cukup kuat terhadap kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi, seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin,

²¹⁵ Dabla-Norris, E., Et.Al (2021). Distinguishing Constraints On Financial Inclusion And Their Impact On GDP, TFP, And The Distribution Of Income. *Journal Of Monetary Economics*, 117, 1–18.

²¹⁶ Akanfe, O., Et.Al (2020). Design Of An Inclusive Financial Privacy Index (INF-PIE): A Financial Privacy And Digital Financial Inclusion Perspective. *ACM*

²¹⁷ Nizam, R., Et.Al (2020). Financial Inclusion And Firms Growth In Manufacturing Sector: A Threshold Regression Analysis In Selected Asean Countries. *Economies*, 8(4), 80.

²¹⁸ Usman, M., Et.Al (2021). Does Financial Inclusion, Renewable And Non-Renewable Energy Utilization Accelerate Ecological Footprints And Economic Growth? Fresh Evidence From 15 Highest Emitting Countries. *Sustainable Cities And Society*, 65, 102590.

²¹⁹ Siddik, M. N. A., & Kabiraj, S. (2020). Digital Finance For Financial Inclusion And Inclusive Growth. In *Digital Transformation In Business And Society* (Pp. 155–168). Springer.

²²⁰ Xu, X. (2020). Trust And Financial Inclusion: A Cross-Country Study. *Finance Research Letters*, 35, 101310.

²²¹ Huang, R., Et.Al (2021). The Nexus Between Financial Inclusion And Economic Development: Comparison Of Old And New EU Member Countries. *Economic Analysis And Policy*, 69, 1–15.

²²² Demirgüç-Kunt, A., Et.Al (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion And Opportunities To Expand Access To And Use Of Financial Services. *The World Bank Economic Review*, 34(Supplement_1), S2–S8.

banyaknya dampak negatif, pemerataan pendapatan, dan segala karakteristik negatif lainnya.

UMKM yang merupakan bagian dari sektor manufaktur di Indonesia berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja di tanah air secara keseluruhan. Salah satu ciri yang paling menonjol dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah kurangnya pembiayaan. Sedangkan uang merupakan aspek penting dalam memungkinkan peningkatan produksi dan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bagi pengusaha mikro dan pedagang dari kelompok ekonomi kurang mampu (usaha kecil).

Tantangan yang sering dihadapi oleh kalangan ekonomi miskin ini, terutama kekurangan modal, yang menyebabkan mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam mengembangkan perusahaan mereka. Pengusaha atau pedagang kecil terjebak membutuhkan dana, sehingga para pelaku dan pengusaha mikro akan beralih ke rentenir atau rentenir untuk bantuan modal, dana, atau pinjaman perusahaan. Karena kebutuhan yang mendesak, banyak dari pengusaha atau pedagang kecil ini kurang memperhatikan standar yang harus dipenuhi penyewa sebelum jumlah uang atau uang tunai (Ratnawati²²³; Omar & Inaba²²⁴; Sahay et.al).²²⁵

Beberapa hasil dapat dicapai, di antaranya UMKM berbasis tekfin menghadapi berbagai hambatan di tingkat pelaku usaha UMKM. Berikut beberapa hambatan yang menghalangi pelaku usaha UMKM untuk menggunakan atau mengadopsi pinjaman berbasis teknologi, sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha UMKM ragu menggunakan perbankan berbasis bank, apalagi perbankan berbasis fintech;

²²³ Ratnawati, K. (2020). The Impact Of Financial Inclusion On Economic Growth, Poverty, Income Inequality, And Financial Stability In Asia. *The Journal Of Asian Finance, Economics, And Business*, 7(10), 73–85.

²²⁴ Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does Financial Inclusion Reduce Poverty And Income Inequality In Developing Countries? A Panel Data Analysis. *Journal Of Economic Structures*, 9(1), 1–25.

²²⁵ Sahay, M. R., Et.Al (2020). The Promise Of Fintech: Financial Inclusion In The Post COVID-19 Era. International Monetary Fund.

- 2) Karena minimnya literasi keuangan, pelaku usaha merasa tidak mengetahui seluk-beluk penggunaan layanan pembiayaan berbasis teknologi tekfin.
- 3) Pentingnya sistem fintech di kalangan UMKM terhambat oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha belum mendapatkan informasi yang jelas, baik melalui media maupun melalui sosialisasi massal secara langsung oleh pemberi layanan pinjaman, sehingga masih enggan menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi ini.
- 4) Banyaknya wawasan dan hoaks yang tidak menguntungkan tentang kerentanan jenis pengaturan pinjaman keuangan yang beredar di kalangan pelaku usaha UMKM. Jika pengguna meminjam uang melalui teknologi fintech, penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi ini tidak dapat memastikan privasinya.
- 5) Saat mengadopsi layanan pembiayaan berbasis teknologi tekfin, pelaku usaha UMKM takut terjerat kasus penipuan yang menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa ada pelaku usaha yang mengetahui atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang layanan pinjaman ini. Namun, mereka masih enggan memberikan modal perusahaan karena menganggap pinjaman berbasis tekfin terlalu memberatkan karena persyaratan dan tagihan yang harus dibayar setiap bulan, yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan pendapatan pelaku usaha itu sendiri. Temuan penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha UMKM, serta memberikan jaminan keamanan keuangan kepada pelaku usaha, dalam rangka mempercepat dan memperluas inklusi keuangan.

E. Peluang, Tantangan, dan Solusi Peningkatan Indeks Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

1. Peluang

Dengan populasi lebih dari 260 juta orang, Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara Pasifik. Enam puluh persen penduduk berusia di bawah 35 tahun, dan mereka disebut sebagai "penduduk asli digital" di era internet. Milenial dan digital native ini memiliki persentase penetrasi internet dan ponsel yang tinggi, dan angka ini terus meningkat. Akibatnya, Indonesia adalah tambang emas peluang fintech yang luar biasa.

Sektor fintech di Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang melek teknologi namun belum memiliki rekening bank. Pengguna aplikasi tekfin dapat memanfaatkan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, atau agama. Agar fintech dapat diimplementasikan tepat waktu, pemerintah harus membuat regulasi yang melindungi kepentingan publik. Lebih lanjut, mengingat peluang dan potensi start-up yang dipimpin oleh anak muda, pemerintah harus membina dan mendukung kolaborasi antar lembaga serta membuka kolaborasi dengan perusahaan fintech muda untuk membangun bagian-bagian baru perekonomian.

Selain itu peluang datang dari sejumlah program yang kini diimplementasikan pemerintah bekerjasama dengan lembaga atau stakeholder lainnya yang konsen dan fokus pada masalah inklusi keuangan. Sebut saja pihak Perbankan dan non perbankan.

Pekerjaan ini juga dilakukan melalui beberapa program, antara lain:

- Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)
- Simpanan Pelajar
- Simpanan Mahasiswa dan Pemuda
- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
- Bank Wakaf Mikro

- Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM
- Kredit Usaha Rakyat
- Layanan Keuangan Mikro

Dalam rangka mendorong inklusi keuangan yang signifikan dan berjangka panjang, OJK bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Industri Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan utama lainnya menyelenggarakan Bulan Keuangan Inklusif di seluruh Indonesia pada bulan Oktober. Berbagai inisiatif, seperti kampanye dan sosialisasi terkait keuangan inklusif, serta berbagai penjualan produk/layanan keuangan dengan insentif seperti diskon, bonus, hadiah, cashback, dan promosi khusus akan dilakukan pada bulan Oktober selama Bulan Keuangan Inklusif. Kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan, serta akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga keuangan, pegadaian, dana pensiun, dan fintech, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yuk, wujudkan inklusi keuangan menjadi kenyataan bagi semua orang.

Dari sudut pandang masyarakat umum atau konsumen, sebagian masyarakat masih menolak untuk bertransaksi dengan bank atau lembaga keuangan lainnya karena rumitnya persyaratan administrasi, seperti permintaan izin usaha dan laporan keuangan yang layak dan sehat bagi calon debitur. Hal ini membawa konsekuensi sampingan dengan dikeluarkannya lembaga keuangan dari masyarakat. Faktor lainnya adalah margin bank syariah yang lebih tinggi dari bank biasa, terutama dalam pembiayaan murabahah, yang mengurangi daya saing mereka dibandingkan dengan bank normal. Ada juga keengganan masyarakat atau konsumen (penabung) untuk menggunakan jasa bank syariah karena keuntungan atau bonus yang diberikan bank syariah kurang menarik dibandingkan dengan yang ditawarkan bank tradisional. Lebih lanjut, menabung merupakan kegiatan hemat biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka harus pergi ke bank, mengantri, dan membayar biaya administrasi yang relatif tinggi. Keengganan

masyarakat bertransaksi dengan lembaga jasa bank ini membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Mikro yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi wadah tepat masyarakat menggunakan jasa LKM dalam bertransaksi.

Inisiatif-inisiatif berikut meliputi penciptaan pendidikan digital, dukungan program pendidikan dan literasi keuangan syariah terintegrasi serta pendidikan berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur pendidikan, dan penguatan taktik aliansi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Sementara itu, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan memperkuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan program kerja untuk meningkatkan akses keuangan, serta mengembangkan dan memperkuat sistem informasi. Hal ini semua menjadi peluang untuk menaikkan indeks inklusi keuangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

2. Tantangan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meminjamkan uang kepada orang miskin yang tidak mampu meminjam dari bank sebagai alternatif pinjaman mikro. Pada akhirnya, LKM menyediakan jasa keuangan, tetapi tidak mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah bahwa pemberi pinjaman kredit mikro membutuhkan waktu lama untuk memaksimalkan pendapatan mereka, yang berarti bahwa inisiatif keuangan mikro syariah membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuannya. Kesulitan lain, menurut Shinkafi dkk, adalah bahwa meminjamkan kepada orang miskin justru dapat membuat mereka semakin miskin jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan arus kas yang dibutuhkan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Pastikan efisiensi pinjaman mikro selalu sulit dan memakan waktu untuk keuangan mikro.

LKM menghadapi tantangan nyata dalam menerapkan inklusi keuangan secara efektif. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan latar belakang pinjaman mikro bagi mereka yang mengambil pinjaman, kurangnya pelatihan atau pendidikan khusus untuk mendidik

peminjam, kebijakan pemerintah yang masih belum berpihak pada Lembaga Keuangan Mikro, karena adanya kapitalisasi, kurangnya kesadaran pinjaman mikro di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, penulis merekomendasikan untuk memberikan inisiasi keuangan mikro dengan pelatihan atau pendidikan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh bagi kalangan LKM dalam menangani kreditur mikro, terutama masyarakat dengan kehidupan terbatas.

Dilain pihak, pengujian dan sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Inklusi keuangan berupa kemudahan akses, kualitas, dan penggunaan layanan lembaga keuangan oleh UMKM. Ketiga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM. Saat ini telah terdapat Financial Tecnology (Fintech) yang menggantikan sistem kerja lembaga keuangan tradisional. Marginingsih menjelaskan bahwa fintech oleh lembaga keuangan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional.²²⁶ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan LKM untuk belajar dan mengimplementasikan fintech.

3. Solusi

Kinerja setiap LKM akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berinovasi agar sesuai dengan selera dan preferensi konsumen, yang akan memperluas jangkauan pasar dan memberikan keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Karena tingkat persaingan semakin meningkat setiap hari, LKM harus kreatif dan imajinatif, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan mereka, yang akan memotivasi karyawan.

Kreatifnya LKM harus didukung dengan kesiapan infrastruktur pendukung dan akses terhadap teknologi informasi. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan pemanfaatan Palapa Ring secara umum

²²⁶ Marginingsih, R. (2019). *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*.

terus meningkat. Pemerintah juga telah meluncurkan LokasiKu, sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan, dan mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan Indonesia.

Dibandingkan dengan ekonomi industri Farrokhian dan Soleimani²²⁷ mengklaim bahwa LKM menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengetahuan teknologi dan lingkungan bisnis yang tidak bersahabat, yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.

Untuk itu pemerintah meningkatkan edukasi literasi dan inklusi keuangan dengan mengeluarkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, pelaku usaha di sektor jasa keuangan mendapatkan pelatihan setahun sekali. Berikut adalah persentase literasi keuangan dan indeks keuangan responden berdasarkan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

Untuk meningkatkan indeks dan literasi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2020 untuk memberikan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau, guna tetap menjaga hubungan baik tersebut. dan memenuhi target pada tahun 2024. Sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan kesenjangan kesejahteraan individu dengan masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melalui SNKI bertujuan untuk meningkatkan akses dan jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, meningkatkan akses permodalan dan mendukung pengembangan LKM, meningkatkan produk dan layanan keuangan digital, serta meningkatkan

²²⁷ Farrokhian dan Soleimani, "Assessing capabilities for innovation - The case of Iranian kalleh meat product company."

integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan melalui layanan digital.

Menurut peneliti, beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman dalam kerangka peningkatan inklusi keuangan sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia antara lain;

Pertama, Literasi Keuangan harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan dan menyeluruh dari pelosok kota hingga pedesaan. Dari orang berpendidikan hingga tak berpendidikan dengan melakukan pendekatan yang berbeda, sehingga seluruh masyarakat sasaran inklusi memahami akan pentingnya inklusi keuangan bagi masa depan dan kehidupan mereka.

Kedua, Dibukanya akses layanan keuangan Lembaga Keuangan Mikro bagi semua masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang regulasi memberikan suntikan modal bagi LKM sehingga LKM dapat memberikan pinjaman bagi masyarakat sasaran inklusi secara keseluruhan. Pemerintah juga wajib menjadi pengawas bagi kapitalisasi yang ikut menghambat oprasionalisasi LKM di Indonesia.

Ketiga, Pemerintah bersama seluruh stakeholder yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro mensosialisasikan betapa pentingnya masyarakat memiliki tabungan sebagai jaminan kehidupan di masa mendatang. Program Tabungan menyusuri pelosok dan program Laku Pandai harus terus digalakkan dan diawasi efektifitasnya sehingga dapat diketahui dampaknya kepada masyarakat sasaran inklusi.

Keempat, Pihak lembaga jasa keuangan seperti Perbankan harus bisa bersinergis dengan Lembaga Keuangan Mikro sehingga persoalan penetrasi perbankan yang rendah dapat ditutupi oleh LKM, dengan begitu seluruh masyarakat sasaran dapat tersentuh layanan keuangan. Penetrasi ini harus terus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

BAB V

INKLUSI KEUANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Prolog

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2030. SDG pertama, tentang pengentasan kemiskinan, adalah yang paling menjadi fokus pemerintah dan pemangku kepentingan. Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) memberikan data tentang kemiskinan, yang menunjukkan bahwa persentase penduduk yang cukup besar masih miskin dan tingkat kemiskinan menurun secara perlahan dari tahun ke tahun. Selama dua dekade terakhir (2001–2018), persentase penduduk miskin turun 0,5 persen, dan jumlah penduduk miskin berkurang 720 juta. Selain itu, Indeks Kesenjangan Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, yang masing-masing menyumbang 2,78 persen dan 0,77 persen, rata-rata tetap tinggi.²²⁸

Banyak penelitian empiris menemukan kaitan antara penguatan sektor keuangan, khususnya keuangan formal, dengan peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, sistem keuangan inklusif membantu dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan.

Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan inklusif akan memberdayakan individu, mempermudah pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dan ekonomi, dan melindungi dari guncangan ekonomi.

²²⁸ Nursini Nursini, "Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia," *Development Studies Research* 7, no. 1 (2020): 153–166.

Akibatnya, keuangan inklusif akan sangat membantu masyarakat marjinal dan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan pendapatan mereka, mengumpulkan kekayaan, mengelola risiko, dan melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran. Akibatnya, pasar keuangan akan menjadi jantung perekonomian, memobilisasi tabungan, memberikan pinjaman kepada perusahaan, manajemen risiko, dan mempercepat perdagangan global dengan menawarkan fasilitas transfer dan pembayaran, yang semuanya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas penduduk dunia, terutama yang miskin dan rentan, tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Menurut Bank Dunia (2010), 50 persen penabung menyimpan uang mereka di lembaga keuangan resmi seperti bank, sementara 18 persen menabung di lembaga informal seperti arisan, klub tabungan, dan organisasi dana bergulir, dan 32 persen lainnya tidak memiliki tabungan. Dalam hal pinjaman, 33 persen individu lebih memilih untuk menggunakan sektor keuangan informal, yang meliputi teman, keluarga, tetangga, majikan, dan rentenir, dibandingkan dengan sektor perbankan formal, yang menyumbang 17 persen. Anehnya, hampir 40% penduduk tidak memiliki akses ke pembiayaan produk dan layanan resmi maupun informal.

Sejumlah kendala menghambat akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Elemen-elemen ini dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor sisi permintaan dan penawaran. Di sisi permintaan, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan layanan keuangan, pendapatan yang buruk, kurangnya keamanan, dan pengucilan sosial, semuanya menghambat akses publik. Jarak antara kantor cabang bank dengan rumah masyarakat, prosedur yang berbelit-belit, produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dipahami,

perilaku staf, dan jam operasional bank yang ketat merupakan kendala yang seringkali menghalangi individu untuk bergabung dengan sektor keuangan resmi.

Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih kekurangan akses ke layanan keuangan formal, keuangan inklusif menjadi sangat penting. Selanjutnya, industri keuangan formal adalah utilitas publik, setiap orang berhak atas berbagai barang dan jasa keuangan formal yang berkualitas tinggi, tepat waktu, mudah, transparan, dan hemat biaya. Akibatnya, semua sektor masyarakat harus memiliki akses ke barang dan jasa keuangan formal, dengan fokus pada sasaran inklusi keuangan yakni, masyarakat miskin, kelompok berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, pekerja migran, dan individu yang tinggal di tempat terpencil.

B. UMKM dan Kemiskinan

Usaha kecil dan informal telah terbukti memainkan peran penting atau esensial dalam mengatasi implikasi dan dampak krisis ekonomi 1997 di Indonesia. Kelompok kecil dan informal di sektor usaha, di sisi lain, telah mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi Indonesia selama ini. Karena usaha kecil dan informal memiliki berbagai keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah, maka mereka memiliki posisi yang strategis. Industri ini memiliki beberapa manfaat, antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya lokal, serta dapat beradaptasi secara wajar.

Sektor UMKM memainkan berbagai fungsi penting, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Kendala dan masalah yang berkaitan dengan uang, kompetensi manajemen perusahaan, dan kualitas sumber daya manusia. Batasan dan tantangan perusahaan kecil dan informal lainnya berasal dari sulitnya memperoleh akses ke pengetahuan dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang mengakibatkan terbatasnya kapasitas usaha.

Lembaga Keuangan Mikro saat ini tersedia untuk membantu masalah kekurangan modal. Lembaga keuangan mikro, juga dikenal sebagai lembaga keuangan mikro, adalah organisasi keuangan yang menawarkan layanan keuangan kepada usaha kecil dan mikro, serta masyarakat berpenghasilan rendah, yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan tradisional dan berorientasi pasar.

Keuangan mikro mengacu pada layanan keuangan dengan nilai kurang dari Rp 50 juta. Target atau segmen keuangan mikro, di sisi lain, selalu bersentuhan dengan orang-orang yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Petani, nelayan kecil (PNK), dan masyarakat pedesaan lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan tergolong mereka yang berpenghasilan kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun.²²⁹

Pengentasan kemiskinan, menurut Marguiret Robinson (2000), dapat dicapai melalui berbagai fasilitas dan program, termasuk makanan, kesehatan, perumahan, pendidikan, keluarga berencana, dan, tentu saja, pinjaman kredit mikro.

Inklusi keuangan tidak hanya terbatas pada peningkatan akses masyarakat ke sektor keuangan formal dan menumbuhkan minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank; juga perlu didorong untuk memberikan fasilitas kredit/kredit mikro kepada masyarakat dan UMKM. Oleh karena itu, inklusi keuangan harus dilihat sebagai salah satu metode pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pinjaman kredit mikro adalah salah satu metode yang paling berhasil untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, harus disebutkan bahwa ketika pinjaman diberikan kepada orang yang sangat miskin, mereka hampir sering tidak dilunasi. Hal ini

²²⁹ Supriyanto, 'Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3.1 (2012), 1-16 <<https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>>.

dapat dimaklumi, mengingat mereka (yang sangat miskin) tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki kegiatan ekonomi.

Inisiatif makanan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk yang termiskin dari yang miskin. Orang lain yang tergolong miskin tetapi *economically active working poor* atau orang-orang dengan *lower income* memang memiliki pendapatan, tetapi tidak banyak. Untuk itu, diperlukan strategi, subsidi program, atau jenis pinjaman mikro yang sesuai untuk masing-masing penduduk miskin tersebut.

Tingkat pengangguran yang tinggi, baik pengangguran yang terlihat maupun yang terselubung, memperburuk ketakutan akan kemiskinan. Di Indonesia, diperkirakan ada 42,5 juta orang menganggur, dengan 2,5 juta orang memasuki dunia kerja setiap tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sekitar 5% tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja baru; setidaknya 8% pertumbuhan diperlukan untuk menyerap tenaga kerja baru secara penuh. Pertumbuhan ekonomi sepertinya tidak akan kuat di tahun-tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi yang sebenarnya belum pulih karena investasi yang buruk, pembiayaan yang tidak memadai, dan kinerja ekspor yang tidak menentu.²³⁰

Untuk itu, pemerintah harus berupaya memperlambat laju pertumbuhan penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin yang hidup *transient poor* akan meningkat seiring dengan kenaikan biaya kebutuhan pokok yang didorong oleh kenaikan harga BBM. Orang-orang miskin tersebut dapat dibantu dengan kompensasi pembayaran subsidi bensin karena mereka pada dasarnya memiliki potensi untuk hidup dan meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Pendanaan bantuan dalam bentuk subsidi atau transfer langsung, di sisi lain, tidak akan mampu mengangkat masyarakat miskin yang

²³⁰ Ibid.

chronic poor dari kemiskinan. Karena tidak mengatasi akar permasalahan, yaitu minimnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Akibatnya, pemerintah harus memberikan akses instan kepada masyarakat miskin terhadap unsur-unsur produksi.²³¹

UMKM menyediakan berbagai kegiatan strategis di Indonesia, termasuk masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Meningkatkan pendapatan masyarakat, menghilangkan pengangguran dan kemiskinan, serta urbanisasi adalah contoh fungsi dan peran ekonomi-sosial-politik. Meskipun demikian, tujuan dan signifikansi UMKM sangat penting.

Namun, saat ini belum ada definisi atau teori yang sama untuk menangani semua tantangan yang ada di UMKM Indonesia. Sementara itu, filosofi Barat saat ini tidak bisa dipaksakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi UMKM Indonesia. Namun, UKM sebagai organisasi ekonomi/bisnis dengan struktur yang sangat sederhana, sedikit kegiatan formal, teknologi sederhana, manajemen fleksibel, sulit membedakan kekayaan pribadi dari aset bisnis, dan administrasi yang sederhana (bahkan sering tidak memiliki) dan tanpa penjabaran, memiliki beberapa karakteristik yang berbeda.

UMKM adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan orang-orang dalam perekonomian Indonesia, dan mereka menyumbang lebih dari 99 persen dari struktur perekonomian nasional. Jika dicermati, keberadaan UMKM cukup menjadi teka-teki. Di satu sisi dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan dari keterpurukan ekonomi dan menjadi tumpuan impian masyarakat. Karena kemampuannya dalam menyediakan banyak lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi, serta berperan

²³¹ Ibid.

sebagai motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, hidupnya masih disertai dengan sejumlah pengekanan dan keterbatasan internal dan eksternal.

Sebenarnya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UMKM memiliki banyak harapan. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menyerap lebih dari 99,45% angkatan kerja. Kontribusinya terhadap PDB, bagaimanapun, masih lebih dari 30%. Upaya memajukan sektor UMKM tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Pengembangan UMKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja saat ini, sehingga menurunkan pengangguran.

Miskin (kemiskinan) adalah masalah yang dihadapi banyak negara, terutama negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang rumit, baik dari segi penyebab maupun cakupannya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kemiskinan bersifat multifaset, termasuk semua aspek kebutuhan manusia yang berbeda sifatnya. Selain itu, banyak elemen keinginan manusia terkait erat satu sama lain.

Menurut teori ekonomi pembangunan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didorong oleh perluasan sektor industri akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, yang menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja. Peningkatan kemungkinan pekerjaan baru akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, peluang kerja yang lebih baik berarti pengangguran yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat, yang diperkirakan akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Menurut Todaro, pendapatan yang lebih tinggi akan mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan jika output produksi juga dapat ditingkatkan, yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,

pengurangan kemiskinan, disparitas pendapatan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.²³²

Seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menurut Amarta Sen (Nobel Prize in Welfare Economics, 1998). "Harga diri" menentukan akses yang menjadi hak setiap orang. Harga diri beberapa orang hanya didasarkan pada kemampuan mereka untuk bekerja. Akibatnya, peningkatan output saja tidak akan cukup untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (tingkat pertumbuhan ekonomi). Dengan demikian, jika pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin adalah tujuan terpenting dari semua kegiatan, dan usaha kecil, termasuk industri kerajinan kecil (UMKM), dapat dianggap sebagai tujuan utama. penunjang perekonomian rakyat dalam tujuan ini. Oleh karena itu, topik memanusiakan manusia, mencapai kesejahteraan sosial ekonomi, dan menggunakan nasionalisme untuk memastikan masa depan orang miskin harus menjadi yang terdepan dalam setiap strategi pembangunan di Indonesia sekarang dan di masa depan.²³³

Upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu mengintegrasikan inklusi sosial, keuangan, dan ekonomi. Inklusi sosial memberi masyarakat akses seluas mungkin terhadap kebutuhan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, dan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya. Dengan meningkatkan kelayakan masyarakat, keuangan inklusif memperluas akses ke sistem keuangan formal. Ekonomi inklusif, di sisi lain, berupaya

²³² Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Cet.4. (Jakarta: Jakarta : Erlangga, 1998).

²³³ P. Eko Prasetyo, 'Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* , 2.1 (2008), 1-13.

memberikan peluang atau akses kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan, seperti melalui pemberdayaan UMKM.

Dalam hal penyediaan keuangan mikro bagi UMKM yang selama ini diabaikan oleh lembaga perbankan tradisional, fungsi yang dijalankan lembaga perbankan belum cukup menonjol dalam rencana keuangan nasional inklusif. Padahal sektor perbankan memiliki pangsa pasar terbesar yang merupakan domain Bank Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional yang tepat sasaran, dengan penekanan yang lebih besar pada pemberdayaan lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pembiayaan kepada UKM.

C. Relasi Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan

Banyak negara dan organisasi kerja sama regional-multilateral, seperti G20, OECD, Bank Dunia, IMF, ADB, dan ASEAN, masih mengkhawatirkan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai kebijakan dikembangkan. Sistem inklusif keuangan merupakan salah satu upaya Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Distribusi pendapatan juga menjadi salah satu karakteristik yang mempengaruhi inklusi keuangan, menurut beberapa penelitian. Demircuc-Kent, Beck, dan Honohan, yang mempelajari dampak pembangunan intermediasi keuangan terhadap masyarakat miskin dan ketimpangan pendapatan. Temuan menunjukkan bahwa ekspansi sektor keuangan memiliki pengaruh yang menguntungkan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan menurunkan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Akses ke pembiayaan pro-miskin, menurut Demircuc-Kunt, Beck, dan Honohan, akan membantu

mengurangi disparitas pendapatan dan kemiskinan lebih cepat.²³⁴

Akibatnya, keuangan inklusif akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan pendapatan mereka, mengumpulkan kekayaan, mengelola risiko, dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan pembayaran. fasilitas. Akibatnya, pasar keuangan akan menjadi jantung perekonomian, memobilisasi tabungan, memberikan pinjaman kepada perusahaan, manajemen risiko, dan mempercepat dunia usaha melalui fasilitas transfer dan pembayaran, yang semuanya akan berkontribusi pada keberhasilan ekonomi.

Kemiskinan adalah masalah lain yang harus ditangani jika pembangunan jangka panjang ingin dicapai. Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di kawasan ASEAN. Menurut angka dari Bank Pembangunan Asean, tingkat kemiskinan Indonesia adalah 9,8% pada tahun 2018. Ini berarti bahwa lebih dari 28.000.000 orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia lebih rendah dari Thailand, yakni 7,2 persen.

Industri perbankan merupakan salah satu bidang yang dapat membantu pengentasan kemiskinan melalui inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan bahwa kelompok yang kurang beruntung dan orang-orang berpenghasilan rendah memiliki akses yang terjangkau ke layanan keuangan dan kredit yang diperlukan.²³⁵ Inklusi keuangan telah menjadi prioritas dalam skala dunia.

²³⁴ Demirgüç-Kunt, A.; Beck, T.H.L.; Honohan, *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. (A World Bank policy research report)*.

²³⁵ Ouma, Odongo, dan Were, "Mobile financial services and financial inclusion: Is it a boon for savings mobilization?", Lihat juga; Vigneswara Swamy, "Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households," *World Development* 56 (2014): 1–15., Lihat; Zins dan Weill, "The determinants of financial inclusion in Africa."

Menurut Global Findex (Indeks Inklusi Keuangan) Bank Dunia, hanya 48 persen orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan, sedangkan sisanya 52 persen, atau 60 juta orang Indonesia, tidak.²³⁶ Ada berbagai alasan mengapa orang Indonesia tidak memiliki rekening di organisasi keuangan. Ada 72 persen individu yang tidak memiliki rekening bank karena tidak memiliki cukup uang untuk ditabung; kelompok ini miskin atau berpenghasilan rendah, oleh karena itu uang mereka terutama dihabiskan untuk konsumsi. Penjelasan tentang keterpencilan dari lembaga keuangan diberikan oleh 33 persen responden, sementara hanya 1,69 persen dari populasi orang dewasa yang menjawab bahwa mereka kurang motivasi atau tidak memerlukan akun.²³⁷

Menurut Sarma dan Pais, Inklusi keuangan mengacu pada langkah-langkah yang menjamin bahwa semua anggota ekonomi memiliki akses yang mudah, dan penggunaan, sistem keuangan formal.²³⁸ Sementara Khan menyatakan, penguatan basis tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses intermediasi akan mengikuti peningkatan inklusi keuangan.²³⁹ Melalui Peningkatan akses masyarakat terhadap uang dapat memperluas pilihan mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai pelaku ekonomi, dan karenanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian tertentu, inklusi keuangan memiliki dampak yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, menyiratkan bahwa

²³⁶ The World Bank, "UFA2020 Overview: Universal Financial Access by 2020."

²³⁷ Dhimas Ilham Prasetya and Hendra Kusuma, Ida Nuraini, 'Jurnal Ilmu Ekonomi', *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1.2 (2016), 88–104.

²³⁸ Sarma dan Pais, "Financial inclusion and development."

²³⁹ Shri H R Khan, "H R Khan : Financial inclusion and financial stability : are they two sides of the same coin ?," *Indian Bankers Association & Indian Overseas Bank, Chennai*, no. November 2011 (2011): 1–12.

perluasan inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁴⁰

Salah satu fitur yang paling signifikan dari pertumbuhan inklusif, menurut Park dan Mercado, adalah adanya sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan dan pendanaan.²⁴¹

Dengan menyeimbangkan konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan, masyarakat miskin dapat mencegah kerugian akibat guncangan ekonomi. Ada dua cara untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai permulaan, lebih banyak sumber keuangan tersedia untuk memperluas akses ke pendidikan, bisnis, dan pengembangan manusia, yang semuanya membantu mengentaskan kemiskinan. Kedua, lebih banyak akses ke barang dan jasa keuangan mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efektif, memungkinkan individu menggunakan uang dengan lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan.

²⁴⁰ Prasetya dan , Ida Nuraini, "Jurnal Ilmu Ekonomi."

²⁴¹ Cyn-Young Park dan Rogelio Mercado, "Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia," *The Singapore Economic Review* 63, no. 1 (2018): 185–206.

BAB VI PENUTUP

Keuangan mikro secara historis memainkan peran dalam mengatasi masalah pembangunan, terutama kemiskinan. Fungsi ini masih diperlukan, dan harapan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap keuangan mikro semakin meningkat. Harapan yang tumbuh ini sebagai respon terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, serta persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Belum lagi pengaruh globalisasi dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan layanan digital.

Dengan fenomena ini, komitmen dan keberpihakan para pelaku terkait terhadap pengembangan keuangan mikro menjadi sangat penting. Dimulai dengan kemauan politik para pemimpin negara, lembaga pemerintah, dan regulator, yang diwujudkan dalam dokumen kebijakan yang memungkinkan produk dan layanan keuangan mikro tumbuh dan berkembang. Kemudian ada pedoman operasional yang memungkinkan skema keuangan mikro berjalan dengan baik, baik dalam bentuk kredit mikro, jaminan kredit mikro, asuransi mikro, dan sebagainya.

Penguatan tata kelola perusahaan yang sangat baik, yang dapat meningkatkan lembaga pengelolaan keuangan mikro dan memungkinkan mereka untuk tumbuh secara berkelanjutan, juga penting. Penguatan tata kelola dilengkapi dengan pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak hanya mampu menjalankan prosedur dengan militansi dan kejujuran, tetapi juga berinovasi dan menjadi wirausahawan yang amanah. Semuanya dibantu oleh pemanfaatan perangkat teknologi informasi yang memungkinkan proses bisnis keuangan mikro berjalan lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta mikro dan kecil. pemain perusahaan.

Tingkat inklusi keuangan di kalangan masyarakat umum diperkirakan akan meningkat seiring dengan penguatan tata kelola lembaga keuangan yang mengelola keuangan mikro, serta penggunaan teknologi informasi yang meluas.

Peningkatan inklusi keuangan akan memberikan masyarakat umum akses ke layanan keuangan yang penting untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif. Partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat akan meningkatkan peluang kerja, meningkatkan kualitas hidup warga, dan meminimalkan disparitas antara warga dan wilayah.

chek 2

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

26 %

INTERNET SOURCES

12 %

PUBLICATIONS

12 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ojk.go.id Internet Source	5 %
2	jagoakuntansi.com Internet Source	1 %
3	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	1 %
4	www.bi.go.id Internet Source	1 %
5	www.scribd.com Internet Source	1 %
6	ojk.go.id Internet Source	1 %
7	www.bmeb-bi.org Internet Source	1 %
8	www.antaranews.com Internet Source	1 %
9	hafizbelajarilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %

11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	onlinelibrary.wiley.com Internet Source	<1 %
15	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to University of Sussex Student Paper	<1 %
17	www.ekon.go.id Internet Source	<1 %
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
19	Finita Rahmadani, Nur Eka Setiowati. "PENGARUH PROGRAM INKLUSI KEUANGAN BMT AI- FALAH TERHADAP TRANSAKSI RENTENIR", <i>Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah</i> , 2017 Publication	<1 %
20	innovation- entrepreneurship.springeropen.com Internet Source	<1 %
21	www.journals.uchicago.edu Internet Source	<1 %

22	Submitted to School of Oriental & African Studies Student Paper	<1 %
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
25	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
27	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Montclair-Kimberley High School Student Paper	<1 %
29	Piya Mahtaney. "Globalization and Sustainable Economic Development", Springer Science and Business Media LLC, 2013 Publication	<1 %
30	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.neraca.co.id Internet Source	<1 %
32	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %

33	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
35	iaraedu.com Internet Source	<1 %
36	radarmalang.jawapos.com Internet Source	<1 %
37	beritasatumedia.cld.bz Internet Source	<1 %
38	theses.gla.ac.uk Internet Source	<1 %
39	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
40	login.semead.com.br Internet Source	<1 %
41	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %
42	docplayer.info Internet Source	<1 %
43	usir.salford.ac.uk Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %

etheses.uin-malang.ac.id

45	Internet Source	<1 %
46	journals.sagepub.com Internet Source	<1 %
47	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
48	Angela C. Lyons, Josephine Kass-Hanna. "Financial Inclusion, Financial Literacy and Economically Vulnerable Populations in the Middle East and North Africa", Emerging Markets Finance and Trade, 2019 Publication	<1 %
49	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
50	openknowledge.worldbank.org Internet Source	<1 %
51	pengertiandanartikel.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	pubs.aeaweb.org Internet Source	<1 %
53	www.mdpi.com Internet Source	<1 %
54	Nur Frita, Ikhwan Hamdani , Abrista Devi. "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Infrastruktur Nasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Program	<1 %

SDGs ", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021

Publication

55 www.kajianpustaka.com <1 %
Internet Source

56 Submitted to Sriwijaya University <1 %
Student Paper

57 bappeda.jogjaprovo.go.id <1 %
Internet Source

58 jepi.fe.ui.ac.id <1 %
Internet Source

59 www.academicjournals.org <1 %
Internet Source

60 Dean Karlan, Martin Valdivia. "Teaching Entrepreneurship: Impact of Business Training on Microfinance Clients and Institutions", Review of Economics and Statistics, 2011 <1 %
Publication

61 Francis K. Agyekum, Krishna Reddy, Damien Wallace, Nirosha H. Wellalage. "Does technological inclusion promote financial inclusion among SMEs? Evidence from South-East Asian (SEA) countries", Global Finance Journal, 2021 <1 %
Publication

62 Submitted to The University of Manchester <1 %
Student Paper

63	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
64	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
65	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
66	journals.abc.us.org Internet Source	<1 %
67	pencarian.jdihn.id Internet Source	<1 %
68	static.rusi.org Internet Source	<1 %
69	www.elsevier.es Internet Source	<1 %
70	www.vibiznews.com Internet Source	<1 %
71	gunungsitoli.rri.co.id Internet Source	<1 %
72	Submitted to Curtin University of Technology Student Paper	<1 %
73	Ratnawaty Marginingsih. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid- 19", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021 Publication	<1 %

74	Submitted to Ravenwood High School Student Paper	<1 %
75	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
76	www.karyailmiah.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
77	Mary Amponsah, Frank W. Agbola, Amir Mahmood. "The impact of informality on inclusive growth in Sub-Saharan Africa: Does financial inclusion matter?", Journal of Policy Modeling, 2021 Publication	<1 %
78	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
79	intomifi.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	journal.sebi.ac.id Internet Source	<1 %
81	www.kreditpedia.net Internet Source	<1 %
82	www.sinoss.net Internet Source	<1 %
83	Submitted to Cornell University Student Paper	<1 %
84	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1 %

85	blogs.worldbank.org Internet Source	<1 %
86	finansial.bisnis.com Internet Source	<1 %
87	jsec.journals.ekb.eg Internet Source	<1 %
88	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
89	Submitted to City University Student Paper	<1 %
90	Shafkat Shafi Dar, Sohini Sahu. "The effect of language on financial inclusion", Economic Modelling, 2021 Publication	<1 %
91	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
92	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
93	Submitted to unigal Student Paper	<1 %
94	www.koreascience.or.kr Internet Source	<1 %
95	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
96	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %

97	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
98	ojs.spiruharet.ro Internet Source	<1 %
99	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
100	www.afs.org.uk Internet Source	<1 %
101	www.enterprisesurveys.org Internet Source	<1 %
102	www.readbag.com Internet Source	<1 %
103	Submitted to Universitas Teuku Umar Student Paper	<1 %
104	id.scribd.com Internet Source	<1 %
105	m.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
106	Submitted to De La Salle University Student Paper	<1 %
107	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
108	ideas.repec.org Internet Source	<1 %
109	kinerja.ekon.go.id Internet Source	<1 %

110	e-jhis.org Internet Source	<1 %
111	jultika.oulu.fi Internet Source	<1 %
112	niasrs.wordpress.com Internet Source	<1 %
113	repozitorij.svkst.unist.hr Internet Source	<1 %
114	www.bis.org Internet Source	<1 %
115	academic.oup.com Internet Source	<1 %
116	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	<1 %
117	ekobis.stieriau-akbar.ac.id Internet Source	<1 %
118	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
119	republika.co.id Internet Source	<1 %
120	upperline.id Internet Source	<1 %
121	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
122	www.mandg.com Internet Source	<1 %

123	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
124	Thi Xuan Huong Tram, Tien Dinh Lai, Thi Truc Huong Nguyen. "CONSTRUCTING A COMPOSITE FINANCIAL INCLUSION INDEX FOR DEVELOPING ECONOMIES", The Quarterly Review of Economics and Finance, 2021 Publication	<1 %
125	core.ac.uk Internet Source	<1 %
126	ejournal.imperiuminstitute.org Internet Source	<1 %
127	indef.or.id Internet Source	<1 %
128	issuu.com Internet Source	<1 %
129	lovelyristin.com Internet Source	<1 %
130	maspurba.wordpress.com Internet Source	<1 %
131	www.theeconomics.com Internet Source	<1 %
132	123dok.com Internet Source	<1 %
133	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	

<1 %

134 Submitted to Sultan Agung Islamic
University
Student Paper

<1 %

135 Vinay Kandpal, Osamah Ibrahim Khalaf.
"chapter 15 Artificial Intelligence and SHGs",
IGI Global, 2020
Publication

<1 %

136 adalah.co.id
Internet Source

<1 %

137 adoc.pub
Internet Source

<1 %

138 cdn.smefinanceforum.org
Internet Source

<1 %

139 e-journal.unair.ac.id
Internet Source

<1 %

140 essuir.sumdu.edu.ua
Internet Source

<1 %

141 islamicmarkets.com
Internet Source

<1 %

142 kseifebundip.com
Internet Source

<1 %

143 markettrack.id
Internet Source

<1 %

144 moam.info
Internet Source

<1 %

145	pascasarjanafe.untan.ac.id Internet Source	<1 %
146	qdoc.tips Internet Source	<1 %
147	redi.unjbg.edu.pe Internet Source	<1 %
148	sikapiuangmu.ojk.go.id Internet Source	<1 %
149	www.depokpos.com Internet Source	<1 %
150	www.finansialku.com Internet Source	<1 %
151	www.frbatlanta.org Internet Source	<1 %
152	www.grin.com Internet Source	<1 %
153	www.ijern.com Internet Source	<1 %
154	Shafkat Shafi Dar, Sohini Sahu. "The effect of language on financial inclusion", Economic Modelling, 2022 Publication	<1 %
155	alhasyi.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %

157 nurlailatulrmd.wordpress.com Internet Source <1 %

158 Bruno Emmanuel Ongo Nkoa, Jacques Simon Song. "Does institutional quality affect financial inclusion in Africa? A panel data analysis", *Economic Systems*, 2020 Publication <1 %

159 ejournal-binainsani.ac.id Internet Source <1 %

160 zombiedoc.com Internet Source <1 %

161 Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 4 words

Exclude bibliography On